

**BENTUK-BENTUK PERLAWANAN JURNALIS TEMPO TERHADAP
PEMBREDELAN PADA ERA ORDE BARU (1994-1998)**

(SKRIPSI)

Oleh
Zalfa Izzati Hadini
2213033078



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2026

ABSTRAK

BENTUK-BENTUK PERLAWANAN JURNALIS TEMPO TERHADAP PEMBREDELAN PADA ERA ORDE BARU (1994-1998)

Oleh

ZALFA IZZATI HADINI

Pers adalah pilar demokrasi yang mengawasi kekuasaan dan membentuk opini publik, tetapi pada masa Orde Baru kebebasannya dibatasi melalui sistem SIUPP. Pembredelan Majalah Tempo 21 Juni 1994 menjadi wujud represi negara terhadap pers kritis. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlawanan jurnalis Tempo periode 1994–1998 dengan metode historis meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dengan pengumpulan data kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan dua bentuk utama perlawanan, yakni jalur litigasi dan pendirian Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Gugatan hukum terhadap pencabutan SIUPP, meskipun berakhir kalah di tingkat kasasi, memiliki makna simbolik dan moral karena membuka kesadaran publik atas praktik otoritarianisme negara. Di ranah masyarakat sipil, AJI menjalankan strategi melalui penerbitan buletin bawah tanah, pendidikan dan pelatihan jurnalistik, kampanye anti-amplop, advokasi wartawan yang ditangkap, serta penguatan solidaritas nasional dan internasional. Aktivitas ini menghasilkan dampak konkret: lahirnya wacana tandingan, jurnalis independen investigatif, Kode Etik Jurnalistik Independen (KEJI), perlindungan hukum kolektif, dan meningkatnya tekanan politik-moral global pada rezim.

Dengan perspektif hegemoni Antonio Gramsci dan konsep *war of position*, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlawanan jurnalis Tempo bersifat ideologis, kultural, dan akumulatif, serta berkontribusi signifikan dalam melemahkan hegemoni Orde Baru dan membangun fondasi kebebasan pers pada era Reformasi.

Kata Kunci: Majalah Tempo, Orde Baru, Pembredelan, Hegemoni

ABSTRACT

FORMS OF RESISTANCE BY TEMPO JOURNALIST AGAINST THE BANNING DURING THE NEW ORDER ERA (1994–1998)

By

ZALFA IZZATI HADINI

The press is a pillar of democracy that functions to oversee power and shape public opinion; however, during the New Order era its freedom was restricted through the SIUPP system. The banning of Tempo Magazine on 21 June 1994 represented a form of state repression against the critical press. This study aims to analyze the resistance of Tempo journalists in the 1994–1998 period using historical methods, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, with data collected through literature study, documentation, and interviews. The findings show two main forms of resistance: the litigation route and the establishment of the Alliance of Independent Journalists (AJI). The legal challenge against the revocation of SIUPP, although it ended in defeat at the cassation level, held symbolic and moral significance by raising public awareness of authoritarian state practices. Within civil society, AJI pursued strategies through underground bulletin publications, journalistic education and training, anti-envelope campaigns, advocacy for detained journalists, and the strengthening of national and international solidarity. These activities produced concrete impacts: the emergence of counter-discourses, the rise of investigative independent journalists, the creation of the Independent Journalistic Code of Ethics (KEJI), collective legal protection mechanisms, and increased global political and moral pressure on the regime. Drawing on Antonio Gramsci's theory of hegemony, particularly the concept of war of position, this study concludes that Tempo journalists' resistance was ideological, cultural, and accumulative in character, contributing significantly to the erosion of New Order hegemony and to the establishment of normative foundations for press freedom in the Reformasi era.

Keywords: *Tempo Magazine, New Order, Press Banning, Hegemony*

**BENTUK-BENTUK PERLAWANAN JURNALIS TEMPO TERHADAP
PEMBREDELAN PADA ERA ORDE BARU (1994-1998)**

Oleh

ZALFA IZZATI HADINI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : BENTUK-BENTUK PERLAWANAN JURNALIS
TEMPO TERHADAP PEMBREDELAN PADA
ERA ORDE BARU (1994-1998)

Nama Mahasiswa : Zalfa Izzati Hadini

Nomor Pokok Mahasiswa : 2213033078

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Studi : Pendidikan Sejarah


Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

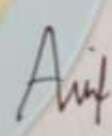


1. MENYETUJUI
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

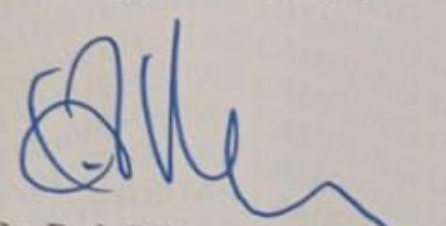

Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199310262019031009

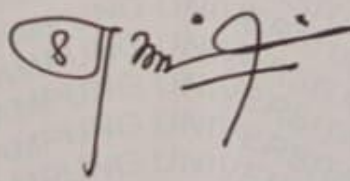

Aprilia Tri Aristina, S. Pd., M. Pd.
NIP. 198804262025212042

2. MENGETAHUI

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial,

Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah,


Dr. Dedy Miswar, S. Si., M. Pd.
NIP. 197411082005011003

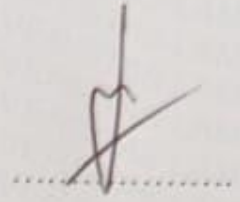

Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197009132008122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

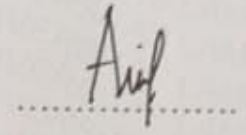
Ketua

: Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd.



Sekretaris

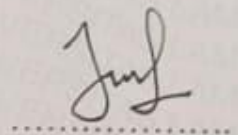
: Aprilia Tri Aristina, S.Pd., M.Pd.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Dr. Sumargono, M.Pd.

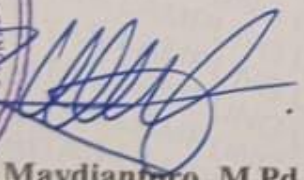


2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Alhet Maydiantoro, M.Pd.

NIP. 198705042014041001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zalfa Izzati Hadini
NPM : 2213033078
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan/Fakultas : PIPS/Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Perumdam 2, Tanjung Raya Permai Blok A3 No 29/30,
Bandar Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026



Zalfa Izzati Hadini
NPM. 2213033078

RIWAYAT HIDUP



Zalfa Izzati Hadini lahir pada 10 Juni 2004 di Bandar Lampung. Ia merupakan putri dari pasangan Bapak Fatmali Hadi dan Ibu Dini Novi Yanti, serta anak kedua dari dua bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Perumdam 2, Perumahan Tanjung Raya Permai, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh dimulai dari SD Negeri 2 Way Halim dan lulus pada Tahun 2016, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 28 Bandar Lampung hingga lulus pada Tahun 2019. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung dan menyelesaikannya pada Tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Prodi Pendidikan Sejarah. Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan, salah satunya Lomba Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) bersama tim yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek pada Tahun 2023 dan 2025. Dalam ajang tersebut, tim berhasil lolos pendanaan dan melaju hingga tingkat nasional. Selain itu, penulis juga melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi ini di Kantor Redaksi Tempo dan Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, pada tanggal 22 hingga 24 September 2025, dengan arahan serta bimbingan dari dosen pembimbing. Berkat ketekunan, motivasi yang tinggi, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Bentuk-Bentuk Perlawanan Jurnalis Tempo Terhadap Pembredelan pada Era Orde Baru (1994-1998)”**. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, khususnya dalam kajian sejarah pers dan kebebasan berpendapat di Indonesia.

MOTTO

“Pilar utama dari kebebasan masyarakat adalah kebebasan pers.”

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik sepanjang masa. Dengan penuh rasa syukur, karya ini kupersembahkan kepada:

Kedua orangtuaku, Bapak Fatmali Hadi dan Ibu Dini Novi Yanti.

Terima kasih yang tak terhingga ku ucapkan kepada kedua orang tua ku tercinta, Papah dan Mamah, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang. Tanpa restu, dukungan moril dan materil dari kalian, perjalanan panjang dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin saya lalui. Segala doa dan pengorbanan kalian menjadi semangat terbesar dalam setiap langkah perjuanganku.

Untuk Almamaterku Tercinta
“UNIVERSITAS LAMPUNG”

SANWANCANA

Allhamdulillahirobbil'aalamin,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi yang berjudul **“Bentuk-Bentuk Perlawanan Jurnalis Tempo Terhadap Pembredelan pada Era Orde Baru (1994-1998)”**. adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

6. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, terima kasih banyak Ibu atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
7. Bapak Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd selaku dosen Pembimbing I skripsi penulis, terima kasih banyak Bapak atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
8. Ibu Aprilia Triaristina, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembimbing II skripsi penulis, terima kasih banyak Ibu atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Bapak Dr. Sumargono, M.Pd. selaku dosen Pembahas skripsi penulis, terimakasih banyak Bapak atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, dan para pendidik di Universitas Lampung pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
11. Teruntuk keluargaku tersayang, Papa dan Mama yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat tanpa henti dalam setiap langkah perjalanan penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Mba Ara yang senantiasa mendampingi, memberi motivasi, serta menjadi tempat berbagi cerita dan inspirasi.
12. Teruntuk sahabat-sahabat terdekatku, Chintia Putri Purwoadi, Natasya Nurma Sari, Bunga Gesyarini, Mega Suci Amelia, Indira Anastasya, Eka Nurul Kiromah, Shabita Erliza, Puti Nur Afni, Syafa Putri Talisa dan Annisa Salsabila. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang telah kalian berikan sejak awal perjalanan kuliah hingga saat ini. Kehadiran kalian telah menjadi sumber semangat, tempat berbagi cerita, sekaligus penguat di setiap langkahku. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, pemberi dorongan, dan penguat dalam suka maupun

duka. Persahabatan ini adalah anugerah yang akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur.

13. Teruntuk teman-teman seangkatan 2022, Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kita lalui bersama selama masa perkuliahan. Setiap pengalaman, canda, dan perjuangan yang kita jalani bersama menjadi bagian berharga penulis.
14. Teruntuk kakak-kakak tingkat di Program Studi Pendidikan Sejarah, Terima kasih atas segala bantuan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan. Bimbingan serta pengalaman yang kakak-kakak bagikan sangat berarti dan membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
15. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang pernah menghadirkan luka, namun justru menjadi titik balik untuk bangkit dan bertumbuh. Dari pengalaman tersebut, penulis belajar tentang ketahanan, kedewasaan, dan makna setiap peristiwa, yang pada akhirnya turut menguatkan langkah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga hasil penulisan penelitian ini akan dapat berguna serta bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan atas semua yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026

Zalfa Izzati Hadini
NPM. 2213033078

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Secara Teoritis	8
1.4.2 Secara Praktis.....	8
1.5 Kerangka Berpikir.....	9
1.6 Paradigma Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.1.1 Majalah Tempo	11
2.1.2 Konsep Pembredelan	12
2.1.3 Orde Baru	15
2.2 Peneliti Terdahulu	17
III. METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	19
3.1.1 <i>Heuristik</i>	21
3.1.2 Kritik Sumber.....	24
3.1.3 <i>Interpretasi</i>	27
3.1.4 <i>Historiografi</i>	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data	31

3.2.1 Teknik Kepustakaan	31
3.2.2 Teknik Dokumentasi.....	32
3.2.3 Teknik Wawancara.....	33
3.3 Teknik Analisis Data.....	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil.....	36
4.1.1 Gambaran Umum Majalah Tempo	36
4.1.2 Kondisi pers dan Kronologi Pembredelan Majalah Tempo di Era Orde Baru.....	40
4.1.3 Bentuk-Bentuk Perlawanan Majalah Tempo terhadap Pembredelan	58
4.1.3.1 Perlawanan Melalui Jalur Litigasi (Hukum)	58
4.1.3.2 Perlawanan Melalui Aliansi Jurnalis Independen (AJI).....	68
4.1.4 Terbit Kembali Tempo: Simbol Kebangkitan Jurnalisme Pasca Pembredelan	117
4.2 Pembahasan	146
4.2.1 Analisis Teori Hegemoni Gramsci terhadap Bentuk-bentuk Perlawanan Jurnalis Tempo	146
V. KESIMPULAN DAN SARAN	163
5.1 Kesimpulan.....	163
5.2 Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN	168

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4. 1. Surat Keputusan Pembatalan Surat Izin Usaha Majalah Tempo	38
Gambar 4. 2. Sampul Majalah Tempo Edisi 11 Juni 1994	45
Gambar 4. 3. Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 11 Juni 1994 Halaman 21 ...	46
Gambar 4. 4. Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 11 Juni 1994 Halaman 22 ...	47
Gambar 4. 5. Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 11 Juni 1994 Halaman 23 ...	49
Gambar 4. 6. Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 11 Juni 1994 Halaman 23 ...	51
Gambar 4. 7. Masyarakat Unjuk Rasa Menentang Pembredelan Majalah Tempo, Editor dan Tabloid Detik di Departemen Penerangan.....	56
Gambar 4. 8. Pelukis Semsar Siahaan Digiring Polisi Ketika Melakukan Aksi Unjuk Rasa Menentang Pembredelan	57
Gambar 4. 9. Goenawan Mohamad dalam Sidang Pembredelan Majalah Tempo di PTUN	60
Gambar 4. 10. Goenawan Mohamad, Widiarti Goenawan, Fikri Jufri Menangis Saat Menghadiri Sidang Pengadilan Gugatan Tempo di PTUN	62
Gambar 4. 11. Goenawan Mohamad Dikerumuni Wartawan di Gedung Mahkamah Agung, Setelah Sidang Kasasi TEMPO Kalah	66
Gambar 4. 12. Deklarasi Sirnagalih.....	69
Gambar 4. 13. Penandatanganan Deklarasi Sirnagalih pada 7 Agustus 1994.....	72
Gambar 4. 14. Naskah Penandatanganan Deklarasi Sirnagalih	73
Gambar 4. 15. Sampul Buletin Independen Edisi Anti Pembredelan Juli 1994....	76
Gambar 4. 16. Buletin Independen Edisi Anti Pembredelan Juli 1994 Hal 2	77
Gambar 4. 17. Buletin Independen Edisi Anti Pembredelan Juli 1994 Hal 6	78
Gambar 4. 18. Sampul Buletin Independen Edisi Pengadilan Pers Alternatif Tanggal 1 Juni 1995	80
Gambar 4. 19. Buletin Independen Edisi Pengadilan Pers Alternatif Tanggal 1 Juni 1995 Hal 3.....	81
Gambar 4. 20. Buletin Independen Edisi Pengadilan Pers Alternatif Tanggal 1 Juni 1995 Hal 4.....	82
Gambar 4. 21. Buletin Independen Edisi Pengadilan Pers Alternatif Tanggal 1 Juni 1995 Hal 9.....	83
Gambar 4. 22. Sampul Buletin Independen Edisi Politik Premanisme Bulan Mei 1996	67

Gambar 4. 23. Buletin Independen Edisi Politik Premanisme Bulan Mei 1996 Hal 3.....	86
Gambar 4. 24. Buletin Independen Edisi Politik Premanisme Bulan Mei 1996 Hal 4 & 5..	87
Gambar 4. 25. Buletin Independen Edisi Politik Premanisme Bulan Mei 1996 Hal 11	89
Gambar 4. 26. Buletin Independen Edisi Politik Premanisme Bulan Mei 1996 Hal 25	91
Gambar 4. 27. Sampul Buletin Independen Edisi Pemilu 1997 Tidak Sah Bulan Mei 1997 ..	93
Gambar 4. 28. Buletin Independen Edisi Pemilu 1997 Tidak Sah Bulan Mei 1997 Hal 2..	94
Gambar 4. 29. Buletin Independen Edisi Pemilu 1997 Tidak Sah Bulan Mei 1997 Hal 5..	96
Gambar 4. 30. Buletin Independen Edisi Pemilu 1997 Tidak Sah Bulan Mei 1997 Hal 8..	97
Gambar 4. 31. Buletin Independen Edisi Pemilu 1997 Tidak Sah Bulan Mei 1997 Hal 14	99
Gambar 4. 32. Ahmad Taufik dan Eko "Item" Maryadi di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Juni 1995.....	113
Gambar 4. 33. Sampul Majalah Tempo "Mengapa SOEHARTO Menantang" Edisi 3 Oktober 1998.....	121
Gambar 4. 34. Majalah Tempo "Mengapa SOEHARTO Menantang" Edisi 3 Oktober 1998 Hal 18.....	122
Gambar 4. 35. Majalah Tempo "Mengapa SOEHARTO Menantang" Edisi 3 Oktober 1998 Hal 19.....	125
Gambar 4. 36. Majalah Tempo "Mengapa SOEHARTO Menantang" Edisi 3 Oktober 1998 Hal 20.....	127
Gambar 4. 37. Majalah Tempo "Mengapa SOEHARTO Menantang" Edisi 3 Oktober 1998 Hal 22.....	129
Gambar 4. 38. Sampul Majalah Tempo "Pemeriksaan: CERITA & FAKTA" Edisi 6-12 Oktober 1998.....	131
Gambar 4. 39. Majalah Tempo "Pemeriksaan: CERITA & FAKTA" Edisi 6-12 Oktober 1998 Hal 15.....	133
Gambar 4. 40. Majalah Tempo "Pemeriksaan: CERITA & FAKTA" Edisi 6-12 Oktober 1998 Hal 56.....	135
Gambar 4. 41. Majalah Tempo "Pemeriksaan: CERITA & FAKTA" Edisi 6-12 Oktober 1998 Hal 58.....	137
Gambar 4. 42. Majalah Tempo "Pemeriksaan: CERITA & FAKTA" Edisi 6-12 Oktober 1998 Hal 66.....	139
Gambar 4. 43. Majalah Tempo "Pemeriksaan: CERITA & FAKTA" Edisi 6-12 Oktober 1998 Hal 67.....	142

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian ke Perpustakaan Nasional RI	169
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian ke Kantor Redaksi Tempo	170
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	167
Lampiran 3. Transkrip Wawancara Informan Pertama	177
Lampiran 4. Transkrip Wawancara Informan Kedua.....	192
Lampiran 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999	208
Lampiran 6. Peneliti dengan Goenawan Mohamad	209
Lampiran 7. Peneliti dengan Andreas Harsono	210
Lampiran 8. Peneliti di Kantor Redaksi Tempo	211

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pers merupakan salah satu pilar fundamental dalam ekosistem demokrasi, karena menjalankan fungsi vital dalam menjembatani kepentingan publik dan kekuasaan negara. Dalam sebuah sistem demokratis yang sehat, pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyediakan ruang diskusi dan perdebatan publik yang bebas dan terbuka. Dalam teori komunikasi politik klasik, pers sering dijuluki sebagai *the fourth estate* atau kekuasaan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Edmund Burke pada abad ke-18 dan dihidupkan kembali dalam diskursus kontemporer oleh ilmuwan komunikasi seperti Brian McNair (2003), yang menegaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dengan menjalankan fungsi kontrol sosial dan membentuk opini publik yang kritis terhadap kebijakan negara.

Sebagai pilar keempat tersebut, pers idealnya beroperasi secara bebas, independen, dan otonom, tidak tunduk pada intervensi politik, sensor negara, atau tekanan kepentingan korporasi. Kebebasan pers merupakan bagian tak terpisahkan dari kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang merupakan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan kovenan internasional lainnya. Dalam praktiknya, keberadaan pers yang bebas menciptakan kondisi check and balance yang esensial dalam kehidupan berbangsa, khususnya ketika kekuasaan cenderung korup, otoriter, atau menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional. Namun, kondisi ideal tersebut sering kali tidak terwujud, terutama dalam konteks negara-negara dengan sistem pemerintahan otoriter atau semi-otoriter. Dalam rezim semacam ini, kebebasan pers justru

dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan, dan karena itu, dikendalikan secara ketat. Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru (1966–1998) adalah contoh konkret dari bagaimana kekuasaan negara memanipulasi dan menundukkan pers demi mempertahankan hegemoni politik dan ideologis. Rezim Soeharto membangun sebuah sistem media yang sangat terpusat dan dikontrol melalui perangkat regulatif dan koersif. Salah satu mekanisme utama adalah sistem Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang memberikan kewenangan mutlak kepada Departemen Penerangan untuk menentukan eksistensi legal suatu media. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mencabut izin terbit media kapan pun dianggap menyimpang atau mengkritik kebijakan negara (Steele, 2014).

Pratama dan Perdana dalam buku *Sejarah Indonesia Masa Orde Baru hingga Reformasi* menegaskan bahwa kebijakan pengendalian pers pada masa Orde Baru merupakan bagian dari strategi politik negara untuk menciptakan stabilitas semu dan mengamankan kekuasaan Presiden Soeharto. Pers diposisikan sebagai alat legitimasi pembangunan dan tidak diberi ruang untuk menjalankan fungsi kritik secara bebas. Pemerintahan Orde Baru sangat menyadari pengaruh media dalam membentuk opini publik, sehingga kontrol terhadap pers dijalankan secara sistematis melalui SIUPP sebagai instrumen utama pembungkaman. Setiap media yang dianggap menyimpang dari narasi resmi negara berisiko kehilangan izin terbit tanpa mekanisme hukum yang transparan. Praktik intervensi tersebut dilakukan oleh Departemen Penerangan yang saat itu dipimpin oleh Harmoko, tokoh yang dikenal memiliki kedekatan politik dengan Presiden Soeharto (Pratama & Perdana).

Pemerintahan Orde Baru sangat menyadari kekuatan media dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, negara menciptakan sistem kendali ketat terhadap pers melalui mekanisme Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang menjadi senjata utama untuk mengontrol isi dan keberlangsungan media. Setiap media yang tidak sejalan dengan narasi pemerintah berisiko dicabut izinnya sewaktu-waktu tanpa proses hukum yang transparan. Intervensi semacam ini dilakukan oleh Departemen Penerangan yang kala itu dikepalai oleh Harmoko, seorang tokoh yang memiliki kedekatan erat dengan Presiden Soeharto.

Majalah Tempo muncul sebagai media progresif di tengah sistem pers yang represif. Didirikan pada 6 Maret 1971 oleh Goenawan Mohamad dan para jurnalis-intelektual, Tempo mengusung semangat jurnalisme kritis yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menganalisis dan mengkritik kekuasaan. Bersama Editor dan Detik, Tempo dibredel pada 21 Juni 1994 karena keberaniannya mengangkat isu-isu sensitif seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan konflik internal militer. Sejak awal, Tempo dikenal dengan format majalah berita mingguan yang memadukan jurnalisme naratif dan analitis, menggali konteks sosial, politik, dan ekonomi secara mendalam. Dalam edisi perdananya, Goenawan Mohamad menegaskan bahwa Tempo bertujuan menyajikan berita secara cerdas dan tajam dengan menjunjung kebenaran serta mendorong wartawan berpikir kritis, bukan sekadar mengutip sumber resmi. (Goenawan Mohamad, 2001).

Puncak ketegangan antara Tempo dan pemerintah Orde Baru terjadi pada pertengahan 1994. Ketika itu, Tempo menerbitkan laporan investigatif terkait pembelian 39 kapal perang bekas oleh B.J. Habibie, Menteri Riset dan Teknologi. Laporan tersebut menyinggung dugaan ketidakefisienan, pemborosan anggaran negara, hingga intervensi militer dalam keputusan sipil. Alih-alih menjawab kritik tersebut secara argumentatif, pemerintah merespons dengan mencabut SIUPP Tempo. Pembredelan ini menjadi simbol otoritarianisme Orde Baru terhadap kebebasan berekspresi dan mengundang kecaman dari dalam dan luar negeri.

Alih-alih menyerah dan berhenti berkarya, pembredelan terhadap Tempo pada Juni 1994 justru menjadi pemicu perlawanan besar dalam sejarah pers Indonesia. Peristiwa ini menandai titik balik kesadaran kolektif di kalangan jurnalis tentang pentingnya kebebasan pers yang sejati dan tidak tunduk pada otoritas negara. Di tengah suasana represif dan penuh ketakutan, para jurnalis dari Tempo menunjukkan bahwa semangat perlawanan dapat bertumbuh dari kehancuran. Goenawan Mohamad, salah satu pendiri Tempo dan tokoh intelektual penting dalam dunia pers Indonesia, bersama sejumlah redaktur lainnya seperti Ahmad Taufik, Iskandar Ali, Andreas Harsono, dan Nezar Patria, kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tanggal 7 Agustus 1994 di Sirnagalih, Bogor. Tempat yang terpencil dan tersembunyi itu menjadi saksi lahirnya

organisasi jurnalis pertama di Indonesia yang tidak bergantung pada pengakuan negara dan berani menantang hegemoni pemerintah Orde Baru (Steele, 2014).

Pendirian AJI merupakan langkah revolusioner yang melampaui sekadar pembentukan organisasi profesi. Dalam iklim politik yang sangat represif, di mana semua organisasi resmi harus mendapat legitimasi dan izin dari pemerintah, deklarasi AJI adalah bentuk pembangkangan terbuka terhadap negara. AJI secara eksplisit menolak tunduk pada sistem Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang selama ini menjadi alat pemerintah untuk mengontrol dan membungkam media. Mereka menegaskan bahwa jurnanisme harus merdeka dari segala bentuk tekanan politik dan ekonomi. Dalam pernyataan sikapnya, AJI menyatakan bahwa “kebenaran tidak membutuhkan izin negara”. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan manifestasi dari tekad kuat para jurnalis untuk membebaskan profesi mereka dari belenggu otoritarisme.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berfungsi sebagai pusat gerakan perlawanan dan advokasi kebebasan pers di luar kerangka organisasi formal. Melalui penerbitan buletin *Independen* yang disebarluaskan secara sembunyi-sembunyi, AJI menyampaikan laporan investigatif, opini kritis, dan informasi yang dilarang di media arus utama. Meski dianggap ilegal dan berisiko sanksi hukum, para jurnalis AJI tetap memanfaatkan jaringan bawah tanah dan aktivis mahasiswa untuk mendistribusikannya. Perjuangan ini memicu tekanan keras dari aparat keamanan, mulai dari pengawasan, intimidasi, hingga penangkapan. Kasus paling menonjol adalah pemenjaraan Ahmad Taufik pada 1995, disusul intimidasi terhadap jurnalis lain seperti Iskandar Ali, Nezar Patria, dan Andreas Harsono. Kondisi kerja yang berbahaya tersebut justru menegaskan bahwa perlawanan terhadap represi pers dijalankan oleh individu-individu yang berani mempertaruhkan keselamatan pribadi demi menegakkan demokrasi, transparansi, dan hak publik atas informasi. (Steele, 2014).

Perlawanan *Tempo* terhadap pembredelan oleh rezim Orde Baru tidak hanya dilakukan melalui solidaritas jurnalis dan pembentukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), tetapi juga diwujudkan melalui langkah berani menempuh jalur litigasi atau hukum, sebuah pendekatan yang sangat langka dan berisiko tinggi di tengah

kuatnya dominasi negara atas institusi peradilan pada masa itu. Setelah pembredelan pada 21 Juni 1994 oleh Menteri Penerangan Harmoko yang mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Tempo tanpa melalui proses hukum yang transparan, pihak PT Tempo Inti Media memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dalam semangat membela hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, mereka menggugat Menteri Penerangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan ini merupakan langkah yang nyaris revolusioner karena sebelumnya belum pernah ada media yang secara frontal menggugat negara atas pencabutan SIUPP, terlebih di tengah sistem hukum yang dikooptasi oleh kepentingan penguasa Orde Baru. Meski kemudian gugatan tersebut ditolak oleh PTUN dan diperkuat kembali oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi, langkah hukum ini tetap menjadi tonggak sejarah dalam perjuangan pers Indonesia.

Seperti yang dikemukakan oleh Andreas Harsono, gugatan Tempo membuka babak baru dalam sejarah jurnalisme Indonesia, yakni keberanian pers untuk membawa konflik kebebasan informasi ke ranah hukum formal, dan meskipun kalah secara hukum, mereka menang secara moral dan politis karena berhasil mengangkat isu pembredelan ke ruang publik yang lebih luas. Tidak hanya itu, David T. Hill dalam *The Press in New Order Indonesia* menyebut bahwa perlawanan hukum Tempo menjadi indikator bahwa resistensi terhadap negara tidak lagi terbatas pada ruang redaksi atau liputan jurnalistik, tetapi juga mulai memasuki ranah legal-formal yang dapat menggugah kesadaran masyarakat sipil terhadap pentingnya supremasi hukum dan independensi pers. Selain memberikan inspirasi bagi media lain, upaya litigasi ini juga menjadi dasar penting dalam pembentukan kerangka hukum pasca-Orde Baru, terutama dalam perumusan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 yang menghapus mekanisme SIUPP dan menegaskan kebebasan pers sebagai hak publik yang dilindungi konstitusi.

Menariknya, meskipun Tempo secara resmi dibredel, pengaruh yang mereka bangun tetap hidup melalui kanal-kanal alternatif. Diskusi-diskusi mahasiswa, jurnal-jurnal kampus, dan bahkan ruang sastra menjadi tempat persemaian gagasan kebebasan yang sebelumnya ditekan. Ini membuktikan bahwa pembredelan tidak

sepenuhnya mampu membungkam pemikiran. Dalam kerangka ini, Tempo tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap represi pers, tetapi juga aktor kultural dalam membangun kesadaran kritis publik. Sebagaimana dikatakan oleh Pierre Bourdieu, media adalah ruang produksi makna, dan dalam konteks Indonesia 1990-an, Tempo memainkan peran tersebut secara signifikan (Bourdieu, 1998).

Kejatuhan rezim Orde Baru pada Mei 1998 membuka kembali ruang demokrasi dan mengakhiri kontrol ketat negara terhadap pers Indonesia. Salah satu dampak terpenting dari perubahan ini adalah pulihnya kebebasan pers setelah lebih dari tiga dekade mengalami pembatasan. Dalam konteks tersebut, Majalah Tempo resmi kembali terbit pada Oktober 1998 dengan semangat baru, namun tetap berpegang pada tradisi jurnalisme investigatif yang kritis dan berintegritas. Kembalinya Tempo tidak sekadar menandai berakhirnya status pembredelan, melainkan menjadi simbol kebangkitan pers Indonesia yang sebelumnya dibungkam oleh rezim otoriter. Peristiwa ini disambut luas sebagai kemenangan bagi kebebasan berekspresi dan hak publik untuk memperoleh informasi yang independen dan bertanggung jawab. Lebih dari itu, kehadiran kembali Tempo menegaskan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi mengawasi kekuasaan dan mendorong kesadaran kritis masyarakat. Melalui kajian ini, penulis berupaya menelusuri secara lebih mendalam bagaimana Bentuk-Bentuk Perlawanan Jurnalis Tempo Terhadap Pembredelan Pada Era Orde Baru (1994-1998), serta bagaimana perjuangan tersebut memberikan kontribusi besar terhadap proses demokratisasi, reformasi sosial, dan penguatan kebebasan pers di Indonesia pasca-1998.

Penelitian mengenai pembredelan Majalah Tempo sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Nugroho (2023) dalam skripsinya berjudul “Pembredelan Majalah Tempo Tahun 1994 sebagai Awal Kebangkitan Pers di Indonesia” di Universitas Lampung menyoroti bahwa pembredelan Tempo menjadi pemicu kesadaran nasional terhadap pentingnya kebebasan pers dan menjadi tonggak kebangkitan jurnalisme independen di Indonesia. Sementara itu, Abdul (2023) dalam penelitiannya berjudul “Dampak Pembredelan Tempo, Editor, dan Detik pada 21 Juni 1994” di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Bandung menitikberatkan pada analisis dampak sosial dan politik dari kebijakan pembredelan terhadap dunia media dan opini publik. Sedangkan Rosyada (2022) melalui skripsinya “Pembredelan Majalah Tempo pada Masa Orde Baru Tahun 1994” di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa membahas dinamika pembredelan dalam konteks politik media Orde Baru, namun lebih terfokus pada hubungan kekuasaan negara dengan lembaga pers.

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji peristiwa pembredelan Tempo dari sisi kebijakan dan dampaknya, tetapi juga menelaah bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Tempo dan para jurnalisnya terhadap represi negara. Penelitian ini berupaya menelusuri secara lebih mendalam perlawanan Tempo dalam tiga dimensi utama: melalui jalur litigasi, pendirian Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan penerbitan kembali Tempo pasca-reformasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kesenjangan (*research gap*) dalam hal fokus analisis yang menempatkan perlawanan Majalah Tempo sebagai strategi melawan hegemoni Orde Baru, serta sebagai fondasi penting bagi perkembangan kebebasan pers di Indonesia pasca-1998.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apasajakah Bentuk-Bentuk Perlawanan Majalah Tempo dalam Menghadapi Pembredelan pada Era Orde Baru (1994-1998)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk-Bentuk Perlawanan Majalah Tempo dalam Menghadapi Pembredelan pada Era Orde Baru (1994-1998).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan, adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlawanan Majalah Tempo terhadap pembredelan pada era orde baru (1994-1998).

1.4.2 Secara Praktis

A. Bagi Universitas Lampung

Membantu civitas lainnya untuk dijadikan bahan pengembangan pengetahuan, khususnya mengenai bentuk-bentuk perlawanan Jurnalis Tempo terhadap pembredelan pada era orde baru (1994-1998).

B. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam menganalisa terkait dengan bentuk-bentuk perlawanan Jurnalis Tempo terhadap pembredelan pada era orde baru (1994-1998).

C. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis akan kesejarahan yakni terkait dengan bentuk-bentuk perlawanan Jurnalis Tempo terhadap pembredelan pada era orde baru (1994-1998).

D. Bagi Pembaca

Memperluas pengetahuan akan salah satu sejarah, yaitu pembredelan Majalah Tempo pada era orde baru (1994-1998).

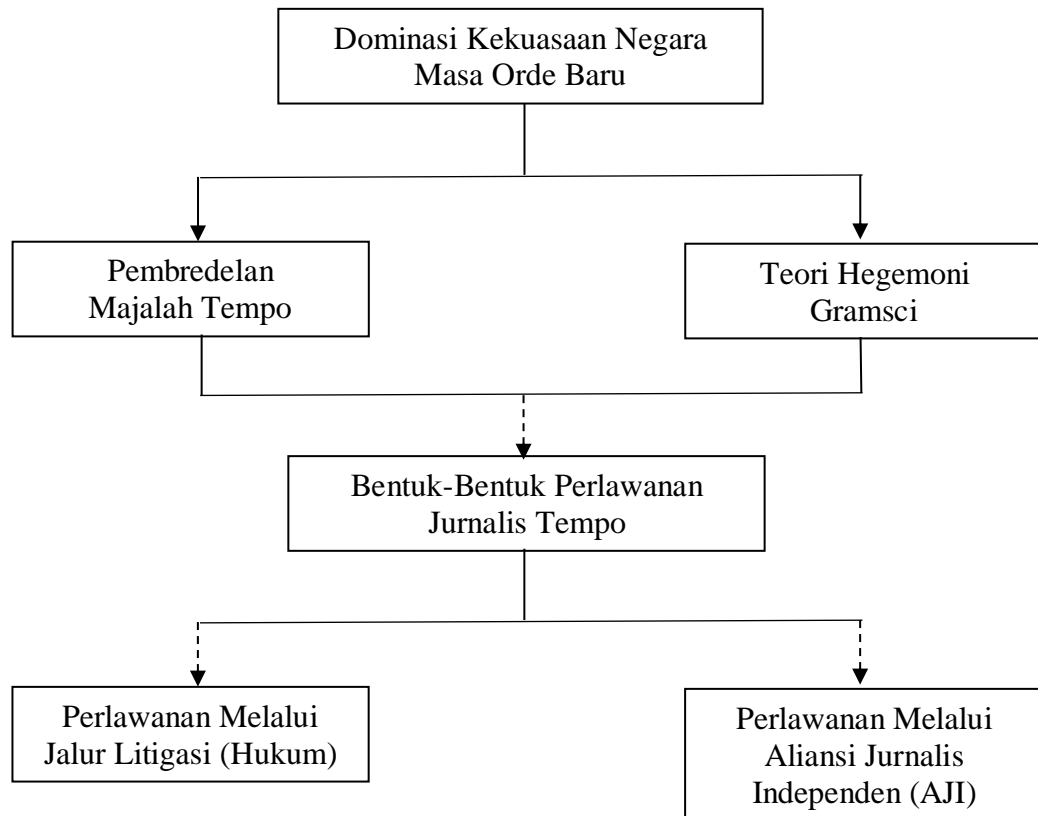
1.5 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari konteks dominasi kekuasaan negara pada masa Orde Baru yang ditandai oleh sistem politik otoriter dan kontrol ketat terhadap pers. Negara menggunakan berbagai instrumen regulasi, seperti Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), untuk membatasi kebebasan media dan menjaga stabilitas kekuasaan. Dalam situasi tersebut, pers tidak hanya ditempatkan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai objek pengendalian politik. Dalam konteks dominasi tersebut, Majalah Tempo mengalami pembredelan pada Tahun 1994 akibat pemberitaan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rezim. Pembredelan ini menjadi titik penting yang menunjukkan relasi kuasa antara negara dan media, sekaligus memicu lahirnya berbagai bentuk perlawanan dari kalangan jurnalis Tempo.

Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Hegemoni Antonio Gramsci sebagai pisau analisis. Teori ini memandang kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan (*coercion*), tetapi juga melalui persetujuan (*consent*) yang dibangun di ranah masyarakat sipil. Dalam kerangka Gramsci, media dipahami sebagai arena penting dalam pertarungan hegemoni antara negara dan kelompok masyarakat sipil. Berdasarkan pembredelan yang dialami Tempo dan kerangka teoritik Gramsci, penelitian ini memfokuskan kajian pada bentuk-bentuk perlawanan jurnalis Tempo terhadap dominasi negara. Perlawanan tersebut dipahami sebagai upaya sistematis untuk menantang hegemoni Orde Baru sekaligus mempertahankan nilai-nilai kebebasan pers.

Bentuk-bentuk perlawanan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi dua jalur utama. Pertama, perlawanan melalui jalur litigasi (hukum), yaitu upaya Tempo menggugat keputusan pembredelan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai strategi *war of position* untuk membuka ruang kritik dalam struktur hukum yang tersedia. Kedua, perlawanan melalui pendirian Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang merepresentasikan perlawanan kolektif di ranah masyarakat sipil untuk membangun solidaritas, independensi jurnalis, serta menantang dominasi negara atas pers.

1.6 Paradigma Penelitian



Keterangan:

—————→ : Garis Hubung

- - - - -→ : Garis Hasil

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Louis Gottschalk (1985), tinjauan pustaka merupakan bagian dari tahap heuristik dalam penelitian sejarah, yaitu kegiatan menelusuri dan menilai tulisan-tulisan terdahulu untuk memahami perkembangan interpretasi suatu peristiwa serta menemukan celah penelitian baru. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 Majalah Tempo

Majalah Tempo didirikan pada Tahun 1971 oleh Goenawan Mohamad dan sejumlah wartawan lainnya sebagai media mingguan berita dan opini yang mengusung jurnalisme independen, kritis, dan berwawasan luas. Tempo dikenal luas karena gaya penulisannya yang naratif, mendalam, dan penuh kritik terhadap praktik-praktik kekuasaan. Dalam studi media dan komunikasi, keberadaan Tempo sering kali dikaji melalui perspektif *watchdog journalism*, yaitu konsep bahwa media bertanggung jawab sebagai pengawas kekuasaan yang berpotensi menyimpang. Menurut McQuail (2010), peran *watchdog* ini menjadi salah satu fungsi utama media dalam sistem demokratis, yaitu memberikan informasi yang akurat, menyuarakan suara publik, serta melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tempo, melalui berbagai liputan mendalam dan kritik tajamnya terhadap penguasa Orde Baru, mencerminkan peran tersebut dengan sangat nyata.

Dalam kajian Hill (1994), Tempo digambarkan sebagai contoh media yang mengupayakan ruang otonom dalam sistem otoriter. Dalam bukunya *The Press in New Order Indonesia*, David T. Hill menjelaskan bahwa walaupun

media massa di Indonesia selama masa Orde Baru diatur secara ketat melalui perizinan, Tempo tetap menunjukkan keberanian editorial dalam membahas isu-isu politik sensitif, seperti militerisme, korupsi pejabat, dan konflik internal elite kekuasaan. Hal ini menjadikan Tempo tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika politik.

Sen dan Hill (2007) dalam buku *Media, Culture and Politics in Indonesia* lebih lanjut menempatkan Tempo sebagai bagian dari media yang memproduksi "*cultural resistance*" yakni resistensi terhadap dominasi ideologis negara melalui produksi simbolik dan representasi naratif yang tidak tunduk pada wacana resmi. Dengan gaya bahasa yang khas, bernuansa sastra, dan mengandung ironi halus, Tempo menggunakan strategi semiotik untuk menyampaikan kritik secara terselubung namun kuat. Hal ini membedakan Tempo dari media lain yang lebih tunduk terhadap tekanan pemerintah.

Dari perspektif jurnalisme, Tempo telah menjadi pionir dalam pengembangan jurnalisme naratif dan investigatif di Indonesia. Jurnalisme investigatif memiliki kecenderungan untuk membongkar fakta tersembunyi dan menantang struktur kekuasaan yang mapan. Ini terlihat dalam sejumlah liputan Tempo tentang kasus korupsi, penyimpangan anggaran negara, hingga penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh elit politik. Praktik ini menunjukkan bahwa Tempo tidak hanya menyampaikan berita, tetapi melakukan proses jurnalistik mendalam yang memiliki nilai transformatif dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat.

2.1.2 Konsep Pembredelan

Menurut Ajidarma (2000), pembredelan adalah "tindakan represif negara terhadap media massa, berupa pencabutan izin terbit, pelarangan peredaran, atau penarikan edisi tertentu dari peredaran karena dianggap membahayakan kepentingan penguasa". Pembredelan merupakan bentuk intervensi terhadap kebebasan pers dan kerap dikaitkan dengan tindakan represif terhadap media yang kritis. Dalam sejarah pers Indonesia, pembredelan menjadi instrumen

politik yang efektif bagi rezim otoriter, khususnya pada masa Orde Baru, untuk mengontrol arus informasi dan membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintah. Tidak hanya sebagai hukuman administratif, pembredelan menjadi simbol represi terhadap kebebasan pers dan ekspresi. Pada praktiknya, rezim Orde Baru melaksanakan pembredelan melalui mekanisme pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. SIUPP menjadi alat kendali utama pemerintah terhadap media cetak, di mana media yang dianggap melanggar “norma etika jurnalistik”, menyebarkan informasi “subversif”, atau membahayakan “keamanan nasional” dapat dibredel sewaktu-waktu tanpa proses pengadilan yang transparan. Krishna Sen dan David T. Hill (2007) mencatat bahwa Orde Baru menginstitutionalisasi kontrol terhadap media melalui sistem yang tampak legal, tetapi secara substansi mengekang kebebasan pers.

Pembredelan juga menimbulkan dampak psikologis dan struktural yang signifikan dalam ekosistem media. Media menjadi enggan menyentuh isu-isu sensitif seperti korupsi pejabat tinggi, pelanggaran HAM, atau konflik militer, sehingga memunculkan iklim swakontrol (*self-censorship*) di kalangan jurnalis dan redaksi. Dengan demikian, pembredelan tidak hanya sekadar pelarangan teknis, tetapi juga strategi politik untuk membentuk kesadaran kolektif bahwa negara berhak secara absolut mendefinisikan “kebenaran informasi”.

Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci, yang merupakan salah satu kontribusi penting dalam tradisi Marxisme Kultural. Gramsci menegaskan bahwa dominasi tidak hanya dijalankan melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui proses persetujuan (*consent*) masyarakat terhadap nilai-nilai dominan yang dibentuk oleh kelas penguasa. Dalam *Selections from the Prison Notebooks* (1971), ia menjelaskan bahwa hegemoni adalah kepemimpinan ideologis yang membuat nilai-nilai tertentu diterima luas sebagai kebenaran umum, sehingga tampak alamiah dan netral. Institusi seperti pendidikan, agama, media massa,

dan keluarga berfungsi sebagai “superstruktur ideologis” yang menyebarkan nilai-nilai tersebut. Ketika media berada di bawah kendali negara, ia bertransformasi menjadi alat legitimasi kekuasaan. Dalam konteks Orde Baru, hegemoni negara diwujudkan melalui kontrol ketat atas media dan produksi informasi, di mana mekanisme SIUPP menjadi sarana efektif untuk menentukan siapa yang boleh menerbitkan media dan kapan hak itu bisa dicabut. Hal ini sejalan dengan konsep hegemoni Gramsci: kekuasaan dapat diterima masyarakat tanpa paksaan fisik karena telah ditanamkan melalui berbagai kanal ideologis.

Gramsci juga menyoroti pentingnya counter hegemony, yakni upaya membangun kesadaran kritis dan wacana tandingan terhadap dominasi nilai-nilai penguasa. Dalam kerangka ini, Majalah Tempo dan para jurnalis independen yang menentang pembungkaman pers Orde Baru dapat dipandang sebagai intelektual organik yaitu kelompok dari masyarakat sipil yang memproduksi ide-ide alternatif demi perubahan sosial. Bentuk-bentuk perlawanan terhadap hegemoni, menurut Gramsci, dapat meliputi:

1. *War of Position*

War of position (perang posisi) merujuk pada bentuk perlawanan yang bersifat jangka panjang, gradual, dan kultural-ideologis. Dalam strategi ini, kelompok subordinat tidak secara langsung menggulingkan kekuasaan negara, melainkan berupaya menggeser dominasi ideologi penguasa dengan membangun pengaruh di ranah masyarakat sipil. Arena perlawanan *war of position* meliputi media, pendidikan, hukum, organisasi sosial, seni, dan diskursus intelektual. Gramsci memandang masyarakat sipil sebagai ruang utama produksi hegemoni, sehingga perlawanan harus dilakukan dengan merebut “posisi-posisi strategis” di dalamnya. Tujuan *war of position* adalah membangun kesadaran kritis, menciptakan kontra-hegemoni, serta memperoleh legitimasi moral dan intelektual sebelum perubahan politik yang lebih besar dapat terjadi. Karena itu, strategi ini sering tampak tidak konfrontatif, namun justru

sangat fundamental dalam melemahkan kekuasaan hegemonik dari dalam.

2. *War of Movement*

War of movement (perang manuver) merupakan bentuk perlawanan yang bersifat langsung, terbuka, dan konfrontatif terhadap kekuasaan negara. Strategi ini identik dengan tindakan revolusioner, mobilisasi massa besar-besaran, atau momen-momen krisis politik ketika struktur kekuasaan lama mengalami delegitimasi. *War of movement* biasanya terjadi dalam situasi di mana hegemoni penguasa telah rapuh, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan cepat melalui aksi kolektif yang masif. Berbeda dengan *war of position* yang menekankan pertarungan ide dan wacana, *war of movement* berfokus pada perebutan kekuasaan secara nyata, baik melalui revolusi, reformasi radikal, maupun penggulingan rezim.

2.1.3 Orde Baru

Orde Baru merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung dari Tahun 1966 hingga 1998. Rezim ini dibentuk setelah kejatuhan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, dan dikukuhkan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Orde Baru merupakan suatu upaya untuk menata ulang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam bidang ideologi, politik, sosial, serta ekonomi yang berlandaskan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, setelah keberhasilan Indonesia menyelamatkan pemerintahan dari peristiwa Gerakan 30 September (G30S) PKI (Prihatanti, 2013). Secara umum, Orde Baru dikenal dengan karakteristik pemerintahannya yang otoriter, sentralistik, dan militeristik, serta sangat menekankan pada stabilitas politik (Cribb & Brown, 1995).

Salah satu ciri utama Orde Baru adalah dominasi militer dalam bidang politik dan sosial. Melalui doktrin Dwifungsi ABRI, pada masa Orde Baru dibawah

kekuasaan Presiden Soeharto, ada sebuah istilah yang lahir dari proses politik dominasi militer dan birokrasi, atau yang disebut sebagai "Jalur ABG". Jalur ABG adalah sebuah istilah yang digunakan oleh kelompok intelektual dalam menyebut unsur atau komponen politik dalam proses dan struktur pemerintahan Indonesia di masa Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, yaitu Militer (ABRI), Birokrasi, dan Golkar (Purba dkk, 2022). Selain itu militer tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang turut mengatur kebijakan sipil. Struktur pemerintahan yang sangat tersentralisasi memberikan kekuasaan besar kepada Presiden, sehingga kontrol terhadap lembaga legislatif, yudikatif, dan media massa menjadi sangat ketat. Kebijakan-kebijakan negara diarahkan untuk mendukung legitimasi kekuasaan Soeharto dan menjamin tidak adanya kritik yang dapat menggoyahkan stabilitas pemerintahan (Aspinall & Fealy, 2010).

Dalam aspek komunikasi dan kebebasan berekspresi, rezim Orde Baru menciptakan sistem penyensoran yang sistematis dan menyeluruh terhadap media massa. Negara menerapkan kebijakan regulasi ketat melalui mekanisme Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Media yang dianggap menyebarkan informasi yang bertentangan dengan kepentingan negara atau mengandung unsur kritik terhadap pemerintah dapat langsung diberedel tanpa proses hukum yang transparan. David T. Hill (1994) menyatakan bahwa sistem SIUPP menjadi alat utama rezim dalam menjaga kontrol terhadap informasi publik dan mencegah munculnya wacana tandingan yang dapat mengancam kekuasaan negara. Selain melalui jalur formal, rezim Orde Baru juga menggunakan pendekatan informal dalam mengendalikan media. Praktik seperti intimidasi terhadap jurnalis, tekanan ekonomi terhadap perusahaan media, pengawasan militer terhadap redaksi, serta budaya *self-censorship* menjadi bagian dari strategi kontrol yang kompleks dan efektif.

2.2 Peneliti Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan kajian yang hendak dibahas, penelitian dengan topik sejenis yang relevan pada penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Skripsi Nugroho Tahun 2023 berjudul *“Pembredelan Majalah Tempo Tahun 1994 sebagai Awal Kebangkitan Pers di Indonesia”* di Universitas Lampung. Fokus utama penelitian Nugroho adalah pada dampak jangka panjang dari pembredelan Tempo, terutama dalam konteks perubahan paradigma kebebasan pers di Indonesia. Ia berpendapat bahwa peristiwa pembredelan tidak hanya merupakan bentuk represi terhadap kebebasan berpendapat, tetapi justru menjadi pemantik bagi lahirnya kesadaran kolektif akan pentingnya kemerdekaan pers. Nugroho melihat bahwa pembentukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan munculnya berbagai media alternatif pasca-1994 adalah indikasi nyata dari kebangkitan kesadaran profesional dan etis di kalangan jurnalis Indonesia. Meskipun memiliki kedekatan topik, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus kajian. Skripsi Nugroho menempatkan pembredelan Tempo sebagai momen transformatif yang memicu kebangkitan pers nasional, sehingga penekanannya berada pada dampak peristiwa tersebut terhadap perkembangan institusi pers di Indonesia secara luas. Sebaliknya, penelitian ini berfokus lebih spesifik pada respons aktif Jurnalis Majalah Tempo dalam melawan pembredelan negara, dengan menelusuri strategi serta bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan sepanjang periode 1994–1998.
2. Skripsi Abdul Tahun 2023 berjudul *“Dampak Pembredelan Tempo, Editor, dan Detik pada 21 Juni 1994”* di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penelitiannya, Abdul berfokus pada analisis dampak kebijakan pembredelan terhadap tiga media yang diberedel secara bersamaan oleh Menteri Penerangan Harmoko, yaitu Tempo, Editor, dan Detik. Penelitian tersebut menitikberatkan pada respons masyarakat, dinamika ruang publik, serta implikasi sosial-politik dari represi pemerintah terhadap kebebasan pers. Sementara itu, skripsi ini memandang

pembredelan tidak sekadar sebagai tindakan represif, melainkan menempatkan *Majalah Tempo* sebagai aktor resistensi yang secara aktif melawan dominasi Orde Baru melalui perjuangannya sepanjang 1994–1998. Penelitian ini menekankan strategi perlawanan Jurnalis Tempo pasca-pembredelan, seperti pendirian AJI, gugatan hukum terhadap pemerintah, dan terbit kembali pada 1998 sebagai simbol kebangkitan kebebasan pers. Dengan kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci dan klasifikasi bentuk perlawanan, kajian ini menghadirkan perspektif teoritis yang lebih tajam dalam melihat relasi negara dan media. Berbeda dengan penelitian Mohamad Aqbil yang berfokus pada dampak pembredelan, penelitian ini menyoroti resistensi aktif *Majalah Tempo* sebagai bentuk perjuangan melawan represi negara.

3. Skripsi Rosyada Tahun 2022 berjudul “*Pembredelan Majalah Tempo pada Masa Orde Baru Tahun 1994*” di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa membahas secara khusus peristiwa pembredelan *Majalah Tempo* oleh pemerintah Orde Baru pada 21 Juni 1994. Melalui metode sejarah, Rosyada menjelaskan latar belakang, proses, dan dampak pembredelan yang dipicu oleh pemberitaan Tempo terkait kasus pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur yang melibatkan B. J. Habibie dan L. B. Moerdani. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun rezim Soeharto mengusung keterbukaan, pers tetap berada di bawah kontrol ketat negara. Pembredelan *Tempo* menjadi simbol terbatasnya kebebasan pers dan memicu lahirnya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai bentuk solidaritas jurnalis. Namun, kajian Rosyada hanya berfokus pada peristiwa 1994 dan bersifat deskriptif-historis tanpa membahas perlawanan pasca-pembredelan. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini berjudul “*Bentuk-Bentuk Perlawanan Jurnalis Tempo terhadap Pembredelan pada Era Orde Baru (1994–1998)*” yang menyoroti strategi dan upaya perlawanan Tempo selama masa pembredelan hingga terbit kembali pada 1998. Dengan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci, penelitian ini menganalisis bagaimana Tempo menciptakan *counter-hegemony* terhadap dominasi ideologi negara melalui jalur litigasi, pendirian AJI, dan penerbitan kembali majalahnya.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas, maka ruang lingkup penelitian yang akan peneliti kembangkan, mencakup:

1. Objek Penelitian : Perlawanan Pembredelan Tempo
2. Subjek Penelitian : Majalah Tempo
3. Tempat Peneltian : a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
b. Kantor Redaksi Tempo
4. Waktu Penelitian : 2025
5. Bidang Ilmu : Sejarah

Dalam dunia akademik, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, membuktikan, atau mengembangkan suatu pengetahuan secara sistematis dan metodologis. Penelitian berasal dari kata *research*, yang menurut Kerlinger (2006), adalah suatu proses sistematis untuk menemukan jawaban dari suatu pertanyaan melalui pengumpulan dan interpretasi data. Penelitian bukanlah sekadar pencarian informasi biasa, melainkan kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah agar hasilnya dapat diandalkan dan diakui dalam dunia keilmuan.

Penelitian adalah usaha untuk mengungkap kebenaran secara sistematis dan logis, melalui kegiatan pengamatan, eksperimen, serta analisis yang dilakukan terhadap objek yang dikaji. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membuktikan suatu hipotesis, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas cakrawala pengetahuan, menjawab permasalahan konkret dalam masyarakat, dan mendukung pembangunan berbasis data. Oleh sebab itu, kegiatan penelitian harus

dilakukan dengan kesadaran metodologis dan etis yang tinggi. Sementara itu, kata "metode" berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan menuju suatu tujuan. Dalam konteks akademik, metode adalah cara-cara atau prosedur sistematis yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Metode dan penelitian merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Penelitian membutuhkan metode sebagai perangkat teknis dan prosedural untuk menjamin bahwa proses yang dilalui bersifat sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, metode baru memiliki arti fungsional jika diterapkan dalam konteks penelitian yang konkret. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang metode dan penelitian akan membantu peneliti menyusun desain penelitian yang relevan, memilih teknik pengumpulan data yang sesuai, serta melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian secara tepat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Historis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri dan menjelaskan secara kronologis peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan pembredelan Tempo Tahun 1994 hingga kembalinya majalah ini pada era reformasi. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman konteks sejarah sebagai bagian penting dalam analisis terhadap dinamika kekuasaan dan media. Menurut Kuntowijoyo (2003), pendekatan historis bukan sekadar merekam kejadian masa lalu, tetapi juga memberi makna terhadap peristiwa tersebut melalui interpretasi kritis terhadap sumber-sumber yang ada.

Peneliti menggunakan metode historis karena data yang diperoleh akan diuji dan dianalisis secara kritis melalui rekaman serta peninggalan masa lampau, kemudian dituliskan berdasarkan fakta-fakta historis yang telah diperoleh. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumargono (2021) yang menyatakan bahwa metode historis merupakan prosedur pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan menafsirkan sumber-sumber sejarah secara sistematis untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara objektif dan ilmiah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

3.1.1 *Heuristik*

Heuristik merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menggali dan memahami fenomena secara mendalam melalui pengalaman pribadi dan refleksi peneliti itu sendiri. Heuristik berasal dari bahasa Yunani Kuno *heuriskein*, yang berarti “mencari tahu” atau “menemukan”. Dalam konteks penelitian, metode heuristik menekankan pada proses penemuan makna melalui keterlibatan intensif peneliti dengan data dan subjek penelitian, serta eksplorasi reflektif terhadap pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian, metode ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada pemahaman mendalam yang diperoleh dari pengalaman langsung peneliti. Dalam proses penyusunan penelitian ini, saya telah berhasil mengumpulkan sejumlah sumber yang terdiri dari arsip primer dan sekunder sebagai bahan rujukan utama. Temuan ini menjadi landasan penting dalam mendukung analisis terhadap dinamika perlawanan Majalah Tempo terhadap pembredelan di era Orde Baru, khususnya dalam kurun waktu 1994 hingga 1998. Sumber-sumber sekunder yang telah saya temukan mencakup tiga buku utama, yaitu:

1. Hill, David T. (1994). *The Press in New Order Indonesia*. Perth: University of Western Australia Press. Buku ini memberikan analisis mendalam mengenai struktur, fungsi, dan kontrol pers di bawah rezim Orde Baru. Hill menjelaskan bagaimana pemerintah membangun sistem kontrol media yang ketat, serta bagaimana media-media seperti Tempo mencoba untuk bertahan dan tetap kritis. Buku ini menjadi penting sebagai latar kontekstual dan historis bagi penelitian ini.
2. Gramsci, Antonio. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers. Kumpulan tulisan Antonio Gramsci ini menjadi dasar teori dalam penelitian ini, khususnya dalam melihat relasi antara negara, hegemoni, dan perlawanan. Konsep seperti “hegemoni kultural” dan “intelektual organik” digunakan untuk menganalisis posisi Tempo sebagai bagian dari media yang menantang dominasi ideologis negara Orde Baru.

3. Steele, J. (2014). *Wars within: The story of Tempo, an independent magazine in Soeharto's Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Tempo Publishing. Buku ini merupakan kajian mendalam tentang perjalanan Majalah Tempo sebagai media independen di tengah hegemoni politik Orde Baru yang represif. Steele tidak hanya merekam sejarah pendirian dan pembredelan Tempo, tetapi juga menguraikan bagaimana para jurnalis Tempo seperti Goenawan Mohamad, Ahmad Taufik, dan Andreas Harsono mengartikulasikan perlawanan melalui strategi jurnalisme naratif, pembentukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), hingga perjuangan hukum melawan pembredelan.

Selain itu, saya juga telah memperoleh sejumlah arsip primer yang relevan dengan fokus penelitian. Di antaranya adalah:

1. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) terhadap Majalah Tempo, Editor, dan Detik. Pernyataan resmi yang disampaikan oleh Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika (PPG) Departemen Penerangan, Drs. Subrata, pada tanggal 21 Juni 1994. Subrata menyatakan bahwa pencabutan SIUPP dilakukan karena ketiga media tersebut dinilai telah melanggar ketentuan administratif dan dianggap membahayakan stabilitas nasional. Pernyataan ini terdokumentasi dalam arsip dan dokumen pemerintah sebagai langkah formal rezim Orde Baru dalam membatasi kebebasan pers, serta menjadi bukti otentik dari intervensi negara terhadap media independen pada masa itu.
2. Penulis memperoleh arsip pemberitaan dari Harian Kompas berjudul "Pemerintah Batalkan SIUPP 'Tempo', 'Editor', dan 'Detik'" yang terbit pada Juni 1994. Arsip ini memuat laporan mengenai keputusan Departemen Penerangan di bawah kepemimpinan Menteri Harmoko untuk mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tiga media besar, yakni Majalah Tempo, Tabloid Detik, dan Majalah Editor. Dalam pemberitaan tersebut, Kompas menuliskan bahwa keputusan pembatalan izin terbit itu dilakukan dengan alasan ketiga media dianggap telah "menyimpang dari ketentuan pers pembangunan" dan

“dapat mengganggu stabilitas nasional”. Isi arsip ini menjadi sumber penting bagi penelitian karena menunjukkan secara langsung bagaimana peristiwa pembatalan SIUPP dilaporkan oleh media besar yang masih beroperasi di bawah tekanan pemerintah Orde Baru. Selain itu, pemberitaan tersebut juga mencerminkan batas-batas kebebasan jurnalistik saat itu, di mana Kompas berupaya menjaga keseimbangan antara menyampaikan fakta dan menghindari konfrontasi langsung dengan kekuasaan.

3. Penulis memperoleh Majalah Tempo edisi berjudul “Habibie dan Kapal Itu” yang dimuat di Tempo.co. Edisi ini merupakan laporan utama yang menyoroti kebijakan Menteri Riset dan Teknologi B. J. Habibie terkait pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur dengan nilai mencapai USD 319 juta. Majalah tersebut mengungkap berbagai kegagalan dalam transaksi tersebut, seperti kondisi kapal yang tidak layak pakai, pembengkakan biaya, serta kurangnya transparansi dalam proses pengadaan. Pemberitaan ini dianggap menyinggung dan merugikan citra pemerintah, terutama karena melibatkan tokoh penting yang dekat dengan Presiden Soeharto. Temuan ini menjadi sangat penting karena laporan “Habibie dan Kapal Itu” inilah yang kemudian memicu pemberedelan Majalah Tempo pada 21 Juni 1994 oleh Menteri Penerangan Harmoko melalui Surat Keputusan No. 123/KEP/MENPEN/1994. Dengan demikian, sumber ini berfungsi sebagai bukti primer atas peristiwa yang menjadi titik awal represi terhadap kebebasan pers di era Orde Baru.
4. Penulis tidak hanya mengumpulkan sumber tertulis, tetapi juga melakukan penelusuran terhadap sumber lisan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan autentik mengenai peristiwa pembredelan serta bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Majalah Tempo. Salah satu temuan penting dalam tahap ini adalah diperolehnya narasumber utama, yaitu Goenawan Mohamad dan Andreas Harsono, dua tokoh sentral dalam sejarah perlawanan jurnalis Indonesia pada masa Orde Baru. Goenawan Mohamad, sebagai pendiri sekaligus

Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, merupakan saksi langsung sekaligus pelaku utama dalam dinamika pembredelan Tahun 1994. Melalui wawancara dan penelusuran pernyataannya, penulis memperoleh informasi berharga mengenai keputusan editorial Tempo, tekanan politik yang dihadapi redaksi, hingga langkah-langkah perlawanan intelektual yang dilakukan setelah izin terbit dicabut pemerintah. Kesaksian Goenawan juga memberikan perspektif moral dan filosofis tentang makna kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalisme di bawah rezim represif. Sementara itu, Andreas Harsono merupakan salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan wartawan yang turut aktif dalam gerakan perlawanan terhadap pembredelan media pada masa itu. Melalui kesaksian Andreas, penulis mendapatkan pemahaman yang lebih konkret tentang strategi solidaritas antarjurnalis, proses pembentukan AJI sebagai organisasi tandingan terhadap PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), serta berbagai bentuk advokasi dan jaringan dukungan nasional maupun internasional yang dilakukan untuk membela kebebasan pers.

3.1.2 Kritik Sumber

Setelah seluruh sumber sejarah berhasil dikumpulkan, penulis kemudian memasuki tahap kritik sumber, yaitu proses penting untuk menilai keaslian (autentisitas) dan keandalan (kredibilitas) dari setiap sumber yang telah diperoleh. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya sumber-sumber yang sahih dan relevan yang digunakan sebagai dasar penulisan penelitian. Kritik sumber dilakukan secara eksternal, guna memverifikasi keaslian sumber, serta internal, untuk menilai isi dan kebenaran informasinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Sjamsuddin (2007), kritik sumber merupakan bagian penting dalam metode sejarah karena berfungsi untuk menelusuri kebenaran dari setiap data yang ditemukan. Melalui tahap kritik sumber ini, penulis berupaya menjaga objektivitas dan ketepatan data, sehingga seluruh temuan dalam penelitian ini memiliki dasar historis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

a. Sumber Sekunder

Sumber pertama, yaitu buku David T. Hill diterbitkan oleh *University of Western Australia Press*, sebuah penerbit akademik yang bereputasi internasional, sehingga dari segi eksternal dapat dipastikan otentik dan sah. Tahun terbitnya, yakni 1994, membuat buku ini hadir di tengah-tengah situasi ketika rezim Orde Baru masih berkuasa, sehingga dapat dipandang sebagai sumber kontemporer terhadap realitas pers saat itu. Dari sisi internal, Hill dikenal sebagai pakar studi media dan politik Indonesia. Analisisnya mengenai kontrol negara atas pers, mekanisme sensor, dan kasus pembredelan Tempo disusun secara sistematis, berbasis penelitian lapangan dan wawancara. Meski sebagai peneliti asing ia mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami nuansa kultural, karyanya tetap dianggap kredibel dan relevan untuk memberikan kerangka kontekstual bagi penelitian ini.

Sumber kedua, yaitu buku Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, diterbitkan oleh International Publishers pada 1971 dan berisi kompilasi pemikiran Gramsci yang ditulis ketika ia dipenjara oleh rezim fasis Italia. Secara eksternal, karya ini telah diterjemahkan dan diedit secara akademis sehingga keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi internal, buku ini tidak secara langsung membahas konteks Indonesia, namun pemikiran Gramsci tentang hegemoni, dominasi, serta resistensi sangat relevan sebagai landasan teoretis untuk menganalisis bentuk-bentuk perlawanan pers, khususnya Tempo, terhadap represi Orde Baru. Dengan demikian, karya ini berfungsi sebagai sumber sekunder konseptual yang memberikan perspektif teori dalam penelitian.

Sumber ketiga yaitu, buku Janet Steele *Wars within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia* diterbitkan oleh Tempo Publishing. Secara eksternal, penerbitan oleh lembaga yang memiliki hubungan langsung dengan Tempo memastikan keaslian dan otoritas sumber tersebut. Dari segi internal, Steele adalah akademisi dan peneliti yang secara khusus meneliti sejarah serta dinamika Tempo sebagai majalah

independen. Buku ini menyajikan narasi detail mengenai perjalanan Tempo, termasuk konflik dengan rezim Orde Baru dan pengalaman menghadapi pembredelan. Kekuatan buku ini terletak pada dokumentasi yang kaya, wawancara langsung, serta akses terhadap arsip internal Tempo. Walau penerbitannya berhubungan erat dengan pihak yang diteliti sehingga mungkin menimbulkan bias, secara keseluruhan buku ini sangat kredibel dan penting karena menghadirkan perspektif mendalam dari dalam institusi media itu sendiri.

b. Sumber Primer

Sumber pertama, yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) terhadap Majalah Tempo, Editor, dan Detik yang dicabut pemerintah pada 21 Juni 1994 melalui keputusan resmi Departemen Penerangan. Secara eksternal, dokumen ini autentik karena merupakan arsip resmi negara yang dapat diverifikasi melalui lembaga kearsipan dan pemberitaan sezaman. Secara internal, isi keputusan ini menunjukkan praktik kontrol negara terhadap media dengan dalih menjaga “stabilitas nasional” dan “ketertiban umum”. Pernyataan ini mencerminkan cara berpikir rezim Orde Baru yang menempatkan kebebasan pers di bawah kendali politik negara. Walaupun dokumen ini sarat dengan bias ideologis karena bersumber dari pihak pemerintah, namun tetap memiliki nilai penting sebagai bukti otentik tindakan represif negara terhadap media.

Sumber kedua, yaitu Harian Kompas edisi Juni 1994 berjudul “Pemerintah Batalkan SIUPP ‘Tempo’, ‘Editor’, dan ‘Detik’”. Secara eksternal, sumber ini dapat dipercaya karena berasal dari salah satu media nasional besar yang masih bertahan di bawah tekanan politik Orde Baru. Secara internal, pemberitaan Kompas bersifat informatif dan faktual, namun menunjukkan kecenderungan berhati-hati dalam memilih diksi dan narasi, akibat adanya ancaman pembredelan yang juga menghantui media lain. Meskipun demikian, sumber ini tetap bernilai historis karena memperlihatkan bagaimana media arus utama pada masa itu berupaya mempertahankan profesionalitas di tengah keterbatasan kebebasan berekspresi.

Sumber ketiga, yaitu Majalah Tempo edisi “Habibie dan Kapal Itu” yang dimuat di Tempo.co. Secara eksternal, sumber ini dapat diverifikasi melalui arsip digital resmi Tempo, menjadikannya sumber yang sah dan orisinal. Secara internal, edisi ini menyoroti kebijakan B. J. Habibie terkait pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur yang dianggap sarat kepentingan politik dan ekonomi. Laporan ini menjadi pemicu utama pembredelan, karena dianggap mengganggu citra pemerintah dan menyinggung hubungan antarpejabat tinggi negara. Artikel ini memperlihatkan karakter jurnalisme investigatif Tempo yang berani dan independen, meskipun mengandung bias redaksional berupa penekanan pada aspek kritik terhadap pemerintah. Sumber ini penting karena menggambarkan esensi keberanian pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah sistem politik yang otoriter.

Sumber keempat, yaitu narasumber utama Goenawan Mohamad dan Andreas Harsono, dua tokoh penting yang terlibat langsung dalam sejarah perlawanan terhadap pembredelan pers. Secara eksternal, keduanya merupakan figur publik dengan rekam jejak yang kredibel sebagai jurnalis dan aktivis kebebasan pers. Secara internal, kesaksian mereka memberikan pandangan reflektif dan kontekstual tentang kondisi internal Tempo, dinamika pembredelan, serta proses terbentuknya Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Walau terdapat unsur subjektivitas karena keduanya merupakan pelaku sejarah, namun kesaksian ini justru memperkaya pemahaman peneliti tentang motivasi moral, profesional, dan politik di balik perlawanan terhadap kekuasaan.

3.1.3 Interpretasi

Menurut Kuntowijoyo dalam bukunya “Pengantar Ilmu Sejarah” (2018), interpretasi merupakan tahap penafsiran terhadap data yang telah diverifikasi atau diuji kebenarannya, untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi dan apa maknanya dalam konteks waktu dan ruang tertentu. Interpretasi merupakan tahapan yang harus dilalui oleh peneliti sebelum menuangkan data dan fakta yang diperoleh menjadi sebuah bentuk tulisan. Dalam tahap ini

peneliti melakukan penafsiran terhadap fakta yang sudah ada melalui sebuah tahap kritikan.

a. Sumber Sekunder

Sumber pertama, yaitu buku David T. Hill *The Press in New Order Indonesia* (1994) diinterpretasikan sebagai sumber yang memberikan kerangka kontekstual mengenai sistem politik pers pada masa Orde Baru. Hill menekankan bagaimana rezim membangun struktur kontrol terhadap media melalui regulasi, sensor, serta mekanisme pembredelan. Melalui penafsiran karya ini, penelitian memperoleh pemahaman tentang latar belakang struktural yang membentuk kondisi represi terhadap Tempo dan media lainnya, sehingga dapat dipetakan pola hegemoni negara terhadap pers.

Sumber kedua, yaitu buku Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks* (1971) diinterpretasikan sebagai landasan teoretis untuk memahami dinamika kekuasaan dan perlawanan. Konsep-konsep hegemoni, dominasi, dan counter-hegemony dari Gramsci digunakan untuk menafsirkan strategi yang ditempuh Tempo dalam menghadapi pembredelan. Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan peristiwa historis, tetapi juga menafsirkan makna di balik tindakan perlawanan Tempo sebagai upaya intelektual kolektif melawan hegemoni negara.

Sumber ketiga, yaitu buku Janet Steele, *Wars within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia* (2014) diinterpretasikan sebagai sumber naratif yang mendetail mengenai pengalaman internal Tempo. Steele menghadirkan kisah perjuangan redaksi Tempo dalam menghadapi tekanan politik, konflik dengan pemerintah, serta strategi bertahan setelah pembredelan. Dari interpretasi sumber ini, penelitian memperoleh pemahaman konkret tentang bagaimana perlawanan dilakukan dalam praktik: melalui solidaritas internal, dukungan jaringan jurnalis, serta upaya kembali terbit setelah represi.

b. Sumber Primer

Sumber pertama, yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) terhadap Tempo, Editor, dan Detik, diinterpretasikan sebagai simbol nyata dari dominasi negara atas ruang kebebasan media. Melalui surat keputusan ini, pemerintah Orde Baru menggunakan instrumen hukum untuk menegakkan kontrol politik terhadap pers. Interpretasi terhadap dokumen ini menunjukkan bahwa pencabutan SIUPP bukan sekadar tindakan administratif, melainkan strategi sistematis untuk menekan opini publik dan menegaskan hegemoni negara dalam menentukan batas wacana yang boleh dan tidak boleh disebarluaskan. Dari perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci, tindakan ini dapat dipahami sebagai bentuk coercive hegemony, di mana negara menggunakan kekuasaan koersif untuk mempertahankan legitimasi ideologinya di hadapan masyarakat.

Sumber kedua, yaitu Harian Kompas edisi “Pemerintah Batalkan SIUPP ‘Tempo’, ‘Editor’, dan ‘Detik’”, memberikan gambaran tentang dinamika media arus utama yang beroperasi dalam tekanan politik. Interpretasi terhadap sumber ini memperlihatkan bahwa Kompas berupaya menjaga keseimbangan antara menyampaikan fakta dan menghindari konfrontasi langsung dengan pemerintah. Sikap hati-hati dalam pemberitaan tersebut mencerminkan kondisi “keterbukaan semu” yang terjadi pada awal 1990-an, ketika pemerintah Soeharto tampak memberikan ruang ekspresi, tetapi tetap mempertahankan kendali penuh terhadap isi dan arah pemberitaan. Dari sini, dapat diinterpretasikan bahwa media pada masa itu tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga menjadi alat negosiasi antara idealisme jurnalisme dan tuntutan bertahan hidup di bawah kekuasaan yang represif.

Sumber ketiga, yaitu Majalah Tempo edisi “Habibie dan Kapal Itu” yang dimuat di Tempo.co, diinterpretasikan sebagai wujud nyata dari semangat jurnalisme kritis yang menolak tunduk pada kekuasaan. Laporan ini menunjukkan keberanian redaksi Tempo dalam mengungkap persoalan publik yang melibatkan pejabat tinggi negara, yaitu B. J. Habibie dalam

pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur. Interpretasi terhadap sumber ini menegaskan bahwa Tempo berperan sebagai kekuatan moral yang mencoba mengimbangi dominasi ideologi negara melalui penyebaran informasi. Dengan demikian, edisi ini tidak hanya menjadi pemicu pembredelan, tetapi juga titik awal lahirnya kesadaran kolektif di kalangan jurnalis untuk memperjuangkan kemerdekaan pers.

Sumber keempat, yaitu narasumber utama Goenawan Mohamad dan Andreas Harsono, yang diinterpretasikan sebagai representasi langsung dari perlawanan terhadap represi negara. Goenawan Mohamad, sebagai pendiri dan pemimpin redaksi Tempo, merepresentasikan suara moral jurnalis yang berpegang pada nilai integritas, independensi, dan tanggung jawab sosial media. Sementara Andreas Harsono, sebagai salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI), melambangkan bentuk perlawanan kolektif yang terorganisir untuk menegakkan kebebasan pers. Dari interpretasi terhadap kesaksian kedua tokoh ini, dapat dipahami bahwa perlawanan jurnalis pada masa Orde Baru bukan hanya reaksi spontan terhadap pembredelan, melainkan bagian dari gerakan kesadaran sosial yang menolak hegemoni kekuasaan dan menuntut lahirnya sistem pers yang bebas dan bertanggung jawab.

3.1.4 Historiografi

Historiografi adalah tahapan terakhir dalam tahapan penelitian sejarah, historiografi maksudnya adalah penulisan sejarah. Menurut Helius Sjamsudin (2007) menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan ini suatu cara untuk yang utama dalam memahami sejarah. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh. Menurut Kuntowijoyo (2018), historiografi adalah “rekonstruksi masa lampau berdasarkan data sejarah yang disusun secara ilmiah, yang bukan

hanya bersifat naratif tetapi juga analitis.” Dengan kata lain, historiografi berfungsi untuk menafsirkan dan menjelaskan peristiwa sejarah, bukan sekadar menceritakan ulang apa yang terjadi. Dalam konteks skripsi berjudul "Bentuk-Bentuk Perlawanan Jurnalis Tempo Terhadap Pembredelan Pada Era Orde Baru (1994–1998)," historiografi berperan penting dalam menelusuri bagaimana perjuangan Jurnalis Tempo melawan represi negara direkonstruksi melalui sumber-sumber sejarah seperti arsip pers, wawancara, dokumen hukum, dan tulisan jurnalis.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya (Subagyo, 2006).

Teknik pengumpulan data merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah penelitian, karena dalam melakukan pengumpulan data peneliti memerlukan adanya cara yang digunakan agar sumber data bisa didapat untuk dilakukannya penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

3.2.1 Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah salah satu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi melalui sumber-sumber tertulis. Teknik ini melibatkan kajian terhadap literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, skripsi, dan sumber digital lainnya. Dengan kata lain, teknik kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teori, memperkuat argumen, serta membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Zed (2004) dalam bukunya “*Literature Review dan Penulisan Karya Ilmiah*”, teknik kepustakaan merupakan cara yang sistematis untuk menemukan, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber tertulis sebagai dasar dalam merumuskan

kerangka berpikir penelitian. Dengan demikian, teknik kepastakaan bukan sekadar membaca referensi, melainkan juga menyusunnya secara kritis untuk membangun argumentasi dan landasan teori yang kuat. Dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan jurnal yang saling berkaitan satu sama lain. Teknik kepastakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis sumber tulisan yang berhubungan dengan kajian “Bentuk-Bentuk Perlawanan Jurnalis Tempo Terhadap Pembredelan Pada Era Orde Baru (1994-1998)”.

3.2.2 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian historis untuk memperoleh data dari sumber-sumber tertulis, arsip, maupun dokumen yang memiliki kaitan langsung dengan peristiwa masa lalu. Melalui teknik ini, peneliti menelusuri berbagai dokumen yang dapat memberikan informasi faktual mengenai suatu kejadian, tokoh, atau fenomena historis. Menurut Louis Gottschalk (1985), dokumentasi merupakan langkah penting dalam penelitian sejarah karena dokumen tertulis adalah jejak yang paling nyata dari aktivitas manusia di masa lampau. Melalui dokumen, sejarawan dapat merekonstruksi kembali peristiwa masa lalu secara ilmiah dengan menelusuri sumber-sumber primer maupun sekunder. Sementara itu, Abdurahman (2007) menjelaskan bahwa teknik dokumentasi adalah cara memperoleh data sejarah melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, surat kabar, laporan resmi, peraturan pemerintah, dan catatan lembaga, yang dapat digunakan untuk menelusuri fakta-fakta historis.

Dalam konteks penelitian ini, teknik dokumentasi menjadi sangat relevan dengan skripsi berjudul “Bentuk-Bentuk Perlawanan Jurnalis Tempo Terhadap Pembredelan Pada Era Orde Baru (1994-1998)” berupaya mengungkap bentuk-bentuk perlawanan media terhadap represi politik dan sensor pers pada masa pemerintahan Orde Baru. Untuk memahami dinamika tersebut, peneliti menelusuri berbagai dokumen dan sumber tertulis seperti arsip 1994–1998, dokumen kebijakan pemerintah tentang pembredelan dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), serta buku, dan laporan lembaga

pers yang membahas kebebasan pers pada periode tersebut. Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan data faktual dan kronologis mengenai konteks sosial-politik pembredelan Tempo, respon dan strategi perlawanan yang dilakukan oleh jurnalis Tempo, serta dampaknya terhadap perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan kritik sumber baik dari segi keaslian maupun kredibilitas sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan kaidah penelitian sejarah.

3.2.3 Teknik Wawancara

Teknik wawancara digunakan sebagai bagian dari metode historis, khususnya dalam bentuk sejarah lisan (*oral history*) untuk memperoleh kesaksian langsung dari tokoh-tokoh yang mengalami atau terlibat dalam peristiwa pembredelan. Wawancara dilakukan terhadap jurnalis Majalah Tempo dan tokoh dari Aliansi Jurnalis Independen, yaitu:

1. Goenawan Mohamad

Goenawan Mohamad adalah seorang jurnalis, penyair, dan intelektual publik terkemuka Indonesia yang dikenal luas sebagai pendiri Majalah Tempo pada Tahun 1971. Ia menjadi pemimpin redaksi pertama dan merupakan figur sentral dalam membentuk identitas Tempo sebagai media yang kritis, independen, dan berpegang pada prinsip jurnalisme investigatif. Di tengah tekanan rezim Orde Baru, Goenawan memainkan peran penting dalam mempertahankan integritas redaksional Tempo. Ketika majalah tersebut dibredel pada 21 Juni 1994, ia menjadi simbol perlawanan terhadap pembungkaman pers. Ia juga menjadi salah satu inisiator gugatan hukum terhadap Menteri Penerangan, serta aktif dalam mendukung pembentukan ruang-ruang baru bagi jurnalisme independen di Indonesia.

2. Andreas Harsono

Andreas Harsono adalah jurnalis senior Indonesia dan salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada Tahun 1994. Ia dikenal karena keberaniannya melawan sistem pers yang dikendalikan oleh negara pada

masa Orde Baru, serta perannya dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi. Sebagai tokoh muda pada saat pembredelan Tempo, Editor, dan Detik, Andreas terlibat aktif dalam merumuskan strategi perlawanan di luar struktur pers resmi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang saat itu dianggap terlalu dekat dengan pemerintah.

Teknik ini berguna untuk merekonstruksi dimensi-dimensi sejarah yang tidak terekam dalam arsip tertulis, seperti dinamika internal redaksi, strategi perlawanan yang tidak terpublikasi, serta refleksi personal terhadap peristiwa tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Paul Thompson (2000) dalam *The Voice of the Past: Oral History*, wawancara memungkinkan sejarah ditulis dari perspektif pelaku langsung dan membuka ruang bagi ingatan dan pengalaman subjektif sebagai bagian dari konstruksi sejarah. Oleh karena itu, wawancara dalam konteks metode historis tidak hanya menjadi pelengkap arsip tertulis, tetapi juga menjadi sumber primer yang otentik untuk memahami bagaimana Tempo melawan pembungkaman di tengah tekanan rezim Orde Baru.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data historis. Menurut Helius Syamsuddin (2007), analisis historis merupakan teknik yang bertumpu pada penggunaan kritik sumber sebagai metode utama untuk menilai keandalan, keaslian, dan kredibilitas sumber sejarah. Analisis ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data masa lalu, tetapi juga melibatkan proses verifikasi, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai bukti historis guna menghasilkan pemahaman yang mendalam dan objektif tentang suatu peristiwa. Dengan demikian, teknik ini memastikan bahwa data yang diolah memiliki validitas akademik serta mampu menggambarkan realitas historis secara sistematis.

Dalam penelitian ini, analisis historis digunakan untuk menelaah secara kritis perjalanan Majalah Tempo dalam melawan pembredelan oleh rezim Orde Baru pada Tahun 1994–1998. Proses analisis dilakukan dengan menafsirkan data dari

sumber-sumber primer, seperti arsip majalah, pernyataan tokoh jurnalis Tempo, dokumen resmi, serta catatan sejarah lainnya. Seluruh data dikaji dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya pada masa itu, sehingga hasil interpretasi tidak hanya menampilkan fakta kronologis, tetapi juga memperlihatkan dinamika kekuasaan dan perlawanan di baliknya.

Menurut Gottschalk (1985) dalam *Understanding History*, analisis historis menuntut adanya pendekatan ilmiah yang sistematis dan kritis. Seorang peneliti sejarah tidak cukup hanya berhenti pada tahap pengumpulan fakta, melainkan juga harus mampu menyusun hubungan logis antarperistiwa secara kronologis untuk menyingkap makna, pola, serta keterkaitan yang tersembunyi di balik data tersebut. Fakta-fakta sejarah yang telah dikumpulkan perlu diolah melalui proses analisis mendalam agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Gottschalk menegaskan bahwa seorang peneliti sejarah dituntut untuk menjaga objektivitas dan integritas ilmiah dalam setiap tahap penelitian. Objektivitas menjadi prinsip utama karena sejarah tidak boleh dipandang semata dari sudut pandang pribadi, ideologi, atau kepentingan tertentu.

Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu pengelompokan sumber, kritik eksternal dan internal, interpretasi, serta rekonstruksi sejarah. Kritik eksternal digunakan untuk menilai otentisitas sumber, sementara kritik internal menilai isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dilakukan interpretasi dengan mengaitkan hasil temuan pada teori yang relevan, seperti teori hegemoni Antonio Gramsci yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Tahap terakhir adalah rekonstruksi sejarah, di mana peneliti menyusun kembali peristiwa berdasarkan hasil interpretasi yang telah dilakukan untuk menghadirkan gambaran utuh mengenai bentuk-bentuk perlawanan Jurnalis Tempo terhadap pembredelan pada era Orde Baru. Melalui teknik analisis historis, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dinamika perjuangan Tempo secara lebih mendalam, tidak hanya sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan hegemonik di Indonesia.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Gambaran Umum Majalah Tempo

Majalah Tempo merupakan salah satu media berita paling berpengaruh dalam sejarah jurnalisme Indonesia. Majalah ini pertama kali terbit pada 6 Maret 1971, diprakarsai oleh sejumlah wartawan muda idealis seperti Goenawan Mohamad, Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usamah, dan Christianto Wibisono. Pendirian Tempo mendapat dukungan finansial dari pengusaha Ciputra melalui Yayasan Jaya Raya, yang kemudian mendirikan PT Grafiti Pers sebagai badan hukum penerbit pada Tahun 1974. Struktur kepemilikan saham PT Grafiti Pers juga membuka ruang bagi para karyawan untuk memiliki bagian dalam perusahaan, mencerminkan semangat kolektivitas dan independensi yang diusung redaksi sejak awal berdiri.

Nama “Tempo” dipilih karena dianggap sederhana, mudah diingat, dan netral secara politik. Secara etimologis, kata “tempo” berarti “waktu”, yang merefleksikan karakter majalah mingguan yang tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga menghadirkan analisis dan konteks yang mendalam terhadap isu-isu aktual. Sejak edisi perdananya, Tempo tampil dengan gaya jurnalistik yang khas menggabungkan kedalaman analisis dengan keindahan bahasa. Pendekatan ini menjadikan Tempo berbeda dari surat kabar konvensional yang cenderung menonjolkan fakta-fakta singkat. Dalam setiap pemberitaannya, Tempo berusaha menyajikan “cerita di balik berita” dengan struktur naratif yang kuat dan gaya penulisan yang hidup (Sopian dkk, 2009).

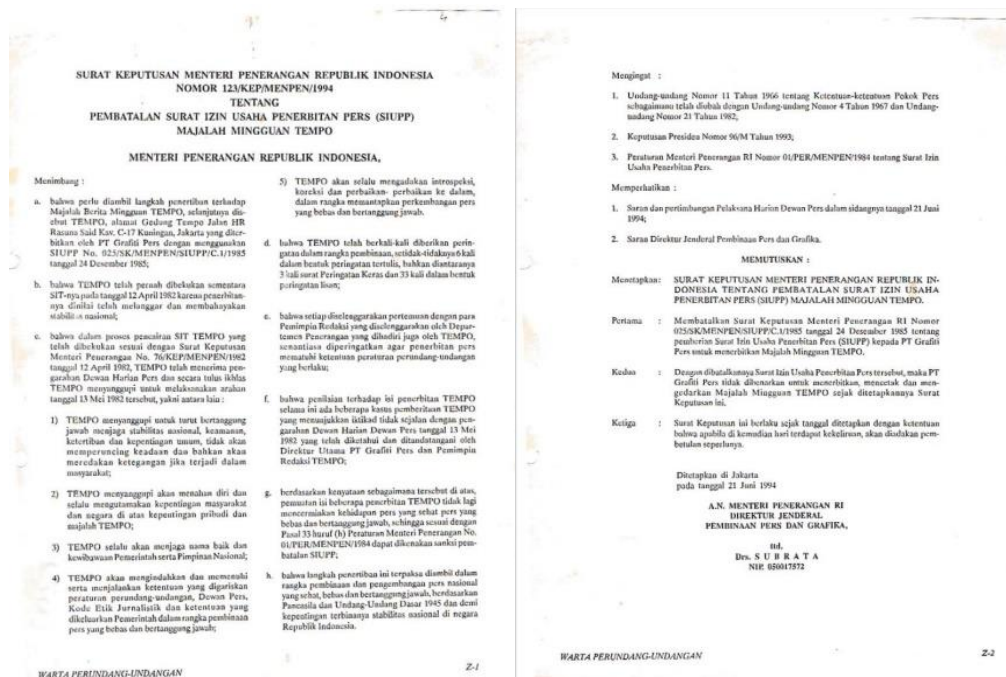
Majalah Tempo dikenal dengan gaya penulisan yang unik karena sering kali mengadopsi bentuk penulisan seperti karya sastra, menyerupai cerita pendek. Namun, gaya naratif tersebut tidak mengurangi ketajaman kritik yang disampaikan. Tempo tetap konsisten menggunakan pendekatan kritik yang elegan namun tajam terhadap berbagai persoalan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Liputannya meliputi beragam tema seperti politik, dunia internasional, teknologi, olahraga, dan gaya hidup. Kombinasi antara kedalaman liputan dan keberanian dalam mengkritik menjadikan Tempo sebagai bacaan penting bagi kalangan intelektual, mahasiswa, dan masyarakat kelas menengah yang membutuhkan informasi objektif di tengah keterbatasan media massa kala itu (Hidayat, 2020).

Namun, keberanian tersebut membuat Tempo kerap bersinggungan dengan kekuasaan, khususnya dengan pemerintah Orde Baru yang menerapkan sistem kontrol ketat terhadap media. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, setiap media wajib memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Departemen Penerangan apabila dianggap melanggar kepentingan negara. Tempo pertama kali dibredel pada 12 April 1982 oleh Menteri Penerangan Ali Moertopo setelah memuat laporan mengenai kerusuhan saat kampanye Partai Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta. Berita tersebut dianggap menyinggung citra Partai Golkar dan Presiden Soeharto selaku tokoh utamanya. Pembredelan dilakukan atas rekomendasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang saat itu dipimpin oleh Harmoko, seorang wartawan harian Pos Kota.

Setelah dua bulan diberedel, tepatnya pada 7 Juni 1982, Tempo kembali terbit setelah Goenawan Mohamad, selaku pemimpin redaksi, menandatangani surat pernyataan yang berisi permohonan maaf serta kesediaan untuk dibina oleh pemerintah. Langkah ini diambil bukan sebagai bentuk penyerahan diri terhadap kekuasaan, melainkan sebagai strategi bertahan dan manuver politik yang cermat di tengah tekanan keras rezim Orde Baru (Hanazaki, 1998). Dalam situasi di mana ruang gerak pers sangat terbatas, keputusan tersebut

menjadi upaya taktis agar Tempo tetap dapat hadir di ruang publik dan melanjutkan perannya sebagai media yang kritis serta independen.

Namun, hubungan tegang antara Tempo dan pemerintah kembali memuncak pada 21 Juni 1994, ketika majalah tersebut kembali dibredel berdasarkan pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) oleh Departemen Penerangan. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan pembredelan dua media lainnya, yakni Editor dan Detik. Kali ini, penyebabnya adalah laporan Tempo mengenai polemik pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur oleh B. J. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Pemerintah menilai pemberitaan tersebut telah menimbulkan keresahan dan dianggap merugikan citra pejabat tinggi negara, padahal bagi Tempo, liputan itu merupakan bentuk tanggung jawab jurnalistik untuk mengungkap kebijakan publik yang tidak transparan dan sarat kepentingan.



Gambar 4. 1. Surat Keputusan Pembatalan Surat Izin Usaha Majalah Tempo

(Sumber: jdih.bkpm.go.id)

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Goenawan Mohamad, pendiri Majalah Tempo, ia mengungkapkan bahwa pembredelan Tempo pada Tahun 1994 justru menjadi titik balik penting bagi kebangkitan kesadaran pers di Indonesia. Menurutnya, tindakan represif pemerintah tersebut memantik solidaritas luas dari berbagai kalangan.

“Ketika Tempo dibredel, kami justru menyaksikan sesuatu yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Ada gelombang besar solidaritas yang datang dari wartawan, seniman, akademisi, hingga masyarakat sipil. Mereka melihat bahwa pembungkaman terhadap Tempo bukan hanya persoalan satu media, tetapi soal kebebasan berbicara dan hak publik untuk tahu.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Goenawan menjelaskan bahwa dari semangat perlawanan terhadap pembredelan itulah kemudian lahir Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 7 Agustus 1994 di Wisma Tempo, Puncak, Bogor. Organisasi ini, menurutnya, menjadi wadah bagi para wartawan yang menolak tunduk pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) satu-satunya organisasi resmi yang kala itu dianggap terlalu dekat dengan rezim Orde Baru.

“AJI kami dirikan sebagai bentuk perlawanan moral dan professional. Kami ingin menunjukkan bahwa jurnalisme tidak boleh dikooptasi kekuasaan. Wartawan harus punya ruang independen untuk berpikir dan menulis.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Meskipun Tempo tidak lagi dapat terbit secara resmi, para jurnalisnya tetap melanjutkan perjuangan mereka melalui jalur alternatif. Goenawan menuturkan bahwa sejumlah wartawan Tempo menerbitkan Majalah Independen, sebuah buletin bawah tanah yang berfungsi sebagai sarana ekspresi bagi jurnalis kritis. Selain itu, mereka juga mendirikan Institut Studi Arus Informasi (ISAI), lembaga yang bergerak di bidang penelitian, dokumentasi, dan advokasi kebebasan pers.

“ISAI lahir dari semangat yang sama. Kami ingin melawan bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengetahuan, dengan riset, dan dengan dokumentasi. ISAI menjadi tempat kami belajar bahwa perlawanan bisa dilakukan lewat informasi.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Lebih jauh, Goenawan menyebut bahwa perjuangan tersebut tidak berhenti sampai di situ. Setelah kejatuhan rezim Soeharto pada Tahun 1998, Tempo akhirnya kembali terbit pada 6 Oktober 1998. Sejak saat itu, Tempo terus bertransformasi menjadi media yang lebih modern, terbuka, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Menurut Goenawan, semangat awal yang melandasi berdirinya Tempo yakni keberanian untuk bersuara independen dan berpihak pada kebenaran tidak pernah hilang, tetapi justru menemukan bentuk baru melalui inovasi jurnalisme yang lebih profesional dan kritis

Memasuki abad ke-21, menerbitkan Tempo *English Edition*, diikuti dengan peluncuran Koran Tempo pada Tahun 2001 sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan berita harian. Seiring kemajuan teknologi digital, Tempo juga mengembangkan portal daring Tempo.co, yang kini menjadi salah satu situs berita terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Seluruh unit tersebut bernaung di bawah Tempo Media Group, yang terus mempertahankan tradisi jurnalisme independen lintas platform (Tempo, 2019).

Lebih dari sekadar media berita, Tempo telah menjadi simbol perlawanan terhadap pembungkaman pers dan representasi dari idealisme jurnalisme Indonesia. Konsistensi Tempo dalam mempertahankan prinsip independensi menjadikannya bukan hanya saksi sejarah, melainkan juga aktor penting dalam proses demokratisasi bangsa. Hingga kini, Tempo tetap menjadi tolok ukur jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingatkan bahwa kebebasan pers bukanlah hadiah dari penguasa, melainkan hasil perjuangan panjang insan media dan masyarakat yang menolak tunduk pada kekuasaan.

4.1.2 Kondisi pers dan Kronologi Pembredelan Majalah Tempo di Era Orde Baru

Kondisi pers Indonesia pada masa Orde Baru (1966–1998) mencerminkan bagaimana negara menundukkan ruang publik dan kebebasan berekspresi melalui sistem kekuasaan yang represif dan terpusat. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, media massa tidak dipandang sebagai pengawas kekuasaan, melainkan sebagai alat politik yang harus mendukung

ideologi pembangunan nasional. Pemerintah menuntut media untuk tunduk pada konsep pers pembangunan, yakni pers yang berfungsi menjaga stabilitas nasional dan mendukung kebijakan negara.

Menurut David T. Hill (1994) dalam *The Press in New Order Indonesia*, pemerintah membangun sistem komunikasi politik yang hierarkis, di mana kebebasan pers dibatasi oleh mekanisme izin dan pengawasan ketat. Instrumen utama kontrol negara adalah Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Tanpa SIUPP, media tidak dapat terbit secara legal. Pencabutan izin dapat dilakukan sewaktu-waktu bila media dinilai “mengganggu stabilitas nasional” atau “tidak memenuhi tanggung jawab sosial.” Dengan demikian, SIUPP menjadi senjata politik yang efektif untuk membungkam media independen. Menteri Penerangan Harmoko menjadi tokoh sentral dalam penerapan kontrol tersebut. Di bawah kepemimpinannya, pengawasan pers dilakukan bukan hanya melalui regulasi formal, tetapi juga tekanan informal, seperti ancaman, intimidasi, dan intervensi terhadap isi redaksi. Hal ini menciptakan budaya swakontrol di kalangan wartawan, di mana mereka menahan diri untuk tidak menulis isu-isu yang dianggap sensitif, seperti korupsi pejabat, pelanggaran HAM, konflik militer, maupun bisnis keluarga Cendana.

Dalam wawancara yang dilakukan pada Tahun 2025, Andreas Harsono menjelaskan pengalamannya sebagai salah satu jurnalis yang aktif melawan represi Orde Baru. Ia menyatakan:

“Ada dua garis batas yang tidak tertulis bagi wartawan pada masa Orde Baru: pertama, jangan mengkritik militer; dan kedua, jangan menyentuh bisnis keluarga Soeharto. Kedua hal ini menjadi semacam pagar tak kasat mata yang membatasi ruang gerak jurnalisme di Indonesia. Siapa pun yang berani melanggarnya akan berhadapan dengan risiko pembredelan, tekanan politik, atau bahkan ancaman keselamatan pribadi. Di balik kesunyian media yang tampak patuh, sebenarnya terdapat ketakutan yang mencekam dan kesadaran kolektif di antara para jurnalis bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak boleh disentuh, meskipun kebenaran menuntut untuk diungkap.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Andreas Harsono menjelaskan pandangannya mengenai hubungan antara pers dan negara pada masa Orde Baru. Ia menyatakan:

“Hubungan antara pers dan negara pada masa itu tidaklah seragam. Tidak semua media memiliki keberanian yang sama dalam menghadapi kekuasaan. Ada media-media yang berani seperti Tempo, Editor, dan Detik. Tapi banyak juga yang memilih tunduk, seperti Republika, Poskota, dan Suara Karya. Mereka tahu pemerintah salah, tapi mereka takut.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Andreas Harsono menjelaskan situasi yang dihadapi para wartawan pada masa Orde Baru dan bagaimana ketakutan menjadi bagian dari sistem yang menekan kebebasan pers. Ia menyatakan:

“Ketakutan itu nyata. Bukan hanya karena ancaman fisik, tapi karena sistemnya membuat kita percaya bahwa melawan adalah bentuk kegilaan. Bayangkan, kami harus berhitung setiap kali menulis kalimat. Kata ‘korupsi’ bisa membuat surat izin terbit dicabut. Kata ‘ABRI’ dalam konteks negatif bisa membuat redaktur dipanggil. Jadi banyak wartawan belajar berbicara dalam metafora, menulis dengan simbol, atau memilih diam sepenuhnya. Waktu itu, ruang redaksi bukan hanya tempat kerja, tapi juga ruang ketakutan. Setiap berita yang terbit adalah hasil tawar-menawar antara nurani dan rasa aman. Di satu sisi, kami ingin jujur kepada publik; di sisi lain, kami takut kepada negara. Kadang kami bercanda, katanya wartawan zaman itu bukan cuma menulis berita, tapi juga menulis doa supaya tulisan kami tidak membawa malapetaka. Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun. Setiap orang punya cara bertahan. Tapi saya selalu percaya, pada akhirnya, pers yang diam adalah pers yang mati. Dan di masa itu, kami memilih untuk tetap hidup, dengan segala risikonya.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Pernyataan Harsono menunjukkan bahwa represi terhadap media tidak hanya dilakukan secara koersif, tetapi juga hegemonik. Negara berhasil menanamkan wacana bahwa “pers yang baik adalah pers yang mendukung pemerintah.” Pandangan ini sejalan dengan analisis Krishna Sen dan David T. Hill (2007) yang menyebut situasi Orde Baru sebagai “*the illusion of freedom*” di mana media tampak hidup dan beragam, tetapi seluruh ruang wacananya telah diarahkan untuk mendukung ideologi negara. Organisasi wartawan resmi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bahkan dijadikan alat kontrol negara, bukan wadah pembelaan profesi. Wartawan

yang menentang garis kebijakan pemerintah kerap kehilangan pekerjaan, diintimidasi, bahkan ditangkap.

Namun, di tengah tekanan tersebut, muncul segelintir media yang berani menentang arus kekuasaan. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Majalah Tempo. Majalah ini memosisikan diri sebagai media independen yang berpegang pada idealisme jurnalisme kritis: mencari kebenaran, bukan sekadar menyenangkan penguasa. Dengan gaya penulisan yang tajam dan investigatif, Tempo menjadi simbol jurnalisme bermutu di tengah iklim politik yang represif.

Dalam wawancara yang dilakukan di Jakarta pada Tahun 2025, Goenawan menegaskan bahwa sejak awal berdirinya pada Tahun 1971, Tempo telah dibangun dengan kesadaran bahwa perlawanan terhadap pemberangusan dan sensor merupakan bagian tak terpisahkan dari jati dirinya sebagai media independen. Ia mengaku, semangat itu tumbuh dari pengalaman pahit para pendirinya yang pernah merasakan langsung bagaimana kekuasaan dapat menundukkan suara kritis pers.

“Sejak hari pertama kami tahu bahwa kami sedang membangun sesuatu yang tidak akan disukai oleh penguasa. Tapi kalau mau jadi wartawan, harus siap menanggung risiko apa pun. Tempo didirikan oleh sekelompok wartawan yang sebelumnya dipecat dari Majalah Express karena menolak tunduk pada intervensi pemerintah. Dari luka itulah lahir tekad untuk mendirikan media yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Independensi adalah fondasi moral dan intelektual Tempo. Prinsipnya, Tempo tidak boleh dikontrol oleh kekuatan dari luar baik politik, ekonomi, maupun militer. Kalau ada kekuatan dari luar yang datang, maka penangkalnya dari dalam harus cukup kuat. Kami tahu, menjaga independensi itu tidak mudah. Tapi kalau media kehilangan independensinya, maka hilanglah seluruh maknanya.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, Jakarta, 2025).

Goenawan menekankan bahwa sejak awal, redaksi telah bersepakat untuk menolak segala bentuk kompromi moral yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap media.

“Wartawan Tempo tidak boleh menerima amplop. Sistem internal Tempo dibangun agar setiap karya jurnalistik melalui proses kolektif:

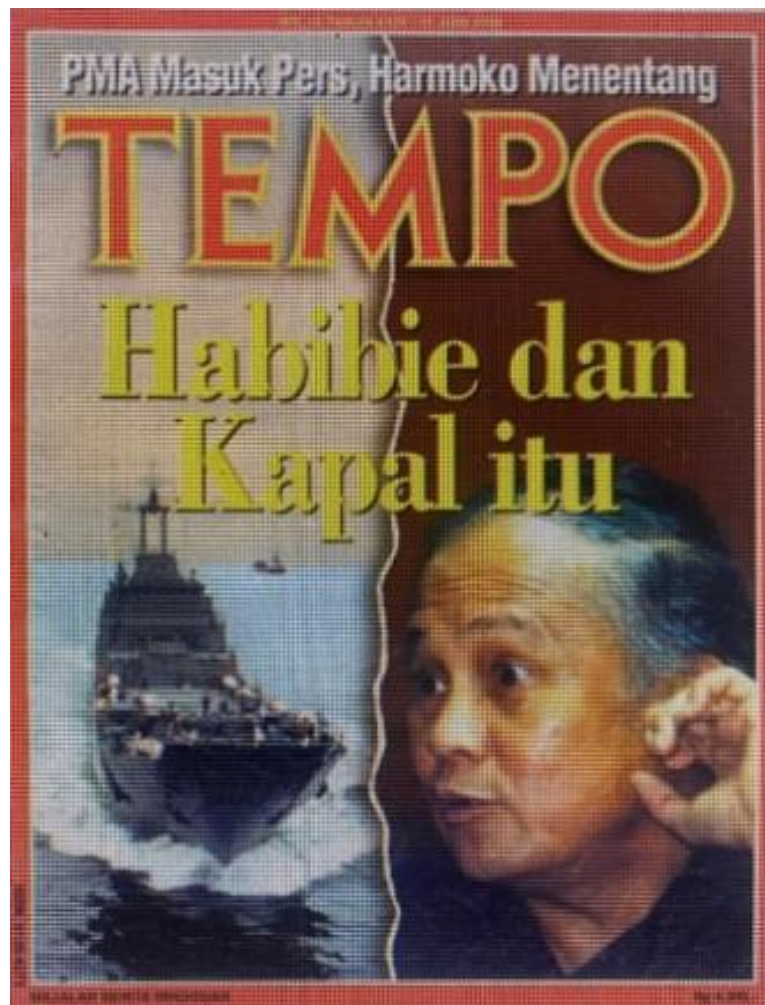
setiap tulisan tidak dikerjakan oleh satu orang, melainkan diperiksa bersama oleh tim redaksi. Itu bukan hanya soal teknis, tapi soal tanggung jawab moral. Pendapat wartawan harus cukup agar mereka tidak tergantung pada amplop. Kami tidak sempurna, tapi kami berusaha membangun benteng moral di tengah zaman yang begitu korup.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Menjelang pertengahan Tahun 1994, hubungan antara pemerintah Orde Baru dan media massa Indonesia mencapai titik yang paling tegang sejak dekade 1980-an. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang telah berkuasa hampir tiga dasawarsa, sistem politik berjalan secara sangat terpusat dan nyaris tanpa ruang bagi perbedaan pendapat. Pers diatur untuk menjadi bagian dari “mesin pembangunan nasional,” bukan sebagai pengawas kekuasaan. Dalam konsep yang dikenal sebagai pers pembangunan, media diharuskan mendukung stabilitas, harmoni sosial, dan citra positif pemerintah. Kritik dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap ketertiban nasional, sementara perbedaan pandangan sering dicap sebagai tindakan subversif.

Dalam atmosfer yang begitu represif itu, Majalah Tempo tampil sebagai pengecualian sebuah media yang dengan konsisten berupaya mempertahankan idealisme jurnalistik, meski sadar penuh akan risiko politik yang mengintai. Tempo bukan hanya sekadar media berita, melainkan simbol kecil dari keberanian intelektual di tengah ketakutan kolektif. Janet Steele dalam bukunya *Wars Within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia* (2005), menggambarkan posisi Tempo sebagai “paradoks dalam sistem yang tertutup” media yang beroperasi di dalam rezim otoriter, tetapi tetap berpegang pada prinsip independensi dan integritas. Steele menulis bahwa “*Tempo existed within the system, but its soul was always slightly outside of it*” Tempo hidup di dalam sistem, tetapi jiwanya selalu berada di luar batas-batas kontrol kekuasaan.

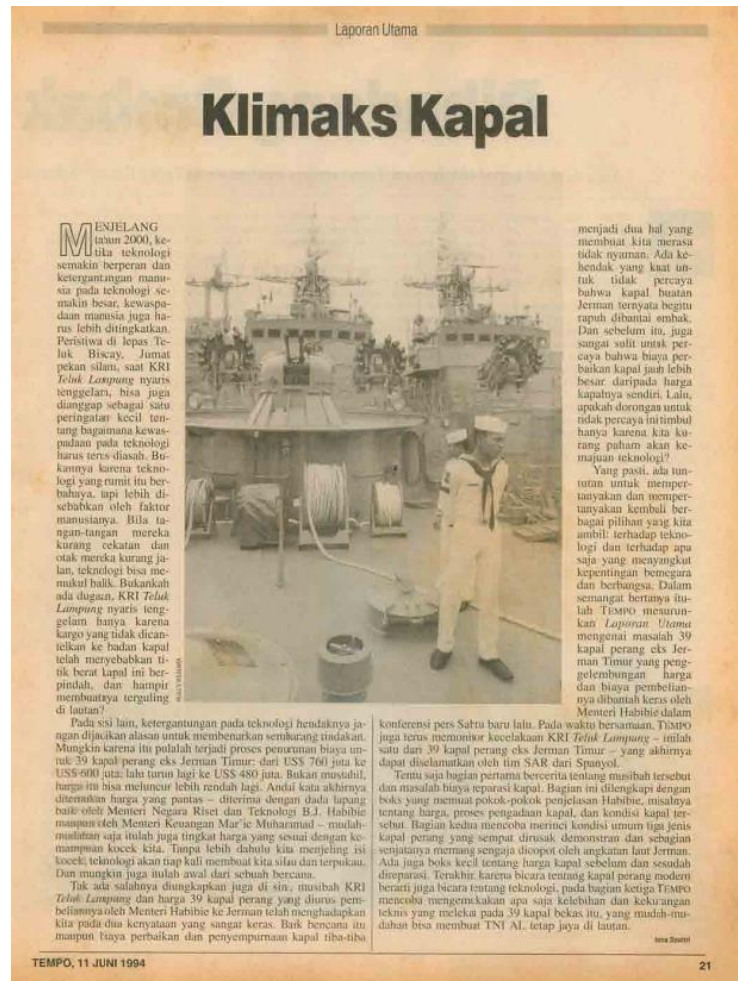
Akar dari pembredelan Tempo Tahun 1994 dapat ditelusuri pada keberaniannya mempublikasikan laporan utama edisi 11 Juni 1994 berjudul “Habibie dan Kapal Itu.” Laporan tersebut secara kritis membedah kebijakan kontroversial Menteri Riset dan Teknologi B. J. Habibie yang berencana membeli 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur senilai lebih dari satu

miliar dolar Amerika Serikat. Tempo menyoroti berbagai kegagalan dalam proyek tersebut, seperti kondisi kapal yang tidak layak, harga yang tidak wajar, serta kurangnya transparansi pemerintah. Liputan ini menimbulkan kegaduhan politik dan dianggap oleh pemerintah sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas negara, hingga akhirnya berujung pada pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Tempo pada 21 Juni 1994.



Gambar 4. 2. Sampul Majalah Tempo Edisi 11 Juni 1994

(Sumber: Data Tempo.co)



Gambar 4. 3. Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 11 Juni 1994

Halaman 21

(Sumber: Data Tempo.co)

Laporan utama diatas merupakan liputan investigatif yang mengulas secara kritis kebijakan pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur oleh B.J. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Artikel ini menyoroti kontradiksi antara ambisi modernisasi militer dengan realitas efisiensi dan kebutuhan pertahanan nasional. Tempo menampilkan narasi yang dimulai dengan kisah insiden KRI Teluk Lampung, sebuah kapal perang yang hampir tenggelam di perairan Teluk Biscay karena masalah teknis. Peristiwa tersebut dijadikan pintu masuk untuk mempertanyakan kesiapan teknologi, kelayakan kapal bekas yang dibeli, dan keselamatan awak kapal.

peralatan dan awak dari Indonesia tersebut terombang-ambing selama berjam-jam, bahkan sempat dikabarkan hampir kehilangan kendali. Tim penyelamat dari Spanyol dan Prancis segera dikerahkan untuk mengevakuasi kapal tersebut, hingga akhirnya situasi berhasil dikendalikan. Namun bagi Tempo, peristiwa ini bukan sekadar insiden alam di tengah pelayaran panjang, melainkan bukti bahwa kapal yang dibeli dari Jerman Timur itu tidak sepenuhnya layak beroperasi.

Tempo dengan cermat membingkai peristiwa ini untuk menunjukkan adanya kerapuhan teknis dan manajerial dalam proyek besar yang dijalankan pemerintah. Kapal yang diklaim telah melalui proses perbaikan di galangan Jerman ternyata masih mengalami kerusakan serius ketika menghadapi kondisi laut ekstrem. Tempo menulis bahwa pintu kapal sempat terbuka akibat tekanan ombak dan tidak dapat dikait mati, menyebabkan air masuk ke bagian dalam kapal dan mengancam keselamatan awak. Laporan ini dengan halus menyiratkan bahwa proyek besar tersebut dilaksanakan dengan tergesa-gesa tanpa memperhatikan standar keselamatan dan kelayakan teknis.

Lebih jauh lagi, Tempo menyoroti bagaimana insiden ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Soeharto. Disebutkan bahwa posko penyelamatan dibentuk dan dipimpin langsung oleh Presiden di Jalan Cendana. Kalimat ini tampak seperti laporan netral, tetapi sesungguhnya mengandung makna politik yang mendalam. Dengan menampilkan keterlibatan langsung Soeharto, Tempo sedang menunjukkan bahwa proyek pembelian kapal bukan semata urusan teknis, melainkan sarat dengan muatan politis dan simbol gengsi kekuasaan Orde Baru. Dalam konteks itu, Habibie tidak hanya tampil sebagai pejabat teknokrat, melainkan juga sebagai perpanjangan tangan ideologi pembangunanisme Soeharto yang menonjolkan kemajuan teknologi sebagai simbol kemakmuran bangsa (Tempo, 1994).

Lebih jauh, laporan ini mengungkap bahwa nilai proyek pembelian mencapai sekitar US\$ 319 juta, atau setara dengan ratusan miliar rupiah kala itu angka yang dianggap terlalu besar untuk kapal bekas yang kondisinya tidak prima. Tempo memaparkan berbagai pendapat dari pejabat dan pengamat industri strategis yang menilai proyek tersebut sebagai pemborosan anggaran. Bahkan, disebutkan pula adanya dugaan bahwa keputusan pembelian ini dilakukan tanpa perhitungan matang dan tidak melalui prosedur kelayakan yang memadai. Dengan gaya khasnya yang tajam namun faktual, Tempo mempertanyakan alasan pemerintah tetap melanjutkan transaksi yang jelas-jelas merugikan kepentingan publik.

Selain mempersoalkan aspek ekonomi, laporan ini juga menyinggung kemungkinan adanya tekanan dari pihak asing, khususnya Amerika Serikat, dalam proses pembelian kapal tersebut. Dengan pertanyaan retorik seperti “Benarkah biaya pembeliannya US\$ 319 juta saja?”, Tempo mengajak pembaca berpikir kritis terhadap motif dan transparansi pemerintah. Sikap ini menunjukkan keberanian Tempo mengangkat isu sensitif di tengah situasi politik yang represif, ketika kritik terhadap negara bisa dianggap pembangkangan. Artikel tersebut juga menampilkan peta lokasi musibah kapal LST Teluk Lampung sebagai simbol lemahnya manajemen dan pengawasan proyek pertahanan, sekaligus penegasan bahwa kebijakan yang salah berdampak langsung pada kerugian negara dan keselamatan militer (Tempo, 1994).

Laporan Utama

Mar'ie Memangkas Rp 327 Miliar

Setelah dirusak demonstran dan dipreteli senjatanya, kapal bekas itu dibeli juga oleh Indonesia. Biayanya dipendebaratkan tim TNI AL, BPPT, dan Depkeu.

terutama untuk gudang amunisi.

Namun, seperti diberitakan TEMPO pekan lalu, Mar'ie menolak anggaran tersebut. Bulan Mei lalu, Mar'ie menandatangani bahwa dia hanya bisa menyediakan paling tinggi US\$ 319 juta. Bagaimana Mar'ie bisa sampai ke angka itu, tak jelas benar.

Seorang konsultan memperkirakan, Mar'ie tak bisa menerima biaya di PT PAL (US\$ 64 juta) dan beberapa komponen biaya perbaikan. Maka, tim Habibie agaknya tak bisa lain harus menerima anggaran yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Ancar-ancur biaya akhirnya akan menjadi sebagai berikut: pembelian kapal US\$ 12,78 juta, reparasi kapal US\$ 226 juta, penyeberangan US\$ 58,9 juta, pembuatan pangkalan terutama untuk gudang amunisi US\$ 10 juta, perbaikan di PT PAL US\$ 9,5 juta, dan biaya administrasi proyek dan cadangan US\$ 2 juta. Total US\$ 319,18 juta.

Jika itulah angka akhir, harganya terasa lebih pantas untuk kapal bekas. Bandingkan dengan harga kapal baru seperti korvet KRI *Fatahillah* buatan tahun 1977 (US\$ 57 juta), LST eks Prancis tahun 1992 (US\$ 35 juta), atau LST buatan PT PAL (US\$ 25 juta).

Dan untunglah, kapal yang nyaris tenggelam dan dinakhodai Letkol Juspeh Sutrisman itu masih bisa dilaso oleh kapal Spanyol. Menurut Dinas Penerangan TNI AL, Sabtu pagi KRI *Teluk Lampung* dapat diamankan di Gijón, Spanyol.

Tapi, selain ombak besar Teluk Biscay, ancaman terhadap kapal eks Jerman Timur bisa saja datang dari arah lain. Maksudnya? Ancaman terbesar datang dari Capitol Hill, gedung Kongres AS. Pada 25 Mei lalu, Kongres AS meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang melarang penggunaan fasilitas pendidikan AS bagi perwira ABRI. Ini merupakan mesiu untuk menghidupkan amandemen Feingold yang melarang segala transaksi perangkat militer AS ke Indonesia.

Sementara ini, amandemen Feingold bisa dihalangi akibat bantuan Senator Bennett Johnson dari Louisiana (markas perusahaan Freeport yang menambang tembaga di Irian Jaya). Selain itu, ada kompromi dari pemerintah Clinton, yang melarang transaksi perangkat militer kaliber kecil, tapi mengizinkan sistem besar karena merupakan keuntungan komersial bagi AS.

Pihak militer Indonesia di Washington khawatir, jika Indonesia bereaksi keras terhadap RUU yang diloloskan Kongres tersebut, reaksi itu akan berakibat menghidupkan ancaman amandemen Feingold. Bila ini terjadi, perangkat militer Indonesia bisa kehilangan pasokan suku cadang.

Pada hal, kapal asal Jerman Timur yang dibeli Indonesia justru sangat bergantung pada pasokan dari AS, terutama untuk perangkat elektronik dan persenjataan. Itu pula sebabnya mengapa kapal yang dibeli murah itu tetap memerlukan biaya besar.

Ilustrasi: Tjeng Hsueh, Bandung AL; Foto: Maria Jankovic, dari Bambang Haryanti (Washington, D.C.)

TERLALU mahal, salah. Terlalu murah pun tak mungkin pula. Itulah dilema yang dihadapi Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie, pejabat yang diberi tugas mengurus pembelian 39 kapal bekas eks-Jerman Timur. Pasalnya, anggaran yang diajukan Habibie bagi 39 kapal bekas Jerman itu ditolak Menteri Keuangan. Penyebab utama, Pemerintah tidak punya uang.

tem Sewaco) dibancurkan. Alasannya: agar senjata-senjata itu tak dipakai untuk menghajar Timor Timur.

Tuntutan itu tak bisa ditawarkan-tawar, hingga Indonesia akhirnya membeli kapal perang yang seluruh persenjataanannya sudah dipreteli. Suka atau tidak, Pemerintah harus mengeluarkan US\$ 4 juta lagi untuk menghancurkan persenjataan kapal bekas itu.

Setelah dirusak dan senjatanya dibancurkan, kondisi armada bisa dibilang parah. Tapi entah apa pertimbangannya, Indonesia

Mar'ie Muhammad dan B.J. Habibie
Harga kapal menyedot pinjaman dari CGI

Hingga 9 Mei pekan lalu pihak Departemen Keuangan hanya menyetujui pagu US\$ 319 juta. Sedangkan proposal Tim Pengadaan Kapal TNI AL (TPK) mencapai US\$ 482 juta lebih. Mengapa ada selisih US\$ 163 juta? Tak lain untuk biaya reparasi kapal yang sebagian besar kondisinya amat mengkhawatirkan. Tanpa reparasi, 39 kapal itu tidak bisa beroperasi normal.

Mernang, ke-39 kapal itu hampir dua tahun nongkrong di pelabuhan tanpa perawatan. Kondisinya kian parah setelah sejumlah demonstran menduduki dan merusak kapal yang rata-rata berusia 15 tahun itu.

Selain itu, pihak DPR Jerman mewajibkan agar sebagian besar persenjataan (sis-

memutuskan untuk membeli juga kapal yang nyaris tinggal kerangka itu.

Setelah melalui perundingan yang cukup panjang, Maret 1992, pemerintah Jerman akhirnya setuju dan Indonesia boleh mengajukan penawaran harga. Itulah kisah awal bagaimana Indonesia membeli 16 kapal Parchim, 14 Frosch, dan 9 Kondor.

Sepintas-lah, kita beruntung memperoleh 39 kapal dengan harga mulai dari US\$ 189.000 sampai US\$ 378.000 per unit. Tapi dari proposal yang diajukan TPK ke Menteri Keuangan, ternyata untuk membenahi kapal-kapal tersebut hingga bisa beroperasi, diperlukan anggaran US\$ 1,1 miliar. Biaya ekstra yang begitu besar diperlukan untuk

TEMPO, 11 JUNI 1994

25

**Gambar 4. 6. Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 11 Juni 1994
Halaman 23**

(Sumber: Data Tempo.co)

Laporan diatas menjelaskan bahwa rencana ini menuai kontroversi ketika diketahui bahwa harga pengadaan kapal-kapal tua itu membengkak luar biasa dari 12 juta dolar menjadi lebih dari 400 juta dolar Amerika, bahkan pernah diusulkan tembus sampai satu miliar dolar. Habibie beralih, biaya tinggi terjadi akibat kebutuhan perbaikan besar, penggantian komponen utama, serta pengiriman dan pembangunan fasilitas pendukung dan logistik. Namun, delegasi Fraksi ABRI yang berangkat ke Jerman untuk meninjau langsung kondisi kapal menemukan kenyataan pahit: armada yang hendak dibeli itu rata-rata sudah uzur dan hampir afkir, tidak layak digunakan untuk operasi di

lautan Nusantara yang beriklim tropis dan membutuhkan perawatan tambahan serta modifikasi besar-besaran agar bisa dioperasikan oleh TNI AL.

Mar'ie Muhammad sebagai Menteri Keuangan mengambil langkah tegas dengan memangkas sebagian besar anggaran yang diajukan Habibie. Ia hanya menyetujui sebagian kecil dari anggaran awal, sekitar Rp 327 miliar, dan menolak pos-pos pengeluaran yang dianggap berlebihan dan tidak rasional. Pemangkasan ini tidak hanya demi penghematan fiskal, tetapi juga sebagai tindakan kehati-hatian agar negara tidak menghabiskan sumber daya untuk proyek yang penuh keraguan teknis serta manfaatnya yang sangat dipertanyakan. Sikap Mar'ie tersebut menimbulkan ketegangan politik dan birokrasi, khususnya dengan B.J. Habibie yang merasa kebutuhan militer telah diabaikan, dan menyebabkan berbagai perdebatan sengit di berbagai rapat kabinet.

Peristiwa tenggelamnya KRI Teluk Lampung salah satu kapal bekas yang sudah dibawa ke Indonesia makin memperkuat dugaan bahwa transaksi pembelian tersebut tidak berdasarkan kebutuhan nyata militer, melainkan lebih pada semangat memborong barang antik tanpa memperhatikan efektivitas dan kecocokan dengan kondisi geografis Indonesia. Berbagai pihak akhirnya memandang pembelian ini sebagai bentuk utang yang tidak pantas *illegitimate debt*, bahkan menjadi salah satu simbol kegagalan kebijakan pengelolaan aset strategis negara (Tempo, 1994).

Menurut Steele (2014), keberanian Tempo untuk menayangkan perbedaan itu adalah tindakan yang “mengguncang fondasi simbolik kekuasaan Orde Baru.” Selama bertahun-tahun, Soeharto membangun citra bahwa pemerintahannya adalah satu kesatuan yang harmonis tanpa perpecahan. Tempo, dengan laporan tersebut, meruntuhkan mitos keseragaman itu dan menunjukkan bahwa bahkan di antara para menteri, terdapat konflik kepentingan dan perbedaan pandangan. Bagi publik, berita itu memberi secercah harapan tentang transparansi dan akuntabilitas. Namun bagi penguasa, tulisan tersebut dianggap sebagai ancaman langsung terhadap citra dan stabilitas yang telah dijaga dengan ketat.

Situasi semakin memanas ketika laporan itu diikuti oleh reaksi keras dari Habibie dan kelompoknya. Habibie, yang saat itu memiliki hubungan sangat dekat dengan Soeharto, merasa Tempo telah menuduh majalah itu tidak mendukung kebijakan pemerintah. Beberapa hari kemudian, sejumlah pejabat tinggi negara termasuk Menteri Penerangan Harmoko memanggil pimpinan redaksi Tempo untuk memberikan penjelasan. Dalam pertemuan itu, muncul tekanan agar Tempo menarik kembali atau meluruskan pemberitaannya. Namun, Goenawan Mohamad dan tim redaksi menolak. Mereka berpendapat bahwa apa yang ditulis Tempo adalah fakta, bukan fitnah, dan merupakan bagian dari tanggung jawab moral pers untuk memberi tahu publik. Penolakan inilah yang menjadi awal dari akhir. Tempo, yang selama bertahun-tahun sudah dianggap terlalu kritis, akhirnya dijadikan contoh oleh pemerintah untuk memperingatkan media lain agar tidak menyeberangi batas yang tak tertulis. Pada 21 Juni 1994, pemerintah melalui Departemen Penerangan resmi mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Tempo, bersama dua media lainnya: Editor dan Detik. Keputusan itu menjadi simbol paling nyata dari represi terhadap kebebasan pers di era Orde Baru.

Goenawan Mohamad mengenang peristiwa pembredelan Tempo tahun 1994 sebagai salah satu titik penting dalam sejarah pers Indonesia. Ia menjelaskan bahwa laporan berjudul “Habibie dan Kapal Itu” menjadi pemicu utama ketegangan antara Tempo dan pemerintah Orde Baru.

“Itu soal kapal eks-Jerman. Kami tahu, tulisan itu menyentuh wilayah yang sangat sensitif. Ia bukan sekadar laporan ekonomi, melainkan penyingkapan konflik di lingkaran dalam kekuasaan Soeharto. Reaksi dari pemerintah datang secepat badai yang seolah memang sudah lama menunggu alasan untuk menghantam. Tak lama setelah laporan itu terbit, Presiden Soeharto dalam sebuah pidato di Teluk Ratai, Lampung, melontarkan teguran keras kepada media yang dianggap tidak menjaga tanggung jawab sosial dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Semua orang tahu siapa yang dimaksud, dan kami sadar, itu adalah sinyal awal sebelum badai besar benar-benar datang.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Goenawan menjelaskan bahwa pidato tersebut menjadi titik balik yang menandai dimulainya tekanan sistematis terhadap Tempo. Dari sana, Menteri Penerangan Harmoko segera bergerak, melancarkan apa yang oleh Goenawan disebut sebagai serangan administratif yang dibungkus prosedur hukum. Ia mengenang bagaimana ancaman demi ancaman datang bertubi-tubi:

“Ada enam surat peringatan tertulis, tiga peringatan keras, dan puluhan teguran lisan. Tapi kami tetap berpegang pada prinsip: tugas wartawan bukan menjaga kenyamanan penguasa, melainkan menjaga nurani publik.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Puncak tekanan itu akhirnya datang pada 21 Juni 1994. Di tengah cuaca Jakarta yang lembab dan muram, Harmoko secara resmi mengumumkan pencabutan SIUPP Tempo, bersamaan dengan Detik dan Editor. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara luas, pemerintah menuduh ketiga media itu menyalahgunakan kebebasan pers dan mengganggu stabilitas nasional. Namun, seperti dicatat oleh Hill (1994), tuduhan itu nyaris tanpa dasar hukum yang kuat. “Itu bukan keputusan administratif,” tulis Hill, “melainkan keputusan politik.” Dengan pencabutan SIUPP, Tempo secara hukum kehilangan hak untuk hidup namun secara moral, justru lahir kembali sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan kebebasan berpendapat.

Goenawan Mohamad memberikan penjelasan mengenai kronologi peristiwa pembredelan Tempo secara faktual. Ia menyampaikan bahwa pada saat pemerintah mengumumkan keputusan pembredelan, dirinya sedang berada di Jawa Tengah. Ketika berada di bandara, ia menerima kabar bahwa Tempo resmi dibredel oleh pemerintah. Menurutnya, keputusan tersebut tidak datang secara tiba-tiba karena redaksi Tempo sudah memperkirakan langkah tersebut akan terjadi.

“Waktu pembredelan diumumkan, saya sedang di Jawa Tengah. Saat itu saya berada di bandara ketika kabar itu datang. Begitu mendengar, saya langsung tahu bahwa Tempo pasti dibredel. Jauh sebelum itu, kami memang sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Saya bahkan pernah bilang kepada teman-teman, lebih baik punya pekerjaan lain, supaya kalau nanti dibredel, kami tidak kehilangan nafkah” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Keesokan harinya, 22 Juni 1994, tercatat sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan jurnalisme Indonesia. Ratusan wartawan dari berbagai media berkumpul di depan Gedung Departemen Penerangan di Jakarta, membawa spanduk, poster, dan pernyataan protes sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan pemerintah yang membredel Tempo, Detik, dan Editor. Aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi spontan, melainkan pernyataan moral dari komunitas pers yang menolak tunduk pada kekuasaan yang membungkam suara kritis. Bagi banyak wartawan, hari itu menjadi tonggak kesadaran bahwa perjuangan mempertahankan kebebasan pers bukan hanya soal mempertahankan media, tetapi juga menjaga hak publik untuk memperoleh informasi yang benar dan independen. Suasana di depan gedung itu dipenuhi dengan campuran ketegangan, keberanian, dan solidaritas. Para jurnalis berdiri berdampingan, menunjukkan tekad bahwa martabat profesi mereka tidak akan dikalahkan oleh tekanan politik. Dalam ingatan Goenawan, suasana hari itu adalah campuran antara kemarahan, ketakutan, dan semangat yang menyala-nyala.

“Kami berkumpul di Gedung Departemen Penerangan ada Andreas Harsono, Bambang Wisudo, Salomo Simanungkalit, Imran Hasibuan, Yosep Adi Prasetyo, Heru Hendratmoko, dan banyak lagi. Begitu kabar pembredelan tersebar, kami langsung berkumpul di kantor The Jakarta Post. Malam itu suasananya campur aduk: marah, takut, tapi juga penuh semangat luar biasa.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).



Gambar 4. 7. Masyarakat Unjuk Rasa Menentang Pembredelan Majalah Tempo, Editor dan Tabloid Detik di Departemen Penerangan

(Sumber: Data Tempo.co)

Aksi protes yang awalnya berlangsung secara damai itu dengan cepat berkembang menjadi demonstrasi besar yang melibatkan ratusan bahkan ribuan wartawan, mahasiswa, dan aktivis masyarakat sipil. Mereka berkumpul dengan membawa spanduk-spanduk bertuliskan “Hidup Pers Bebas” dan “Lawan Pembungkaman,” yang berkibar di tengah kerumunan sebagai simbol penolakan terhadap pembredelan media dan upaya pemerintah membungkam suara kritis. Semangat solidaritas dan tekad untuk mempertahankan kebebasan pers terasa nyata di setiap langkah mereka, di setiap teriakan dan orasi yang dilontarkan. Namun, suasana yang semula penuh antusiasme dan semangat demokratis itu berubah drastis pada 27 Juni 1994, ketika aparat keamanan turun tangan dengan cara yang keras. Massa dibubarkan secara paksa, dengan penggunaan kekuatan fisik yang menimbulkan ketakutan dan ketegangan. Peristiwa itu menegaskan bahwa perjuangan untuk kebebasan pers bukanlah jalan yang mudah; ia sarat risiko dan menghadapi perlawanan nyata dari kekuasaan yang ingin mempertahankan kontrol.

“Gas air mata ditembakkan, beberapa jurnalis ditangkap, dan pelukis Semsar Siahaan terluka parah setelah dikeroyok aparat. Itu momen yang membekas dalam ingatan kami. Saat itu kami sadar, ini bukan sekadar tentang Tempo. Ini tentang hak untuk berkata jujur, tentang

kebebasan berpikir yang dirampas.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).



Gambar 4. 8. Pelukis Semsar Siahaan Digiring Polisi Ketika Melakukan Aksi Unjuk Rasa Menentang Pembredelan

(Sumber: Data Tempo.co)

Meskipun Tempo telah resmi dibredel, para jurnalisnya tidak berhenti berjuang. Goenawan Mohamad bersama 43 mantan karyawan Tempo mengambil langkah berani dengan menggugat Menteri Penerangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 7 September 1994. Gugatan tersebut didasarkan pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982, yang menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Proses persidangan berjalan panjang dan melelahkan, berlangsung hampir satu tahun lamanya. Namun, pada 3 Mei 1995, PTUN akhirnya memutuskan untuk memenangkan gugatan pihak Tempo dan menyatakan bahwa pembredelan tersebut tidak sah secara hukum. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pada 13 Juni 1996, Mahkamah Agung membatalkan putusan PTUN dan menyatakan bahwa Menteri Penerangan memiliki “wewenang administratif penuh” untuk mencabut izin terbit media. Putusan itu menjadi tamparan keras bagi perjuangan hukum Tempo, sekaligus menegaskan betapa kuatnya kontrol negara terhadap ruang publik di masa Orde Baru.

Dalam wawancara, Goenawan Mohamad juga menyinggung salah satu peristiwa penting yang terjadi setelah Tempo dibredel, yakni adanya upaya dari pihak tertentu untuk mengambil alih kepemilikan Tempo. Ia menyebut bahwa saat itu terdapat tawaran yang datang dari kalangan militer yaitu Prabowo Subianto yang bermaksud mengendalikan arah redaksi Tempo dengan dalih menyelamatkan majalah tersebut agar dapat kembali terbit.

“Setelah Tempo dibredel, memang ada tawaran agar majalah ini diambil alih oleh pihak lain, termasuk oleh Prabowo. Tapi kami menolak. Karena kalau kami menerima tawaran itu, Tempo tidak lagi menjadi Tempo. Ia akan kehilangan rohnya sebagai media independen. Tempo bukan sekadar nama majalah, tapi cara berpikir, cara menjaga integritas. Kalau dikendalikan oleh kekuasaan, semua perjuangan kami menjadi sia-sia.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Goenawan menegaskan bahwa keputusan untuk menolak tawaran tersebut merupakan bentuk konsistensi terhadap prinsip independensi yang sejak awal menjadi dasar pendirian Tempo. Bagi mereka, mempertahankan integritas jauh lebih penting daripada sekadar mempertahankan eksistensi fisik media. Dalam pandangan Goenawan, sebuah media yang kehilangan independensinya sama saja dengan kehilangan jiwanya.

4.1.3 Bentuk-Bentuk Perlawanan Majalah Tempo terhadap Pembredelan

4.1.3.1 Perlawanan Melalui Jalur Litigasi (Hukum)

Pembredelan Tempo pada 21 Juni 1994 tidak hanya memicu kemarahan publik, tetapi juga melahirkan bentuk perlawanan baru yang menempatkan jalur hukum sebagai arena pertarungan. Para jurnalis dan alumni Tempo menolak melihat keputusan Menteri Penerangan sebagai tindakan administratif belaka; mereka memaknainya sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kemerdekaan pers. Dari kesadaran itu, lahirlah keputusan untuk menggugat pemerintah melalui mekanisme hukum.

Langkah menggugat negara merupakan tindakan yang tidak lazim pada masa ketika pemerintah memiliki otoritas hampir mutlak atas izin terbit media. Bagi Janet Steele, upaya ini menjadi simbol bahwa para jurnalis Tempo tidak

ingin diposisikan hanya sebagai korban represi, melainkan sebagai warga negara yang menuntut negara mematuhi hukum yang dibuatnya sendiri (Steele, 2014). Setelah pembredelan diumumkan secara resmi, suasana di kantor redaksi Tempo berubah menjadi perpaduan duka, kemarahan, dan tekad untuk melawan. Dari ruang redaksi yang dibungkam, muncul keyakinan bahwa perlawanan melalui jalur hukum adalah langkah awal untuk menegakkan kembali martabat pers di Indonesia. Goenawan Mohamad menjelaskan:

“Kami duduk bersama dalam diam. Ada rasa kehilangan yang dalam, karena yang hilang bukan hanya izin terbit, tapi juga ruang untuk bicara. Namun di balik kesedihan itu, tumbuh kesadaran baru: perlawanan tidak harus berhenti di meja redaksi.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Dari kesunyian malam itulah, lahir tekad baru untuk melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda. Goenawan menceritakan bahwa dalam waktu singkat, para jurnalis Tempo segera melakukan konsolidasi internal. Mereka menghubungi pengacara, menyusun strategi, dan memutuskan untuk mengambil langkah yang belum pernah dilakukan oleh media mana pun sebelumnya: menggugat pemerintah melalui jalur hukum.

“Kami sadar, ini bukan langkah mudah. Tapi kami percaya, kalau kebebasan pers bisa dibungkam tanpa perlawanan, maka seluruh martabat profesi wartawan akan runtuh. Karena itu, kami memutuskan untuk melawan bukan dengan amarah, tetapi dengan akal dan hukum. Itulah cara kami mempertahankan kehormatan pers.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Langkah pertama dilakukan ketika Goenawan Mohamad bersama puluhan jurnalis dan staf Tempo memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan ini pada masanya terbilang radikal, karena rezim Orde Baru menggunakan pengadilan administratif sebagai perpanjangan tangan kekuasaan, bukan sebagai ruang untuk menggugat pemerintah. Namun Tempo tetap memilih jalur itu, seperti diungkapkan Goenawan dalam sebuah wawancara:

“Kalau negara menggunakan hukum untuk membungkam, maka kami pun harus menggunakan hukum untuk membuka suara. Itu satu-satunya cara agar publik melihat bahwa keadilan masih mungkin diperjuangkan” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).



**Gambar 4. 9. Goenawan Mohamad dalam Sidang Pembredelan
Majalah Tempo di PTUN**

(Sumber: Data Tempo.co)

Proses gugatan ini dimulai dengan upaya Tempo untuk menantang legalitas keputusan Menteri Penerangan yang mencabut SIUPP mereka, dengan mempertanyakan apakah tindakan administratif tersebut benar-benar dilakukan sesuai prosedur dan memiliki dasar hukum yang sah. Dalam ruang sidang, kuasa hukum Tempo membangun argumentasi bahwa keputusan menteri tersebut tidak hanya cacat secara prosedural, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tata usaha negara yang seharusnya melandasi setiap tindakan pejabat publik. Mereka menegaskan bahwa pencabutan SIUPP dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mengikuti mekanisme yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Pers Tahun 1982.

Lebih jauh lagi, kuasa hukum Tempo menyoroti bahwa negara, melalui Menteri Penerangan, telah bertindak melampaui kewenangannya dengan menggunakan instrumen perizinan sebagai alat untuk membungkam kritik. Dalam pandangan mereka, SIUPP yang secara hukum merupakan izin administratif untuk mendirikan perusahaan pers telah diperlakukan sebagai instrumen politik yang dapat dicabut kapan saja ketika pemberitaannya dianggap mengganggu stabilitas. Karena itu, di hadapan majelis hakim, pembela Tempo menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya menyalahi prosedur hukum, tetapi juga merusak fondasi kebebasan pers yang seharusnya dijamin oleh undang-undang (Steele, 2014).

Proses di PTUN berjalan panjang dan penuh tekanan, namun untuk pertama kalinya Tempo menemukan ruang bagi argumen hukum yang membela kebebasan pers. Sidang demi sidang memperlihatkan kontradiksi antara dalih pemerintah dan bukti-bukti prosedural yang diajukan Tempo. Hingga akhirnya, pada 3 Mei 1995, PTUN mengabulkan gugatan Tempo dan menyatakan keputusan pembredelan itu tidak sah. Putusan tersebut mengejutkan publik dan memberi harapan bahwa jalur hukum dapat menjadi alat melawan kesewenang-wenangan negara. Goenawan mengenang momen itu dengan mengatakan:

“Saya tahu putusan itu tidak akan mengubah semuanya. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, ada hakim yang mengatakan kepada negara: Anda tidak bisa semena-mena.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).



**Gambar 4. 10. Goenawan Mohamad, Widiarti Goenawan, Fikri Jufri
Menangis Saat Menghadiri Sidang Pengadilan Gugatan Tempo di PTUN**

(Sumber: Data Tempo.co)

Putusan PTUN yang memenangkan Tempo kemudian menjadi tonggak penting dalam sejarah perlawanan pers Indonesia. Di ruang sidang yang dipenuhi jurnalis, pengacara, dan aktivis prodemokrasi, suasana seketika pecah oleh tepuk tangan dan air mata haru ketika hakim membacakan keputusan. Bagi banyak orang, momen itu terasa seperti secercah cahaya yang menembus pekatnya represi politik Orde Baru. Para jurnalis Tempo yang selama berbulan-bulan hidup dalam ketidakpastian akhirnya merasakan bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Keputusan itu bukan hanya kemenangan hukum, tetapi juga kemenangan moral: bukti bahwa pers tidak bisa selamanya dibungkam.

Pemerintah segera mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), sehingga perlawanan Tempo memasuki babak baru. Di pengadilan tingkat banding ini, Tempo tetap mempertahankan argumentasinya bahwa penerbitan tidak dapat dicabut tanpa proses yang transparan dan tanpa pembuktian kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Andreas mengatakan:

“Banyak pengamat pada masa itu memperkirakan bahwa Tempo akan mengalami kekalahan pada tingkat ini, sebab tekanan politik terhadap lembaga peradilan dianggap jauh lebih kuat ketika perkara memasuki tahap banding.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Namun dugaan tersebut tidak terbukti. PTTUN justru kembali menguatkan putusan PTUN, dan dengan tegas menyatakan bahwa pencabutan SIUPP merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan bahwa negara tidak dapat begitu saja menggunakan instrumen administratif untuk membungkam kritik, karena hal itu mengingkari tujuan hukum tata usaha negara yang seharusnya melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Putusan ini semakin menegaskan bahwa persoalan pembredelan Tempo bukan sekadar urusan perizinan, tetapi menyangkut komitmen negara terhadap demokrasi, hukum, dan kebebasan berekspresi. Meskipun secara politik tekanan terhadap pengadilan lebih kuat di tingkat ini, putusan PTTUN pada akhirnya justru menguatkan kemenangan Tempo. Ketua Majelis Hakim PTTUN Charis Subijanto dengan tegas memutuskan pencabutan SIUPP Tempo melalui SK Menteri Penerangan No. 123/1994 tanggal 21 Juni 1994, batal. Goenawan membaca arah zaman, tidak pernah menganggap kemenangan itu sebagai akhir. Ia mengatakan:

“Kami menang dua kali, tetapi saya tahu negara tidak akan berhenti. Rezim ketika itu tidak terbiasa dikalahkan oleh pengadilan. Saya sudah menebak bahwa babak terakhir tidak akan semudah itu” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Prediksi itu terbukti ketika pemerintah membawa perkara ini ke Mahkamah Agung melalui upaya kasasi. Pada tingkat tertinggi sistem peradilan ini, politik Orde Baru memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat, dan ruang untuk manuver hukum yang independen menjadi sangat sempit. Proses kasasi berjalan dalam suasana yang penuh tekanan, tidak hanya bagi Tempo, tetapi juga bagi struktur peradilan itu sendiri. Ketika akhirnya Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan kasasi pemerintah dan membatalkan putusan PTUN dan PTTUN, Tempo menyadari bahwa ruang perlawanan hukum telah tertutup. Putusan MA itu tidak hanya menandai kekalahan

Tempo secara legal, tetapi juga memperlihatkan batas-batas independensi peradilan pada masa itu. Goenawan merespons putusan tersebut dengan mengatakan:

“Di depan hukum, kami sudah melakukan yang bisa dilakukan. Kini perjuangan harus menemukan jalannya sendiri. Hukum sudah ditutup, tapi suara tidak bisa dibungkam” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Ia tahu, secara realistis, tidak ada pengadilan yang benar-benar independen di bawah bayang-bayang kekuasaan Soeharto. Namun, bagi Goenawan, melawan bukan tentang menang atau kalah di atas kertas, tetapi tentang menjaga martabat dan akal sehat. Ungkapan tersebut mencerminkan sikap batin Tempo: bahwa jalur hukum yang ditempuh bukan semata untuk mencari kemenangan yuridis, melainkan sebagai bentuk statement moral sebuah deklarasi bahwa kebebasan pers memiliki landasan etis yang tak bisa ditundukkan oleh peraturan yang dibuat untuk melindungi kekuasaan. Tempo sadar, dalam struktur hukum Orde Baru, keadilan sering kali hanyalah perpanjangan tangan dari politik. Namun, langkah menggugat tetap dilakukan sebagai perlawanan simbolik terhadap legitimasi negara yang sewenang-wenang. Goenawan mengatakan:

“Kami datang bukan untuk menang, tetapi untuk menunjukkan bahwa kami tidak tunduk. Para wartawan Tempo banyak di antaranya telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat pembredelan tetap datang ke ruang sidang dengan pakaian sederhana dan wajah yang tegar. Di tengah tekanan politik, pengawasan intelijen, dan rasa cemas yang membayangi keluarga mereka, para jurnalis tetap berdiri di barisan mempertahankan hak untuk berpikir dan berbicara jujur.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Kekalahan itu memang terasa pahit. Tetapi, bagi Goenawan dan para jurnalis Tempo, hasilnya tidak pernah menjadi ukuran akhir. Dalam wawancara dengan Goenawan Mohamad ia menegaskan bahwa proses hukum itu sendiri sudah merupakan kemenangan moral dan Tempo berhasil menunjukkan kepada publik bahwa wartawan tidak harus tunduk di hadapan negara.

“Kalau itu dilawan, kan artinya sama saja seperti melawan penguasa. Dan pada masa itu, melawan penguasa bukan perkara sederhana. Risikonya besar bisa kehilangan pekerjaan, dan dipanggil aparat. Tapi di sisi lain, kalau kita diam, berarti kita ikut membenarkan ketidakadilan. Jadi memang selalu ada dilema antara takut dan tanggung jawab. Namun, saya selalu percaya, jurnalisme yang sejati tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Pernyataan tersebut mengandung ironi yang dalam. Goenawan menyadari bahwa perjuangan Tempo bukan sekadar menantang seorang menteri, tetapi simbol kekuasaan yang lebih besar. Dengan melawan, mereka sedang menantang legitimasi sistem yang selama puluhan tahun membungkam kebebasan berpikir.

Dalam wawancara terpisah, Andreas Harsono mengenang peristiwa itu dengan nada penuh kekaguman sekaligus haru. Baginya, keputusan Tempo untuk menggugat Menteri Penerangan adalah tindakan yang nyaris tak terpikirkan di masa itu.

“Melawan pemerintah lewat pengadilan itu seperti menantang raja di istananya sendiri. Tapi langkah hukum yang ditempuh Tempo justru menjadi simbol keberanian yang luar biasa karena tindakan ini menginspirasi banyak jurnalis muda untuk melihat hukum bukan semata-mata sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai ruang perlawanan. Saya masih mengingat betul bagaimana generasi saya memandang Tempo sebagai mercusuar di tengah gelapnya represi Orde Baru.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Kekalahan di Mahkamah Agung memang menutup satu babak perjuangan, tetapi membuka babak baru dalam sejarah pers Indonesia. Dari ruang sidang itulah lahir kesadaran kolektif bahwa kebebasan pers tidak bisa diperoleh dari kemurahan hati penguasa, melainkan harus diperjuangkan dengan keberanian, solidaritas, dan prinsip. Dan di tengah semua itu, Tempo berdiri sebagai simbol moral: kalah di atas kertas, tetapi menang dalam sejarah.



Gambar 4. 11. Goenawan Mohamad Dikerumuni Wartawan di Gedung Mahkamah Agung, Setelah Sidang Kasasi TEMPO Kalah

(Sumber: Data Tempo.co)

Ketika Mahkamah Agung pada 13 Juni 1996 memutuskan bahwa Menteri Penerangan memiliki wewenang administratif penuh atas izin penerbitan, suasana di kalangan mantan jurnalis Tempo menjadi hening. Keputusan itu terasa seperti menutup pintu terakhir dari perjuangan panjang mereka di jalur hukum. Dalam ingatan beberapa jurnalis yang hadir saat itu, suasananya bukan lagi marah atau kecewa, melainkan sunyi yang mencerminkan kelelahan sekaligus kesadaran mendalam bahwa hukum pada masa itu telah kehilangan makna keadilannya. Tempo, yang sejak awal menaruh harapan kecil pada supremasi hukum, akhirnya harus menerima kenyataan buruk bahwa seluruh sistem peradilan telah sepenuhnya dikendalikan oleh kekuasaan eksekutif Orde Baru. Namun, di balik kekalahan formil itu, tersisa sesuatu yang jauh lebih besar: semangat untuk tidak tunduk. Goenawan Mohamad dan kawan-kawan menyadari bahwa kemenangan moral sering kali lebih berarti daripada kemenangan di atas kertas. Mereka tahu bahwa dengan membawa kasus pembredelan ke pengadilan, Tempo telah memaksa negara untuk membuka kedoknya sendiri yaitu memperlihatkan kepada publik bahwa kekuasaan bisa mengendalikan hukum demi mempertahankan legitimasi. Dan di situlah letak kemenangan sejati Tempo: mereka membuat

publik menyaksikan bagaimana kebenaran diputarbalikkan oleh negara, tetapi juga bagaimana keberanian bisa tetap hidup di bawah represi.

Goenawan mengenang momen itu dengan nada yang tenang, nyaris datar, namun penuh makna. Setiap kata yang diucapkannya terdengar seperti hasil perenungan panjang atas perjalanan panjang jurnalisme melawan kekuasaan yang menindas. Dalam wawancaranya, ia berkata:

“Perjuangan hukum telah selesai di sini. Kini tinggal perjuangan lain. Melawan kekuasaan tidak selalu harus dilakukan di ruang sidang; bisa juga lewat pena, tulisan, solidaritas, dan kesadaran publik. Kekalahan Tempo di Mahkamah Agung tidak pernah kami lihat sebagai kegagalan. Sebaliknya, itu menjadi simbol keteguhan moral jurnalisme di tengah gelapnya rezim. Gugatan hukum kami telah menanamkan satu pesan penting yaitu kebebasan pers bukanlah hak yang diberikan dari atas, melainkan hasil dari keberanian untuk terus melawan, bahkan ketika peluang kemenangan nyaris tidak ada.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Kata-kata itu bukan sekadar refleksi, tetapi juga pernyataan prinsip. Tersimpan keyakinan bahwa perjuangan sejati tidak diukur dari hasil, melainkan dari keberanian untuk tetap berdiri tegak di hadapan kekuasaan yang berusaha membungkam. Bagi Goenawan, kekalahan Tempo di pengadilan justru menegaskan satu hal penting: bahwa integritas dan moralitas jurnalis tidak bisa ditaklukkan oleh kekuasaan apa pun. Beberapa jurnalis muda pada masa itu, termasuk Andreas Harsono, mengenang dengan jelas bagaimana langkah hukum Tempo menjadi momentum penting dalam sejarah kesadaran pers Indonesia. Dalam wawancaranya, Andreas menuturkan:

“Waktu itu kami tahu Tempo kalah, tetapi langkah hukum yang mereka tempuh menjadi inspirasi bagi gelombang baru kesadaran di kalangan wartawan Indonesia. Kami mengenang bagaimana keputusan Tempo untuk menggugat pemerintah telah mengubah arah sejarah. Bagi generasi kami, gugatan Tempo bukan sekadar kasus hukum, melainkan pernyataan moral bahwa jurnalis bisa menjadi subjek yang melawan, bukan sekadar korban represi.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Kata-kata Andreas mencerminkan dampak moral yang jauh melampaui ruang sidang tempat Tempo memperjuangkan haknya. Perjuangan hukum yang ditempuh oleh redaksi Tempo memang secara formal berakhir di Mahkamah Agung dengan kekalahan, tetapi gema keberaniannya tidak pernah benar-benar padam. Ia terus bergema dalam ingatan dan kesadaran para jurnalis muda yang menyaksikan bagaimana sebuah media berani menantang kekuasaan yang selama puluhan tahun dianggap tidak tersentuh. Apa yang dilakukan Tempo membentuk suatu kesadaran kolektif baru di kalangan insan pers Indonesia: bahwa profesi wartawan bukan semata pekerjaan teknis untuk melaporkan fakta, tetapi merupakan panggilan moral untuk menjaga kebenaran dan keadilan, bahkan ketika keduanya berada di bawah ancaman.

Langkah Tempo menjadi simbol bahwa jurnalisme dapat mengambil posisi etis yang tegas menjadi penjaga nurani publik di tengah gelapnya dominasi kekuasaan negara. Kekalahan hukum yang dialami Tempo justru menjadi titik balik yang menandai kebangkitan moral dan intelektual pers Indonesia. Meskipun secara formal mereka gagal memenangkan gugatan, secara substansial Tempo telah memenangkan hati dan pikiran banyak orang. Dari keberanian mereka lahir semangat baru untuk menolak tunduk pada hegemoni negara dan menegaskan kembali independensi pers sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat sipil yang kritis.

4.1.3.2 Perlawanan Melalui Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Setelah perjuangan melalui jalur hukum tidak berhasil menembus tembok kekuasaan Orde Baru, para jurnalis Majalah Tempo bersama wartawan dari berbagai media memutuskan untuk mengambil langkah baru yang lebih terorganisasi dan berkelanjutan. Kekalahan di Mahkamah Agung bukan sekadar hasil akhir dari sebuah perkara hukum, melainkan tamparan keras yang menyadarkan mereka bahwa sistem keadilan di bawah rezim Soeharto hanyalah perpanjangan tangan kekuasaan. Di tengah kekecewaan dan rasa frustrasi, muncul kesadaran baru bahwa perjuangan membela kebebasan pers tidak bisa lagi hanya dilakukan melalui jalur formal negara, tetapi harus dibangun melalui solidaritas horizontal yaitu sebuah perlawanan yang lahir

dari hati nurani, dari keyakinan bahwa kebebasan menulis adalah bagian dari martabat manusia. Dari titik kesadaran itulah, perlahan tapi pasti, muncul gagasan untuk membangun kekuatan baru: sebuah organisasi yang bisa menjadi wadah bagi jurnalis independen yang menolak tunduk pada kekuasaan. Gagasan ini kemudian menjelma menjadi Aliansi Jurnalis Independen (AJI).



Gambar 4. 12. Deklarasi Sirnagalih

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono)

Pembentukan AJI tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari proses panjang sebuah perjalanan emosional dan ideologis yang berakar pada luka dan penghinaan kolektif yang dialami dunia pers Indonesia setelah pembredelan Tempo, Detik, dan Editor pada 21 Juni 1994. Ketika keputusan itu diumumkan, ratusan jurnalis mendadak kehilangan pekerjaan, idealisme, dan rumah intelektual mereka. Kantor-kantor redaksi yang dulu ramai dengan suara mesin tik berubah menjadi sunyi dan papan nama majalah diturunkan. Namun di balik keheningan itu, di dada para jurnalis, bergemuruh amarah yang dalam Andreas Harsono, salah satu jurnalis muda yang menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah, mengenang momen itu dengan mengatakan:

“Malam itu juga kami langsung berkumpul di kantor Jakarta Post. Ada Bambang Wisudo, Salomo Simanungkalit, Imran Hasibuan, Yosep Adi Prasetyo, dan Heru Hendratmoko. Kami tahu sesuatu yang besar telah terjadi, dan diam bukan pilihan. Malam itu kami sepakat: besok pagi harus turun ke jalan.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Ia kemudian menggambarkan suasana ruang kantor yang temaram. Di sana, mereka duduk melingkar, berbicara pelan namun dipenuhi tekad yang keras. Tak seorang pun menyebut tentang rasa takut, meski semuanya paham risiko yang membayangi penangkapan, intimidasi, bahkan kemungkinan mereka menghilang begitu saja. Di ruang kecil dan sederhana itu, di tengah hawa yang mencekam dan penuh ketidakpastian, justru tumbuh keberanian yang besar. Keputusan yang lahir malam itu bukan sekadar seruan untuk turun ke jalan, melainkan sebuah pernyataan moral dan politik: mereka menolak tunduk pada kekuasaan yang berupaya membungkam. Bagi mereka, diam adalah kekalahan; sementara berbicara, menulis, dan bergerak adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup baik sebagai jurnalis maupun sebagai manusia yang merdeka.

Keesokan harinya, 22 Juni 1994, jalanan Jakarta menjadi saksi keberanian yang jarang terlihat di masa Orde Baru. Ratusan wartawan, aktivis, dan seniman turun ke jalan di depan Gedung Departemen Penerangan. Namun, rezim Soeharto tidak mengenal kompromi. Aparat datang dengan pentungan, gas air mata, dan tameng baja. Demonstrasi dibubarkan secara brutal; teriakan berubah menjadi jeritan, solidaritas menjadi luka. Tetapi anehnya, dari kekerasan itu justru lahir tekad yang lebih kuat. Seperti bara yang ditiup angin, semangat melawan justru semakin menyala.

Dari peristiwa itu tumbuh kesadaran baru bahwa perlawanan terhadap represi tidak bisa lagi dilakukan secara spontan atau sendiri-sendiri, tetapi harus dibangun melalui kekuatan kolektif. Para jurnalis muda yang kecewa terhadap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah mulai menyusun bentuk perlawanan yang lebih terarah. Harapan untuk mendapatkan dukungan dari PWI pun kandas ketika mereka mengetahui bahwa organisasi tersebut justru berdiri di belakang langkah-langkah pemerintah. Andreas mengatakan:

“Kami waktu itu pergi ke kantor PWI, berharap akan ada dukungan, solidaritas, atau setidaknya pembelaan moral, tapi ternyata tidak. Mereka justru mendukung langkah pemerintah. Sofyan Lubis dari Pos Kota bahkan mengatakan bahwa pembredelan itu hal yang wajar. Di situ kami sadar, kalau organisasi resmi wartawan saja berpihak pada penguasa, maka kami tidak punya siapa-siapa lagi. Kami harus membela diri sendiri.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Pengekangan seperti itu bukan hal baru pada masa Orde Baru. Pemerintah sengaja menciptakan wadah tunggal untuk berbagai profesi, termasuk bagi wartawan dan pemilik media. Melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan Tahun 1984, PWI ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi resmi wartawan, sementara Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) menjadi wadah tunggal bagi pemilik media. Status sebagai organisasi tunggal membuat PWI memiliki kekuasaan besar termasuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin redaksi melalui mekanisme rekomendasi yang wajib dipenuhi (Manan dkk, 2014).

Kekecewaan itu berubah menjadi kemarahan yang produktif. Mereka mulai menyusun rencana untuk membentuk organisasi baru yang benar-benar independen dari pengaruh negara dan militer. Dalam berbagai pertemuan rahasia di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya, para wartawan berdiskusi hingga larut malam. Setiap kota memiliki semangatnya sendiri, tapi semuanya disatukan oleh satu keyakinan bahwa kebenaran tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Andreas mengatakan:

“Puncaknya terjadi pada 6–7 Agustus 1994 di Wisma Sirnagalih, Bogor. Suasannya sunyi dan dingin. Kami datang diam-diam, masih membawa trauma setelah penggerebekan aparat beberapa minggu sebelumnya, tetapi tetap hadir karena tahu keputusan yang akan diambil hari itu penuh risiko. Di ruang pertemuan yang sederhana, kami duduk melingkar, berusaha merumuskan sesuatu yang tidak lagi dapat dikendalikan oleh kekuasaan. Dari pertemuan itulah, akhirnya lahir Aliansi Jurnalis Independen.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).



Gambar 4. 13. Penandatanganan Deklarasi Sirnagalih pada 7 Agustus 1994

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono)

Deklarasi Sirnagalih akhirnya ditandatangani oleh 58 wartawan dan kolumnis yang berani mengambil sikap di tengah ketatnya kontrol Orde Baru. Sebenarnya total jurnalis dan kolumnis yang hadir di Sirnagalih saat itu mendekati 100 orang. Sebagian tidak sempat membubuhkan tanda tangan karena telah kembali bekerja, sementara yang lain masih bimbang menghadapi risiko politik yang besar. Namun, 58 nama yang tercantum dalam deklarasi itulah yang menjadi fondasi awal gerakan baru yaitu sebuah tonggak bersejarah yang menandai lahirnya komunitas jurnalis yang memilih berdiri di sisi independensi dan kebebasan pers. Andreas Harsono mengenang momen tersebut:

“Itu bukan sekadar pendirian sebuah organisasi. Malam itu bagi kami seperti mengucapkan sumpah. Kami tahu risikonya besar seperti diawasi, ditangkap, bahkan mungkin dipenjara. Tapi pada titik itu, rasa takut sudah kalah oleh keyakinan. Kami hanya berpegang pada satu hal: kalau negara bisa membungkam Tempo, maka kami harus menciptakan ruang baru untuk tetap bersuara. Dari ruang kecil di Sirnagalih itulah, semangat itu lahir untuk membela kebenaran, untuk tetap menulis, dan untuk tidak pernah tunduk lagi.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Deklarasi Sirnagalih

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan berpendapat, memperoleh informasi, dan kebebasan berserikat adalah hak asasi setiap warga negara.

Bahwa sejarah pere Indonesia berangkat dari pere perjuangan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta melawan kesewenang-wenangan.

Dalam melaksanakan misi perjuangannya, pere Indonesia menempatkan kepentingan dan keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Indonesia adalah negara hukum. Karena itu pere Indonesia melandaskan perjuangannya pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan bukan pada kekuasaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka kami menyatakan:

Menolak segala bentuk campur tangan, intimidasi, sensor dan pembredelan yang mengingkari kebebasan berpendapat dan hak warga negara memperoleh informasi

Menolak segala upaya mengeburkan semangat pere Indonesia sebagai pere perjuangan

Menolak pemaksaan informasi sepihak untuk kepentingan pribadi dan golongan, yang mengatasnamakan kepentingan bangsa

Menolak penyelewengan hukum dan produk-produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

Menolak wadah tunggal profesi wartawan

Memproklamasikan pendirian Aliansi Jurnalis Independen sebagai salah satu wadah perjuangan pere Indonesia.

Sirnagalih, 7 Agustus 1994

Ahmad Taufik (Bandung)	Ati Nurbaiti (Jakarta)
Andreas Harsono (Jakarta)	Ayu Utami (Jakarta)
Andrian T. Gesuri (Jakarta)	Bambang Harymurti (Jakarta)
Arief Budiman (Salatiga)	Bina Bektianti (Jakarta)
Aristides Katoppo (Jakarta)	Candra Negara (Surabaya)
Asikin (Bandung)	Christianto Wibisono (Jakarta)
	Dadang Rachmat HS (Jakarta)
	Dhia Prekasha Yodha (Jakarta)
	Didik Budiarta (Jakarta)
	Diah Purnomowati (Jakarta)
	Didik Supriyanto (Jakarta)
	Goenawan Mohamed (Jakarta)
	Happy Sulistiyadi (Bandung)
	Hasudungan Sirait (Jakarta)
	Heddy Lugito (Yogyakarta)
	Hendrajit (Jakarta)
	Ida Farida (Bandung)
	Idon Haryana (Jakarta)
	Imran Hasibuan (Jakarta)
	Indrawan (Jakarta)
	Jalil Hakim (Surabaya)
	Janoe Ariyanto (Jakarta)
	Keliek M. Nugroho (Surabaya)
	Lenah Susianty (Jakarta)
	Liston P. Siregar (Jakarta)
	M. Faried Cahyono (Yogyakarta)
	M. Thoriq (Yogyakarta)
	Fikri Jufti (Bandung)

M. Anis (Surabaya)
Moebance Moera (Surabaya)
Nuruddin Amin (Yogyakarta)
Putu Wirata (Surabaya)
Ragawa Indra Marti (Jakarta)
Rinny S. Dobby (Bandung)
Rustam Fachri Mandayun (Yogyakarta)
Rudy P. Singih (Jakarta)
Santoso (Jakarta)
Satrio Ariemunander (Jakarta)
T.J. Wibowo (Jakarta)
Yopie Hidayat (Jakarta)
Yopie Lemut (Jakarta)
Yosep Adi Prasetyo (Jakarta)
Zed Abidin (Surabaya)
JUS. SOEMA di PRADJA
BUDIMAN S. HARTOYO
YONIDA ROSITA
Wahyu Muryadi
TORIS HADAD
Saifulloh Yusuf
E. Djatut
Amira Jufti
Dwi Setyo Irawanto

Gambar 4. 14. Naskah Penandatanganan Deklarasi Sirnagalih

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono)

Dalam proses merumuskan identitas organisasi baru itu, sejumlah nama sempat diajukan. Delegasi dari Bandung, misalnya, mengusulkan nama “Serikat Wartawan Independen.” Namun gagasan tersebut kurang mendapat dukungan karena singkatan SAWI dianggap menggelikan dan menimbulkan kesan tidak serius, mengingat kata itu identik dengan nama sayur. Setelah

melalui perdebatan yang panjang dan mempertimbangkan berbagai usulan, peserta pertemuan akhirnya mencapai kesepakatan: organisasi tersebut akan diberi nama Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Menurut Satrio Arismunandar, kata “aliansi” diusulkan oleh Stanley Adhi Prasetyo sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengakuan terhadap komunitas-komunitas jurnalis yang telah lebih dulu terbentuk di berbagai daerah. Hal ini selaras dengan komposisi peserta pertemuan, yang sebagian besar merupakan perwakilan dari komunitas wartawan di empat kota: FOWI di Bandung, FDWY di Yogyakarta, SPC di Surabaya, dan SJI di Jakarta (Manan dkk, 2014).

Pemilihan kata “jurnalis” dilakukan karena dianggap lebih dekat dengan istilah asalnya dalam bahasa Inggris, sekaligus membedakan diri dari PWI yang telah menggunakan kata “wartawan.” Sementara itu, kata “independen” dipilih untuk menegaskan karakter dan posisi organisasi baru ini yaitu sebuah organisasi yang berdiri bebas dari campur tangan kekuasaan negara, berbeda jelas dari PWI yang menggunakan label “Indonesia.” Andreas mengatakan:

“Kami memilih kata Aliansi karena organisasi ini lahir dari gabungan banyak kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan. Mereka datang membawa semangat yang sama. Sementara kata Independen kami pilih karena yang mempersatukan kami bukan nasionalisme, bukan agama, melainkan sikap bebas terhadap segala bentuk kekuasaan: negara, militer, perusahaan, maupun ideologi. Kami ingin menegaskan satu hal bahwa jurnanisme sejati tidak boleh berlutut di hadapan siapa pun.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Dalam wawancara terpisah, Goenawan Mohamad mengenang peristiwa tersebut:

“Wartawan-wartawan muda waktu itu benar-benar berani. Mereka mendirikan organisasi baru di tengah situasi ketika pemerintah melarang semua bentuk perkumpulan independen. Itu bukan hanya tindakan nekat, tapi juga bentuk perlawanan nyata terhadap kekuasaan yang otoriter. Mereka tahu betul risikonya diawasi, ditangkap, bahkan dipenjara namun tetap maju tanpa ragu. Di situlah letak kekuatan moral mereka: keberanian yang lahir dari keyakinan bahwa kebebasan tidak boleh ditawar.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Tak lama setelah deklarasi sirnagalih, pemerintah segera merespons dengan represif. Organisasi itu dinyatakan ilegal, dan para pendirinya mulai menjadi sasaran pengawasan ketat. Aparat keamanan melakukan interogasi, penggeledahan, bahkan penangkapan terhadap beberapa jurnalis yang terlibat. Namun tak satu pun di antara mereka mundur. Mereka bertahan bukan karena yakin akan menang, melainkan karena percaya bahwa kebenaran harus diperjuangkan, bahkan ketika harapan terasa mustahil. Bagi mereka, AJI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan simbol keberanian moral dan bukti bahwa di tengah rezim yang membungkam, masih ada suara-suara kecil yang berani berkata tidak. Dari ruang kecil di Sirnagalih, semangat itu menjalar ke seluruh penjuru negeri, menjadi api kecil yang kelak menyulut gelombang besar kebebasan pers di Indonesia.

Beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan AJI selama masa pembredelan Tempo (1994–1998) antara lain:

1. Penerbitan Buletin Gerakan Bawah Tanah “Independen”

Salah satu bentuk konkret perlawanan yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) setelah pembredelan Tempo adalah dengan menerbitkan Buletin Independen, sebuah media alternatif yang lahir dari rahim perlawanan, dari luka kolektif para jurnalis yang dipaksa bungkam, namun menolak menyerah pada sunyi. Buletin ini tidak sekadar alat komunikasi; ia adalah simbol keberanian di tengah kegelapan, sejenis pernyataan keras bahwa kata-kata tidak bisa dibunuh, dan bahwa tinta, meskipun ditekan, akan selalu menemukan jalannya. Pada masa itu, setiap aktivitas jurnalistik di luar struktur resmi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dianggap ilegal, bahkan bisa dituduh label berbahaya yang sering berujung pada penangkapan, interogasi, dan penghilangan. Namun di tengah suasana mencekam itu, para jurnalis muda AJI justru menemukan makna baru dari profesi mereka. Mereka menulis bukan lagi demi berita, melainkan demi keberanian; bukan demi publikasi, tetapi demi kejujuran. Buletin Independen dicetak dengan cara sederhana menggunakan mesin stensil dan fotokopi seadanya tetapi nilai yang dikandung di dalamnya jauh melampaui bentuk fisiknya.

“Bagi para jurnalis muda yang tergabung dalam AJI, kerja jurnalistik saat itu menjadi ruang refleksi dan perlawanan. Menulis dipahami sebagai pilihan sikap, bukan sekadar rutinitas profesi. Di tengah tekanan dan pembatasan, mereka tetap memproduksi Buletin Independen dengan peralatan yang minim dan proses yang serba terbatas. Namun justru dari keterbatasan itulah lahir semangat kolektif, solidaritas, dan komitmen untuk mempertahankan integritas pers, sehingga isi buletin tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar produk cetak.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).



Gambar 4. 15. Sampul Buletin Independen Edisi Anti Pembredelan Juli 1994

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

Pada Juli 1994, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengedarkan sebuah buletin yang secara khusus merekam kondisi dunia pers Indonesia satu bulan setelah pembredelan media Tempo, Editor, dan DeTik oleh pemerintah Orde Baru. Dalam buletin ini, pembredelan tidak dipahami sebagai tindakan

administratif belaka, melainkan sebagai langkah politik yang disengaja untuk mengendalikan wacana publik dan membungkam kritik terhadap kekuasaan, terutama yang menyangkut praktik korupsi, militerisme, serta penyalahgunaan wewenang negara.

Pada bagian awal, buletin menguraikan latar belakang pembredelan dengan menyoroti peran Departemen Penerangan yang mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tanpa proses yang transparan dan adil. Tindakan tersebut diposisikan sebagai cerminan kuatnya kontrol negara atas kebebasan pers, yang sewaktu-waktu dapat dihentikan apabila dianggap mengganggu stabilitas versi pemerintah.



Gambar 4. 16. Buletin Independen Edisi Anti Pembredelan Juli 1994

Hal 2

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

Selanjutnya, buletin menyoroti dampak langsung pembredelan terhadap jurnalis dan pekerja media. Banyak wartawan kehilangan pekerjaan, ruang berekspresi, bahkan identitas profesionalnya. Namun, situasi ini justru melahirkan kesadaran kolektif baru bahwa praktik jurnalisme tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan media resmi, melainkan bertumpu pada komitmen moral untuk menyampaikan kebenaran dan melayani kepentingan publik.



Gambar 4. 17. Buletin Independen Edisi Anti Pembredelan Juli 1994 Hal 6

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

“Slogan itu sebenarnya menggambarkan kegelisahan kami saat itu. Negara justru memberi ruang luas pada tontonan yang tidak mendidik, sementara pers yang berusaha kritis malah dibungkam. Dari situ muncul kesadaran bersama di kalangan jurnalis bahwa kami tidak bisa

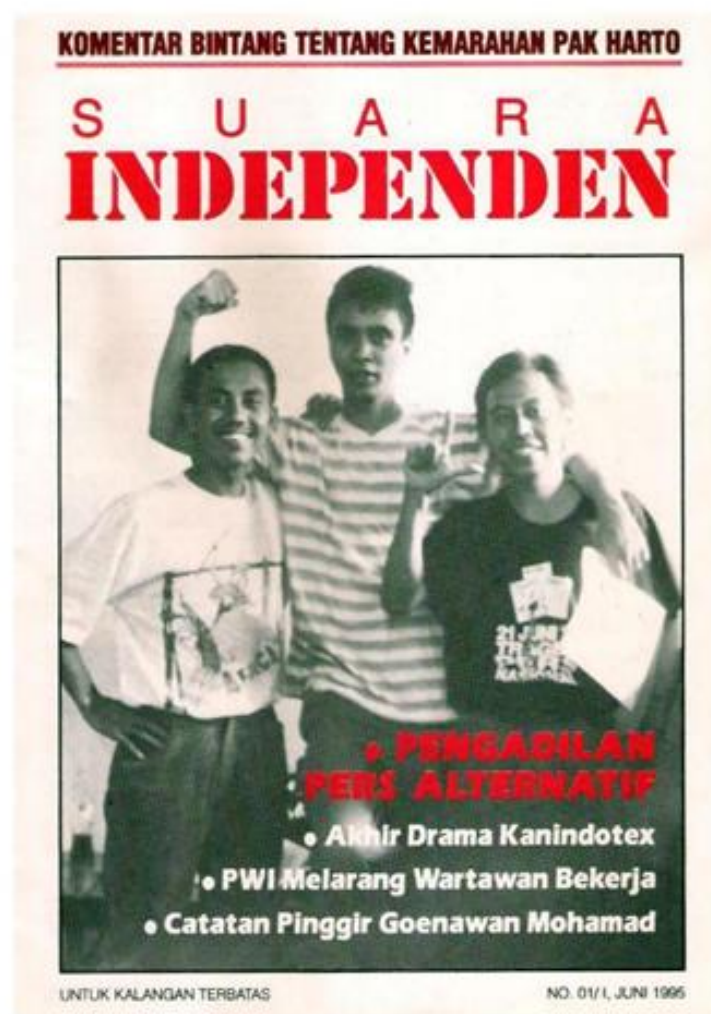
terus diam. Solidaritas pun tumbuh, dan AJI lahir sebagai bentuk sikap terbuka untuk melawan sistem pers yang dikendalikan kekuasaan, sekaligus sebagai upaya menjaga martabat jurnalisme agar tetap bebas, demokratis, dan bertanggung jawab.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Bagian penting lainnya dalam buletin ini ditandai oleh hadirnya slogan provokatif “film porno disuburkan, pers sehat dimandulkan”, yang berfungsi sebagai sindiran tajam terhadap paradoks kebijakan negara. Slogan tersebut menyoroti bagaimana produk hiburan bermutu rendah dibiarkan berkembang, sementara jurnalisme yang kritis dan sehat justru ditekan serta diberangus. Kondisi inilah yang kemudian mendorong tumbuhnya solidaritas dan semangat perlawanan di kalangan jurnalis, yang berujung pada lahirnya Aliansi Jurnalis Independen (AJI). AJI digambarkan sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap sistem pers yang berada di bawah kendali negara, sekaligus sebagai upaya kolektif untuk membangun praktik jurnalisme yang independen, demokratis, dan bertanggung jawab. Kehadiran AJI dipandang sebagai titik balik penting dalam sejarah pers Indonesia karena secara langsung menantang dominasi organisasi wartawan resmi yang selama ini tunduk pada kekuasaan.

Buletin ini juga mencatat pergeseran praktik jurnalistik pascapembredelan. Dalam iklim represif, para jurnalis mulai memanfaatkan media alternatif seperti buletin independen, selebaran, dan tulisan-tulisan bawah tanah yang diproduksi dengan teknologi sederhana mulai dari mesin stensil hingga fotokopi. Meski hadir dalam bentuk yang sangat terbatas, media-media ini memiliki nilai politik dan moral yang tinggi karena menjadi ruang kebebasan yang tersisa bagi ekspresi kritis. Pada bagian reflektif, buletin menegaskan bahwa pembredelan justru memperkuat kesadaran kritis di kalangan jurnalis dan masyarakat sipil.

Buletin itu lalu disebarakan melalui jalur-jalur bawah tanah: dibawa diam-diam oleh mahasiswa yang pulang ke daerah, dititipkan lewat jaringan LSM dan aktivis HAM, atau diselundupkan lewat amplop tanpa nama ke sekretariat organisasi mahasiswa. Di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya,

lembar-lembar Independen berpindah tangan dengan cepat kadang di warung kopi, kadang di kampus, kadang di ruang diskusi kecil di mana para intelektual muda berbicara dengan suara berbisik. Setiap eksemplar menjadi nyala kecil yang menantang kegelapan. Melalui jaringan ini, Independen menciptakan semacam arus informasi tandingan terhadap media arus utama yang tunduk pada sensor negara. Di saat koran-koran besar memilih diam, Independen berbicara dengan lantang, dengan bahasa yang jujur dan tanpa kompromi (AJI, 1994).



Gambar 4. 18. Sampul Buletin Independen Edisi Pengadilan Pers Alternatif Tanggal 1 Juni 1995

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

Pada Tahun 1995, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kembali mengedarkan sebuah buletin berjudul “Suara Independen”. Buletin ini mendokumentasikan sebuah inisiatif perlawanan simbolik yang digagas oleh jurnalis dan masyarakat sipil sebagai respons atas semakin memburuknya kondisi kebebasan pers di Indonesia pada masa Orde Baru. Pengadilan Pers Alternatif tidak dimaksudkan sebagai proses hukum formal, melainkan sebagai forum publik tandingan yang berfungsi untuk mengungkap, menilai, dan secara moral “mengadili” tindakan negara yang dinilai secara sistematis menindas pers serta membungkam kebebasan berekspresi.



**Gambar 4. 19. Buletin Independen Edisi Pengadilan Pers Alternatif
Tanggal 1 Juni 1995 Hal 3**

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

Pada bagian awal, buletin ini menguraikan latar belakang lahirnya Pengadilan Pers Alternatif yang berangkat dari kekecewaan mendalam terhadap sistem hukum resmi. Lembaga peradilan negara dipandang gagal memberikan keadilan bagi pers karena berada di bawah pengaruh dan kendali kekuasaan politik. Dalam situasi tersebut, jurnalis dan aktivis masyarakat sipil memandang perlu membangun sebuah ruang pengadilan tandingan yang berlandaskan legitimasi moral, suara publik, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia.



**Gambar 4. 20. Buletin Independen Edisi Pengadilan Pers Alternatif
Tanggal 1 Juni 1995 Hal 4**

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

“Buletin ini menguraikan gagasan Pengadilan Pers Alternatif, di mana negara ditempatkan seolah-olah sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Berbagai kebijakan seperti penutupan media, pencabutan izin, sensor, tekanan aparat, hingga pemidanaan wartawan dipersoalkan di ruang itu. Dalam kerangka ini, pers bersama masyarakat sipil mengambil posisi sebagai pemberi kesaksian sekaligus penilai etik, untuk menunjukkan sejauh mana negara telah merampas hak warga atas informasi dan kebebasan menyatakan pendapat.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Selanjutnya, buletin menjelaskan konsep dan mekanisme Pengadilan Pers Alternatif. Negara diposisikan sebagai pihak yang “didakwa” melalui berbagai kebijakan represif, seperti pembredelan media, pencabutan izin terbit, praktik sensor, intimidasi aparat, hingga kriminalisasi terhadap jurnalis. Sementara itu, pers dan masyarakat sipil berperan sebagai saksi sekaligus hakim moral yang menilai sejauh mana negara telah melanggar hak publik atas informasi dan kebebasan berpendapat.



**Gambar 4. 21. Buletin Independen Edisi Pengadilan Pers Alternatif
Tanggal 1 Juni 1995 Hal 9**

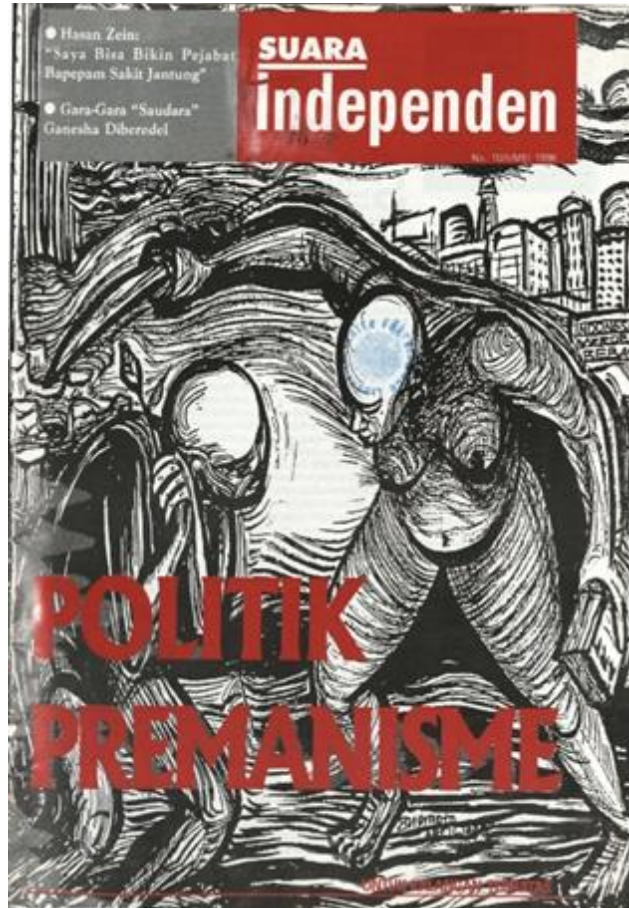
(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

Dalam buletin ini juga dimuat kritik internal terhadap organisasi wartawan resmi, khususnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Salah satu suara paling tegas datang dari wartawan senior Mochtar Lubis, yang menyatakan bahwa “PWI memang sudah keterlaluhan”. Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap PWI yang dinilai tidak lagi menjalankan peran sebagai pembela kebebasan pers, melainkan justru menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Kritik Mochtar Lubis menegaskan bahwa pembungkaman pers tidak hanya disebabkan oleh represi negara, tetapi juga diperkuat oleh sikap kompromistis organisasi profesi yang seharusnya melindungi wartawan.

“Di dalam buletin ini banyak suara yang muncul dari berbagai pihak, termasuk wartawan yang pernah dibungkam, pegiat HAM, dan pengamat media. Dari pengalaman mereka terlihat jelas bagaimana kebijakan negara membatasi kerja jurnalistik, memutus aliran informasi kritis ke publik, dan menciptakan suasana takut di ruang redaksi. Akibatnya, banyak jurnalis terpaksa melakukan penyensoran terhadap diri mereka sendiri demi menghindari risiko.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Buletin ini juga memuat paparan kesaksian serta argumentasi dari beragam kalangan, mulai dari jurnalis korban pembredelan, aktivis hak asasi manusia, hingga pengamat pers. Kesaksian-kesaksian tersebut menggambarkan secara konkret dampak kebijakan represif negara, antara lain hilangnya ruang kerja jurnalis, terputusnya akses masyarakat terhadap informasi yang kritis, serta tumbuhnya iklim ketakutan dan praktik sensor diri di lingkungan redaksi.

Lebih jauh, buletin ini menegaskan bahwa pers seharusnya menjalankan fungsi utama sebagai pengawas kekuasaan, bukan sebagai alat legitimasi negara. Ketika pers dibungkam, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh wartawan, tetapi juga oleh masyarakat luas yang kehilangan hak untuk mengetahui kebenaran dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam kerangka ini, Pengadilan Pers Alternatif diposisikan sebagai sarana pendidikan politik yang bertujuan membangun kesadaran publik akan pentingnya pers yang bebas, independen, dan berperan dalam kehidupan demokratis (AJI, 1995).



**Gambar 4. 22. Sampul Buletin Independen Edisi Politik Premanisme
Bulan Mei 1996**

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

Pada Tahun 1995, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kembali mengeluarkan sebuah buletin berjudul “Politik Premanisme” yang memotret menguatnya praktik kekerasan terorganisasi dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia pada masa Orde Baru. Buletin ini menyoroti bagaimana kekerasan tidak lagi hadir sebagai peristiwa sporadis, melainkan menjadi bagian dari pola kekuasaan yang bekerja secara sistematis. Premanisme dalam konteks ini tidak dipahami semata-mata sebagai tindakan kriminal individual, tetapi sebagai strategi politik yang dipelihara dan dimanfaatkan oleh negara untuk mengontrol masyarakat, membungkam kritik, serta menekan kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu stabilitas versi penguasa. Melalui analisis tersebut, buletin ini menegaskan bahwa praktik premanisme

berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang efektif, karena mampu menciptakan rasa takut tanpa harus melibatkan aparat negara secara langsung.



Gambar 4. 23. Buletin Independen Edisi Politik Premanisme Bulan Mei 1996 Hal 3

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

Pada bagian awal, buletin menjelaskan bahwa premanisme telah menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan. Kelompok preman kerap digunakan sebagai alat tidak resmi untuk melakukan intimidasi, teror, dan kekerasan, sehingga negara dapat menjaga jarak dari tanggung jawab hukum dan politik. Dalam praktiknya, premanisme berfungsi sebagai perpanjangan tangan aparat

keamanan, terutama dalam menghadapi gerakan buruh, mahasiswa, aktivis prodemokrasi, dan pers kritis.

“Sejak awal buletin ini menunjukkan bahwa praktik premanisme tidak berdiri sendiri, melainkan dilekatkan pada cara kerja kekuasaan. Kelompok-kelompok ini kerap dipakai untuk menekan dan menakut-nakuti, sehingga negara seolah tidak terlibat langsung. Pada kenyataannya, mereka berfungsi sebagai kepanjangan tangan aparat, terutama ketika menghadapi buruh, mahasiswa, aktivis pro-demokrasi, dan media yang bersikap kritis.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Buletin ini menegaskan bahwa premanisme berkaitan erat dengan aparat negara, di mana kekerasan kerap dijalankan melalui kelompok sipil bayaran dengan pemberian atau perlindungan penguasa, sehingga menebarkan ketakutan sekaligus merusak prinsip negara hukum karena tanggung jawab kekuasaan menjadi kabur.



Gambar 4. 24. Buletin Independen Edisi Politik Premanisme Bulan Mei 1996 Hal 4 & 5

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

“Buletin ini menampilkan kisah nyata korban kekerasan negara, terutama mahasiswa, seperti peristiwa di UMI Makassar yang menelan korban jiwa. Dari kesaksian keluarga korban terlihat bahwa aparat justru menjadi pelaku, sementara negara tidak pernah sungguh-sungguh dimintai pertanggungjawaban. Foto jenazah yang dimuat menjadi penegasan visual bahwa kekerasan negara bukan abstraksi, melainkan meninggalkan luka nyata yang tidak bisa ditutup oleh narasi resmi.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Selain membongkar relasi struktural tersebut, buletin ini menghadirkan wajah konkret kekerasan negara melalui kisah-kisah korban sipil, terutama mahasiswa. Laporan mengenai penyerangan terhadap mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar, yang berujung pada kematian, memperlihatkan bagaimana aparat keamanan bukan sekadar gagal menjalankan fungsi perlindungan, tetapi justru menjadi aktor utama dalam eskalasi kekerasan. Kesaksian keluarga korban, khususnya pernyataan ayah korban yang mempertanyakan tanggung jawab negara, semakin menegaskan bahwa kekerasan tersebut berlangsung dalam iklim impunitas, di mana pelaku tidak pernah benar-benar dimintai pertanggungjawaban.

Foto jenazah mahasiswa yang dimuat dalam buletin berfungsi sebagai bukti visual sekaligus simbol kebrutalan kekuasaan. Gambar tersebut tidak hanya merekam tragedi personal, tetapi juga menyampaikan pesan politis bahwa represi negara meninggalkan jejak nyata pada tubuh manusia. Dengan menampilkan korban secara frontal, buletin ini secara sadar menolak normalisasi kekerasan serta menantang narasi resmi negara yang kerap mereduksi kematian menjadi sekadar “kecelakaan” atau “insiden”.



Gambar 4. 25. Buletin Independen Edisi Politik Premanisme Bulan Mei 1996 Hal 11

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

Selain kasus kekerasan terhadap mahasiswa, buletin ini juga menyoroti secara tajam kasus pembunuhan buruh perempuan Marsinah yang hingga bertahun-tahun kemudian tidak menemukan kejelasan hukum. Judul “Nasib Marsinah Kian Tak Jelas” menegaskan kegagalan negara dalam menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa buruh. Buletin memaparkan bahwa meskipun telah berlalu tiga tahun sejak kematian Marsinah, aparat penegak hukum tidak menunjukkan kemajuan berarti dalam mengungkap pelaku maupun aktor intelektual di balik pembunuhan tersebut. Situasi ini mencerminkan lemahnya komitmen negara terhadap keadilan, terutama ketika korban berasal dari kelompok sosial yang rentan.

Laporan demonstrasi buruh yang menuntut kejelasan kasus Marsinah sekaligus memperlihatkan bahwa pembunuhan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan konflik perburuhan dan tuntutan upah minimum. Marsinah diposisikan sebagai simbol perlawanan buruh terhadap kebijakan upah murah dan praktik industrial yang menindas. Dalam konteks ini, pembunuhan Marsinah dibaca sebagai pesan kekerasan yang ditujukan tidak hanya kepada individu, tetapi kepada seluruh gerakan buruh agar menghentikan tuntutan mereka.

Ilustrasi tubuh perempuan yang tergeletak dalam buletin berfungsi sebagai representasi visual penderitaan buruh yang ditindas oleh kekuasaan ekonomi dan politik. Gambar tersebut tidak sekadar mengilustrasikan kematian Marsinah, tetapi juga melambangkan nasib buruh yang terhimpit, dibungkam, dan dikorbankan demi stabilitas industri. Visual ini memperkuat pesan bahwa tubuh buruh terutama buruh perempuan menjadi medan kekerasan struktural yang jarang mendapatkan pembelaan hukum.

Buletin ini juga menyingkap adanya dualisme peran aparat negara, di mana negara tampil represif dalam menghadapi demonstrasi buruh, namun pasif dan abai ketika dituntut mengusut pembunuhan. Kegagalan pengungkapan kasus Marsinah, sebagaimana kasus-kasus kekerasan lainnya, memperlihatkan pola impunitas yang sistematis. Aparat digambarkan lebih berfungsi menjaga kepentingan modal dan stabilitas politik ketimbang melindungi hak hidup dan keadilan bagi warga negara.

Lebih jauh, buletin ini mengkritik pola pengaburan tanggung jawab oleh aparat, di mana tindakan kekerasan dibenarkan melalui versi resmi yang bertentangan dengan temuan lembaga bantuan hukum dan hasil investigasi independen. Kesenjangan antara keterangan aparat dan fakta di lapangan mengindikasikan adanya manipulasi informasi. Dalam konteks inilah premanisme baik yang berseragam maupun tidak diposisikan sebagai instrumen kekuasaan untuk menjalankan kekerasan tanpa harus tunduk pada mekanisme akuntabilitas hukum.

TOPIK UTAMA

Roekmini Koesoema Astoeti, Anggota Komnas HAM: direpotkan dengan titipan politik.

"Menggunakan Preman, Justru Mengkeroposkan Sistem"

Kekerasan politik, apalagi dengan menggunakan preman, tidak akan mampu menghempang arus perubahan. Malah sebaliknya, ia justru akan mempercepat pengkeroposan sistem politik yang anti-demokrasi. "Cara-cara itu jelas bertentangan dengan filsafat Pancasila," kata Brigjen (Pol) Purn. Roekmini Koesoema Astoeti.

Anggota Komnas HAM yang satu ini sangat menyesalkan pendekatan represif yang dijalankan aparat keamanan dalam menghadapi gerakan pro-demokrasi. Bagaimana jelasnya pendapat Roekmini mengenai gejala premanisme politik, berikut wawancara Suara INDEPENDEN dengan mantan anggota Fraksi ABRI DPR yang dikenal vokal menyuarakan aspirasinya:

Kekerasan politik dengan menggunakan preman sudah menjadi pola yang sistematis. Bagaimana menurut Anda?

Harus diakui kenyataan itu memang ada dan menyedihkan. Penggunaan preman dan tandingan-tandingan itu berasal dari konsep yang mengembangkan konflik. Ini bertentangan dengan musyawarah mufakat. Potensi konflik yang harusnya di-eliminir, justru dikembangkan. Pertama, dilihat dari segi hukum tidak konsisten, tidak konsekuen dan akan mempengaruhi *law enforcement*. Itu akan merusak sistem pembinaan hukum. Kedua, dilihat dari filsafat jelas bertentangan dengan filsafat Pancasila. Ketiga, dilihat dari politik itu mengkeroposkan sistem politik, lambat atau cepat. Saya terpaksa melihatnya dengan amat serius, karena konsep itu dikembangkan dengan sengaja untuk mengamankan kepentingan politik sesaat. Saya melihat dari perilaku politik saja, saya tak tahu siapa yang mengembangkan. Itu kan bisa dilihat, polanya sama.

ABRI sendiri kurang bertindak cepat atau mungkin ada kerja-sama dibalik itu?

Itu sulit untuk dijawab, karena sudah memasuki wilayah rawan yang saya tidak tahu. Kalau saya jawab, saya khawatir salah. Tapi saya melihat sikap mendua dari kamtibmas yang seharusnya bertindak. Atau ada semacam keengganan yang saya lihat. Mudah-mudahan pengamatan saya salah, tapi saya melihat itu. Tidak seperti ketika menangani perampokan Hero Supermarket. Jadi aparat kamtibmas kalau sudah memasuki wilayah politik menjadi ragu-ragu. Saya bisa mengerti mereka tak semuanya ngerti politik atau karena polisi itu sering

lasi menjadi kelihatan bodoh begitu.

Ada perintah dari atas?

Lha saya tidak tahu. Yang saya lihat memang selama ini benar begitu. Saya sendiri pengalaman jadi polisi, jadi saya juga tahu. Dan itu membuat polisi kerepotan.

Faktor-faktor apa yang membuat polisi punya kendala itu?

Ya faktor eksternal, bukan faktor internal kepolisian. Polisi itu sendiri sebenarnya mampu menjaga keamanan termasuk untuk soal politik sebenarnya. Tapi karena faktor eksternal, ya titipan politisi itu tadi.

Bisa cerita pengalaman titipan politisi tadi?

Ndak. Ndak bisa cerita. Titipan-titipan politik itu terutama kan meningkat akhir-akhir ini. Karena adanya konflik kepentingan.

Ada hubungannya dengan Pemilu 1997?

Saya kira ada benarnya. Kalau mau lebih netral melihat, ada konflik antara kekuatan pembaharuan dan kekuatan *status quo*. Kepentingan pembaharuan ini menghendaki adanya perubahan, karena kalau tidak, akan ada kerusakan sistem dari dalam. Dan orang-orang yang kritis tahu itu. Tapi bagi kekuatan *status quo*, perubahan itu dianggap berbahaya atau riskan. Tapi sebenarnya yang dilupakan kekuatan *status quo*, bahwa itu adalah proses pembusukan politik. Dan saya melihat itu sekarang sudah mulai menggejala.

Dampak penggunaan preman dalam politik bagi masyarakat?

Ya keresahan yang makin meluas sehingga mudah sekali dipicu sedikit saja sudah berkobar. Ada semacam frustrasi yang sudah sangat meluas. Ini diabaikan. Tuntutan ini diabaikan oleh aparat pelaksana sistem.

Seharusnya dilakukan aparat?

Tidak cuma aparat. Kita semua berkepentingan dengan persoalan preman ini: apakah pelaksana sistem atau masyarakat biasa, baik yang ada di supra maupun di infrastruktur politik. Kita semua berkepentingan terhadap

lestariannya sistem yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Dan kalau kita mau menjaga kelestarian sistem adalah sangat salah jika menggunakan pendekatan keamanan. Kita mestinya menjaga sistem dengan membuatnya berkemampuan. Oleh sebab itu harus mampu mengakomodasikan kebutuhan jaman. Contohnya, mengakomodasi tuntutan rakyat. Cara merespon sistem itu ada tiga: satu mengakomodasikan, kedua mengabaikan, ketiga menekan. Kalau kita mempertahankan *status quo* itu berarti mengabaikan dan menekan yang diutamakan. Akibatnya frustrasi meluas, timbul *agresivitas*.



Roekmini K. Astoeti

SUARA Independen No. 10/11/MEI 1996

HALAMAN 25

Gambar 4. 26. Buletin Independen Edisi Politik Premanisme Bulan Mei 1996 Hal 25

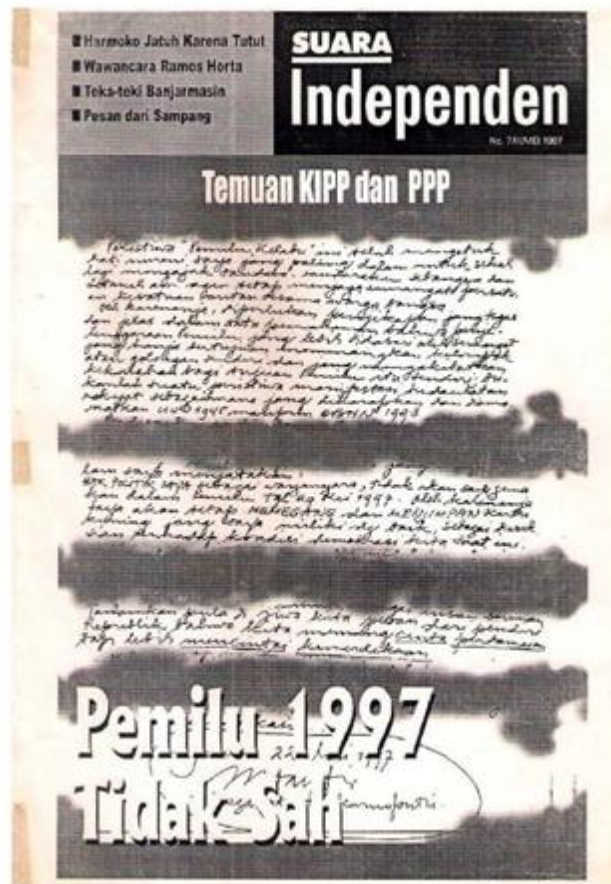
(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

Buletin ini semakin menegaskan kritiknya terhadap praktik premanisme negara melalui wawancara dengan Roekmini Koesoema Astuti, anggota Komnas HAM. Dalam laporan tersebut, penggunaan preman dalam penanganan konflik politik dipandang bukan sebagai solusi keamanan, melainkan sebagai strategi yang justru merusak fondasi sistem politik dan hukum. Premanisme diposisikan sebagai jalan pintas kekuasaan yang menghindari mekanisme hukum formal, sehingga secara perlahan memperlemah prinsip negara hukum, demokrasi, dan akuntabilitas institusi

negara. Roekmini menekankan bahwa kekerasan politik yang melibatkan preman tidak akan mampu meredam perubahan sosial, tetapi justru memperparah krisis legitimasi negara. Ketika aparat keamanan menyerahkan fungsi penegakan hukum kepada aktor non-negara, negara kehilangan otoritas moral dan hukum. Dalam konteks ini, premanisme tidak lagi berdiri di luar sistem, melainkan menjadi bagian dari cara kerja kekuasaan itu sendiri. Akibatnya, batas antara legal dan ilegal menjadi kabur, sementara tanggung jawab negara semakin sulit ditelusuri.

Buletin ini juga mengaitkan penggunaan preman dengan kerusakan internal institusi keamanan, khususnya kepolisian. Ketergantungan pada kekuatan informal dinilai mencerminkan lemahnya profesionalisme aparat dan kegagalan reformasi institusional. Aparat tidak hanya kehilangan kemampuan mengelola konflik secara hukum dan demokratis, tetapi juga terjebak dalam praktik kekerasan yang kontraproduktif terhadap stabilitas jangka panjang.

Foto Roekmini yang ditampilkan dalam buletin berfungsi sebagai penegasan otoritas moral atas kritik yang disampaikan. Kehadiran figur Komnas HAM memperkuat legitimasi argumen bahwa penolakan terhadap premanisme bukan sekadar sikap oposisi politik, melainkan bagian dari upaya menjaga nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Dengan menempatkan suara Komnas HAM, buletin menegaskan bahwa kritik terhadap negara datang dari dalam sistem demokrasi itu sendiri (AJI, 1996).



Gambar 4. 27. Sampul Buletin Independen Edisi Pemilu 1997 Tidak Sah Bulan Mei 1997

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

Edisi demi edisi hadir seperti napas perlawanan yang menolak padam. Salah satu yang paling terkenal adalah edisi Mei 1997 bertajuk Pemilu 1997 Tidak Sah, yang secara berani menggugat legitimasi politik Orde Baru. Di tengah atmosfer ketakutan, ketika satu kalimat bisa dianggap makar, AJI menulis dengan terang: bahwa demokrasi yang dikontrol dari atas bukanlah demokrasi, melainkan sandiwara kekuasaan. Andreas Harsono menyebut edisi itu sebagai “bom moral” bukan karena menghancurkan, tetapi karena membangunkan kesadaran yang telah lama ditidurkan oleh propaganda negara. Namun, yang membuat Independen begitu penting bukan hanya isinya, melainkan semangat di baliknya. Ia menjadi simbol lahirnya kesadaran baru di kalangan jurnalis Indonesia bahwa profesi kewartawanan

adalah panggilan moral, bukan sekadar pekerjaan. Dalam wawancara yang sama, Andreas Harsono berkata:

“Waktu itu kami sadar, kami bukan lagi sekadar wartawan. Kami adalah warga yang menolak dibohongi.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Kalimat tersebut mencerminkan kesadaran moral yang lahir dari pengalaman represi, bahwa menjadi wartawan di era Orde Baru bukan sekadar profesi, melainkan tindakan keberanian untuk mempertahankan kebenaran sebagai hak rakyat, bukan monopoli negara.



Gambar 4. 28. Buletin Independen Edisi Pemilu 1997 Tidak Sah Bulan Mei 1997 Hal 2

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

Buletin ini dibuka dengan sebuah pernyataan politik yang tegas dan tidak kompromistis: Pemilu 1997 dinyatakan tidak sah. Ketidakabsahan tersebut tidak hanya dilihat dari aspek teknis pemungutan suara, melainkan dari keseluruhan proses politik yang melatarinya. Sejak tahap persiapan, pemilu telah dikuasai oleh rezim Orde Baru dan diarahkan untuk memastikan kemenangan Golkar sebagai kendaraan politik utama kekuasaan. Dengan demikian, pemilu tidak lagi menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat, melainkan sekadar formalitas prosedural untuk mengukuhkan kekuasaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Buletin menegaskan bahwa sebuah pemilu tidak dapat disebut sah apabila rakyat tidak diberi kebebasan sejati untuk menentukan pilihan politiknya.

Dalam buletin ini, ketidakabsahan Pemilu 1997 dijabarkan melalui berbagai praktik penyimpangan yang terjadi secara sistematis. Negara tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai aktor politik yang aktif memenangkan Golkar. Aparat pemerintah, dari tingkat pusat hingga desa, digerakkan untuk mengarahkan pilihan rakyat. Tekanan psikologis, intimidasi, hingga ancaman ekonomi menjadi bagian dari keseharian warga menjelang pemilu. Situasi ini diperparah oleh tidak adanya ruang kebebasan berpendapat yang memadai. Kritik terhadap pemilu dipandang sebagai tindakan subversif, sehingga rakyat dipaksa memilih dalam suasana takut. Dalam kondisi demikian, pemilu kehilangan makna demokratisnya karena pilihan politik tidak lahir dari kehendak bebas.

Goenawan Mohamad, tokoh yang menjadi sumber inspirasi moral sekaligus panutan dalam perlawanan jurnalisme Indonesia, berkata:

“Kalau melihat Pemilu 1997, sulit menyebutnya sebagai proses yang jujur. Negara tidak berdiri netral, justru terlibat langsung mengarahkan kemenangan satu kekuatan politik. Aparat hingga level paling bawah ikut mengondisikan pilihan warga. Banyak orang memilih bukan karena keyakinan, melainkan karena rasa takut ditekan, diintimidasi, bahkan kehilangan penghidupan. Di saat yang sama, suara kritis dibungkam dan dianggap ancaman. Dalam situasi seperti itu, pemilu jelas kehilangan ruh demokrasi karena rakyat tidak benar-benar bebas menentukan sikap politiknya.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).



**Gambar 4. 29. Buletin Independen Edisi Pemilu 1997 Tidak Sah Bulan
Mei 1997 Hal 5**

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

Buletin secara tajam mengkritik keterlibatan aparat negara dalam proses pemilu. ABRI, yang seharusnya bersikap netral, justru berfungsi sebagai alat pengamanan sekaligus pengendali politik. Pegawai negeri sipil diwajibkan menunjukkan loyalitas politik kepada Golkar, baik secara terbuka maupun terselubung. Netralitas birokrasi dihapuskan, digantikan oleh kepatuhan struktural terhadap perintah penguasa. Negara dalam konteks ini tidak berdiri di atas semua golongan, tetapi berubah menjadi instrumen kekuasaan yang memaksa rakyat mengikuti kehendak rezim. Buletin menilai bahwa ketika

negara tidak netral, maka hukum dan institusi demokrasi kehilangan legitimasi moral.

MEDIA

Media dan Konflik Etnik

Di banyak negeri, media massa diperalat kekuatan politik untuk menyebarkan kebencian antar etnik. Akibatnya, prasangka meruncing dan perang berkepanjangan. Saatnya, awak media belajar menumbuhkan toleransi.

Di neraka, konon suatu hari, Adolf Hitler bertemu Zlobodan Milanovic, pemimpin Serbia yang membakar perang antar etnik di negerinya. Milanovic berkata, "Kalau saya punya angkatan perang sekuat yang Anda miliki, maka saya akan raih kemenangan dengan mudah." Hitler, pemimpin NAZI itu, menyahut, "Sebaliknya, kalau saya mengontrol dan bisa menyetr media massa seperti yang Anda lakukan di Serbia, saya akan kuasai Eropa dengan mudah."

Percakapan itu, tentu saja hanya rekaan. Mehmed Halilovic, jurnalis asal Bosnia, menceritakan lelucon itu, kepada peserta seminar International Federation of Journalists (IFJ), di Bilbao, Spanyol, awal Mei lalu. Namun, ia sendiri bercerita hampir tanpa ekspresi. Wajahnya dingin, menutupi kegalauan tentang media massa di negerinya yang disalahgunakan untuk membangkitkan pertentangan antar etnik.

"Mereka yang bersembunyi di belakang pena, untuk menimbulkan pertentangan dan saling bunuh, sesungguhnya lebih kejam dari mereka yang secara langsung mengunyah senjata untuk membunuh. Karena para penyebar permusuhan itu, tak menanggung risiko apapun," kata Mehmed. Pemimpin Redaksi *Ostobodenje* itu, dalam peringatan hari kemerdekaan pers sedunia, memperoleh penghargaan "Rob Bakker Memorial", karena jasanya dalam mengembangkan pers yang independen dan toleran di Bosnia.

Dan, keblingeran media, bukan hanya terjadi di Bosnia. Itulah sebabnya, IFJ menggelar seminar bertema *Prime Time for Tolerance: Journalism and the Challenge of Racism*, yang dihadiri utusan jurnalis dari 70 negara. Lebih dari 100 orang hadir dalam seminar tiga hari, 2-4 Mei, yang juga disponsori UNESCO itu. Dari Indonesia,

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), hadir sebagai wakil. Goenawan Mohamad, bekas Pemimpin Redaksi *Tempo* yang tampil sebagai pembicara, menyorel suasana intoleran di Indonesia. Ia menyebut tentang kerusuhan etnis di tanah air beberapa bulan lalu, yang di Kalimantan Barat menewaskan sekitar 2.000 orang. Juga suasana intoleran terhadap pengelola media, seperti yang pernah menimpa Arswendo Atmowiloto, bekas Pemred *Monitor*.

Suasana intoleran, yang menempatkan jurnalis dalam situasi terjepit, paling terasa di Aljazair. Jurnalis di negeri itu, menghadapi dua kekuatan yang tak kompromi—pemerintah militer dan partai Islam (FIS). Setiap jurnalis yang mencoba independen dari dua kekuatan itu, menghadapi risiko kehilangan nyawanya. Hampir 100 jurnalis telah tewas dalam konflik berkepanjangan di Aljazair itu. Banyak jurnalis yang independen, terpaksa angkat kaki dari Aljazair dan menerbitkan media mereka dari luar negeri.

Tahun 1997, agaknya dicermati sebagai tahun meningkatnya ketegangan antar etnis di Eropa. Tak kurang dari Perlemen Eropa, yang menyerukan tahun ini sebagai tahun Anti Rasisme. Muncul dan menguatnya kekuatan ultra kanan, seperti Le Pen di Perancis, Skin Head di banyak kota besar Eropa, menakutkan sebagian besar penduduk akan gejala rasisme. "Rasisme menggerogoti masyarakat kita, menimbulkan ketidakamanan dan ketakutan," kata Padraig Flynn, anggota Komisi Masyarakat Eropa.

Flynn berpendapat media massa dapat berperan positif dalam meredakan ketegangan antar etnik dan menumbuhkan suasana toleran. "Kekuatan media massa tak bisa dianggap sepele. Anda mestinya menggunakan kekuatan itu untuk memerangi rasisme," katanya.

Setelah lebih dari setengah abad Perang Dunia II berakhir, kata Leuprecht, keganasan dan suasana intoleran berkembang lagi di Eropa. Beberapa negeri mencatat rekor kejahatan terhadap ras, pembunuhan, beberapa lainnya ditandai dengan menguatnya nasionalisme dan persekusi terhadap kalangan minoritas. "Beberapa negeri malah mencatat pembunuhan-pembunuhan atas nama pembersihan etnik," kata Leuprecht.

Indonesia, memang tak terpisah itu. Tapi, potensi untuk pertentangan etnis begitu besar, apalagi bila dikipasi oleh media massa yang keblinger. Misalnya, saat Budiman Soedjatmiko dkk, aktivis PRD, ditangkap, harian *Republika* membuat insinuas, seolah para buron itu dilindungi oleh jaringan gereja Katolik. Dalam ekspose tentang Sandiawan dan Institut Sosial Jakarta (ISJ), misalnya, dikatakan bahwa aktivis kelompok itu tetap berkegiatan meskipun tetangganya sedang ibadah sholat Jum'at. Ilustrasi itu, agaknya ingin menegaskan pesan bahwa Budiman dkk dilindungi oleh kelompok non-Islam. "Insinuasii begini sangat berbahaya," kata seorang praktisi pers.

Dalam bentuk yang lebih keras, pemberitaan yang menyebarkan suasana intoleran itu, barangkali dapat ditemukan dalam terbitan semacam *Media Dakwah*, atau jurnal-jurnal intern gereja yang eksklusif. Ketika, pemerintah sering mengungkapkan bahaya SARA, anehnya media-media intoleran itu dibiarkan tumbuh. Para jurnalis hendaknya kembali pada standar profesi dan etik, yang memandang tumbuhnya media yang independen. Bukan media yang menyebarkan prasangka. □



Jurnalis Aljazair: Terjepit di tengah sengket

Halaman - 8

Suara INDEPENDEN 7/III/MEI 1997

Gambar 4. 30. Buletin Independen Edisi Pemilu 1997 Tidak Sah Bulan Mei 1997 Hal 8

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

Halaman buletin ini mengangkat persoalan krusial tentang hubungan antara media massa dan konflik etnik, dengan menempatkan media bukan sebagai aktor netral, melainkan sebagai kekuatan sosial-politik yang dapat menentukan arah sebuah konflik. Sejak awal tulisan ditegaskan bahwa di banyak negara, media kerap diperalat oleh kekuatan politik untuk

menyebarkan kebencian antarkelompok. Dalam situasi seperti ini, media tidak lagi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi yang mencerahkan, melainkan menjadi alat propaganda yang menajamkan prasangka, memperkuat stereotip, dan pada akhirnya mendorong kekerasan yang berlarut-larut. Karena itu, tulisan ini mengajukan pertanyaan moral yang penting: apakah media akan terus menjadi bagian dari masalah, atau justru mengambil peran sebagai penumbuh toleransi dan perdamaian.

Untuk memperjelas argumennya, buletin ini mengulas konflik etnik di Bosnia sebagai contoh nyata. Dalam konflik tersebut, media massa memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi publik berdasarkan identitas etnis. Media tertentu secara sadar membangun narasi yang memecah masyarakat ke dalam kategori “kami” dan “mereka”, sehingga kekerasan terhadap kelompok lain dianggap wajar, bahkan perlu. Informasi tidak lagi disajikan secara berimbang, melainkan dipelintir untuk membakar emosi kolektif. Akibatnya, media berubah menjadi instrumen perang psikologis yang menyuburkan kebencian dan memperpanjang konflik. Dalam konteks ini, buletin menunjukkan bahwa kekerasan etnik tidak hanya lahir dari perbedaan identitas, tetapi juga dari cara identitas tersebut direpresentasikan dan dimanipulasi oleh media.

Tulisan ini kemudian menyoroti posisi jurnalis yang bekerja di tengah konflik. Menjadi wartawan di wilayah konflik bukan hanya persoalan profesionalisme, tetapi juga menyangkut keselamatan nyawa. Buletin menyinggung pengalaman jurnalis di Aljazair, di mana konflik politik dan agama menjadikan jurnalisme sebagai profesi yang sangat berbahaya. Wartawan yang berusaha melaporkan peristiwa secara independen sering kali menjadi sasaran ancaman, kekerasan, bahkan pembunuhan. Dalam situasi demikian, tekanan tidak hanya datang dari negara, tetapi juga dari kelompok bersenjata dan aktor non-negara. Jurnalis dipaksa memilih antara bertahan hidup atau mempertahankan integritas profesi.

Di tengah kondisi represif tersebut, buletin memberikan kritik keras terhadap media yang gagal menjaga prinsip etika jurnalistik. Media yang menggunakan bahasa provokatif, melakukan generalisasi terhadap kelompok etnis atau agama, serta mengabaikan verifikasi dianggap turut bertanggung jawab atas eskalasi konflik. Ketika media mengulang narasi kebencian tanpa kritik, media bukan lagi cermin realitas, melainkan mesin produksi prasangka. Buletin menegaskan bahwa kebebasan pers tanpa tanggung jawab justru dapat menjadi ancaman serius bagi kehidupan bersama dalam masyarakat multietnis.

Buletin ini juga menampilkan contoh jurnalisme independen di Bosnia yang tetap menjunjung toleransi di tengah perang, bahkan mendapat pengakuan internasional seperti penghargaan Rob Baker Memorial, sebagai bukti bahwa jurnalisme beretika dan berpihak pada kemanusiaan tetap dapat dijalankan dalam situasi paling sulit.



Gambar 4. 31. Buletin Independen Edisi Pemilu 1997 Tidak Sah Bulan Mei 1997 Hal 14

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono dan Abdul Manan)

Halaman buletin ini memuat kritik keras terhadap Pemilu 1997, yang digambarkan sebagai produk dari sebuah rezim yang telah kehilangan rasionalitas politik dan legitimasi moral. Sejak judulnya, buletin ini menegaskan bahwa pemilu tersebut sama sekali tidak memiliki kredibilitas. Ketidakpercayaan publik bukanlah hasil provokasi sesaat, melainkan akumulasi dari pengalaman panjang represi, manipulasi, dan kekerasan negara. Pemilu dipotret bukan sebagai mekanisme demokrasi, tetapi sebagai ekspresi kepanikan kekuasaan yang berusaha mempertahankan diri dengan segala cara. Tulisan ini membuka dengan menggambarkan suasana menjelang Pemilu 1997 yang penuh kecemasan dan penolakan. Di berbagai daerah, rakyat melakukan aksi golput sebagai bentuk penegasan bahwa mereka tidak lagi percaya pada keabsahan pemilu. Ketidakpercayaan ini muncul karena pemilu dijalankan dalam kondisi yang sama sekali tidak adil. Negara, melalui aparatnya, tidak bersikap netral, melainkan secara terang-terangan memihak Golkar. Presiden Soeharto disebut terus-menerus menyerukan stabilitas dan pembangunan, tetapi dalam praktiknya justru mengorbankan kebebasan politik rakyat.

Buletin kemudian mengurai bagaimana militer dan aparat keamanan memainkan peran sentral dalam mengamankan kemenangan rezim. ABRI tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai aktor politik yang aktif menekan masyarakat. Kekerasan, intimidasi, dan ancaman menjadi instrumen yang dilegitimasi atas nama stabilitas nasional. Situasi ini menciptakan ketakutan massal, di mana rakyat dipaksa memilih bukan berdasarkan keyakinan politik, melainkan demi keselamatan diri dan keluarga. Dalam konteks ini, pemilu kehilangan maknanya sebagai sarana ekspresi kehendak rakyat. Tulisan tersebut juga menyoroti berbagai pernyataan pejabat negara yang justru memperlihatkan wajah otoritarianisme rezim. Kritik dari luar negeri, termasuk dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, ditanggapi secara defensif dan arogan. Pemerintah menolak campur tangan asing, tetapi di saat yang sama menutup mata terhadap pelanggaran demokrasi yang terjadi di dalam negeri. Buletin menilai bahwa sikap ini

mencerminkan rezim yang terisolasi secara moral dan kehilangan kepekaan terhadap tuntutan zaman.

Salah satu bagian penting dalam halaman ini adalah pembahasan tentang kekerasan struktural yang mengiringi Pemilu 1997. Buletin mengingatkan pembaca pada peristiwa-peristiwa tragis seperti Kerusuhan Banjarmasin, yang menelan banyak korban jiwa. Tragedi tersebut diposisikan bukan sebagai insiden terpisah, melainkan sebagai konsekuensi langsung dari sistem politik yang menutup ruang ekspresi dan menumpuk kemarahan sosial. Ketika saluran politik dibungkam, kekerasan menjadi pelampiasan yang tak terhindarkan.

Buletin juga mengkritik manipulasi administratif dan teknis pemilu. Hasil perhitungan suara yang diumumkan secara sepihak, dominasi Golkar yang tidak masuk akal, serta minimnya transparansi dalam proses penghitungan dijadikan bukti bahwa pemilu telah direkayasa. Angka-angka kemenangan Golkar dipandang tidak mencerminkan realitas di lapangan, melainkan hasil dari mobilisasi aparat dan manipulasi struktural. Dalam narasi buletin, pemilu ini digambarkan sebagai sandiwara politik yang dipaksakan kepada rakyat (AJI, 1997).

Penerbitan buletin *Independen* sebagai media gerakan bawah tanah menunjukkan konsistensi produksi wacana tandingan sepanjang periode represi pers. Dalam kurun waktu 1994 hingga 1998, buletin ini tercatat terbit sebanyak 28 edisi. Jumlah tersebut merefleksikan keberlanjutan kerja jurnalistik alternatif di tengah keterbatasan ruang publik, sekaligus menandai upaya sistematis gerakan bawah tanah dalam menjaga sirkulasi informasi kritis di luar kontrol negara

2. Pelatihan dan Pendidikan Jurnalisme Independen

Selain melalui penerbitan buletin *Independen*, bentuk lain dari perlawanan yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah penyelenggaraan berbagai pelatihan jurnalistik bawah tanah. Kegiatan ini lahir dari kesadaran mendalam bahwa melawan sensor dan hegemoni negara

tidak cukup dilakukan hanya melalui tulisan atau media alternatif. Perlawanan sejati, menurut para pendiri AJI, harus berangkat dari keberanian berpikir dari individu yang memahami mengapa mereka harus menulis, dan untuk siapa mereka menulis. Karena itu, pelatihan ini bukan sekadar kegiatan profesional, melainkan juga tindakan moral dan politik yang menghidupkan kembali semangat kebebasan berpikir di tengah suasana ketakutan yang menjerat dunia pers pada masa Orde Baru. Pelatihan tersebut dilakukan secara diam-diam, dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Kadang berlangsung di rumah sederhana milik anggota AJI, kadang di kantor lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bersimpati pada perjuangan kebebasan pers, atau bahkan di ruang diskusi kampus yang digelapkan lampunya bila terdengar langkah mencurigakan di luar. Dalam ruangan kecil yang pengap dan penerangan seadanya itu, para wartawan, aktivis, dan mahasiswa duduk melingkar, mendengarkan dengan khidmat setiap penjelasan yang diberikan.

Andreas Harsono, ketika diwawancarai pada Tahun 2025, berkata:

“Kami menyadari besarnya risiko pelatihan mulai dari penggerebekan hingga penangkapan namun tanpa itu pers Indonesia akan mati oleh ketakutan. Pelatihan bawah tanah ini lahir dari kegelisahan wartawan muda yang masih memegang idealisme, untuk mendidik ulang wartawan melalui etika jurnalistik, verifikasi fakta, tanggung jawab sosial, dan keberanian moral, agar berani berpikir kritis, mempertanyakan kebenaran versi negara, dan menulis dengan nurani” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Materi yang diajarkan dalam pelatihan meliputi etika jurnalistik, teknik verifikasi fakta, tanggung jawab sosial wartawan, dan keberanian moral dalam menghadapi tekanan. Namun di balik itu semua, yang paling penting adalah proses membangkitkan kesadaran. Andreas menceritakan bahwa seringkali para peserta pelatihan datang dengan wajah gugup, raut takut, dan langkah yang ragu, tetapi ketika meninggalkan ruangan, mata mereka berbinar, dan semangat baru tampak jelas terpancar.

“Saya selalu melihat ada rasa lega yang muncul di wajah mereka, seolah menemukan kembali makna sejati menjadi wartawan. Mungkin di luar sana kami dicap ilegal, dianggap menentang kekuasaan, tapi di dalam ruangan itu, semuanya hanya berfokus pada satu hal yaitu kejujuran. Dan bagi kami, kejujuran itulah bentuk perlawanan paling sunyi, yang

tak terlihat oleh siapa pun, tapi sangat kuat dalam membentuk nurani dan keberanian.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Goenawan Mohamad, dalam wawancara terpisah pada Tahun 2025, mengenang pelatihan bawah tanah AJI dengan berkata:

“Pelatihan bawah tanah AJI itu ibarat ruang kecil yang menyala di tengah gelap. Bukan sekadar soal teknik menulis, tetapi seperti upacara keheningan di mana orang-orang belajar kembali arti berpikir merdeka. Menulis berita jujur saja sudah dianggap tindakan politik, karena kejujuran paling ditakuti kekuasaan. Saya masih ingat, di setiap akhir pelatihan terdengar tawa-tawa kecil, pelan namun tulus. Tawa orang-orang yang sadar mereka sedang melakukan sesuatu yang berbahaya, tapi benar. Di situlah kekuatan AJI: bukan hanya membekali keterampilan jurnalistik, tetapi menyalakan kembali semangat integritas, keberanian, dan keyakinan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Pelatihan itu kemudian berkembang ke berbagai kota seperti Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Di sana, para fasilitator yang sebagian besar merupakan mantan jurnalis Tempo dan aktivis LSM berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa semangat yang sama: menyebarkan api kebebasan melalui pendidikan (Steele, 2014). Menurut Andreas Harsono, kegiatan pelatihan itu jauh lebih dari sekadar mengajarkan keterampilan jurnalistik; ia juga menjadi ruang untuk menumbuhkan solidaritas emosional dan moral di antara para wartawan yang berani menentang tekanan rezim.

“Kami jadi sadar bahwa kami tidak sendirian. Di banyak kota lain, ada orang-orang yang juga melawan meski risiko selalu mengintai. Wajah-wajah mereka masih saya ingat... muda, berani, tapi juga takut. Takut ditangkap atau kehilangan pekerjaan, tapi tetap datang, kadang larut malam, membawa buku catatan dan pena. Mereka duduk diam, belajar, menulis. Bagi saya, merekalah pahlawan tanpa nama dalam sejarah pers Indonesia dengan keberanian kecil mereka, menyalakan api perlawanan dan membuktikan bahwa jurnalisme tetap hidup meski berada di bawah tekanan yang menyesak.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Melalui pengalaman pelatihan dan pertemuan-pertemuan itu, terbangun kesadaran kolektif bahwa perlawanan terhadap pembungkaman pers tidak pernah berlangsung sendirian. Di berbagai kota, muncul jejaring wartawan

muda yang datang dengan keberanian yang lemah di satu sisi diliputi rasa takut akan penangkapan atau kehilangan pekerjaan, namun di sisi lain tetap memilih hadir untuk belajar dan menulis. Dengan perlengkapan sederhana dan pertemuan yang kerap berlangsung hingga larut malam, mereka menjalani proses pendidikan jurnalistik sebagai bentuk keteguhan moral. Keberanian-keberanian kecil inilah yang menjaga nyala jurnalisme tetap hidup, menjadikannya praktik perlawanan sunyi yang memberi arti penting bagi sejarah pers Indonesia di bawah tekanan politik.

Dalam situasi represi yang menutup ruang pendidikan pers secara terbuka, AJI menjalankan pendidikan jurnalistik secara informal dan berbasis jaringan kepercayaan, sebagaimana tergambar dalam pernyataan Goenawan Mohamad:

“Pendidikan jurnalistik yang kami lakukan berlangsung secara senyap dan terfragmentasi. Tidak ada jadwal resmi, tidak ada pengumuman. Kami mengandalkan jaringan kepercayaan. Di setiap kota, kami bertemu dalam kelompok kecil untuk berdiskusi, membaca ulang kode etik, membedah berita propaganda, dan melatih verifikasi fakta. Para fasilitator banyak di antaranya eks jurnalis Tempo berbagi pengalaman langsung menghadapi sensor dan tekanan. Yang kami bangun bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kesadaran bahwa menjadi wartawan berarti siap bersikap kritis dan menanggung risiko moral dari pilihan itu.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Dari situ lahir kesadaran kolektif bahwa kebebasan pers bukanlah hadiah yang diberikan oleh kekuasaan atau sesuatu yang bisa diperoleh begitu saja. Kebebasan pers merupakan tanggung jawab yang harus diperjuangkan secara konsisten, dijaga dengan integritas, dan dihidupi setiap hari melalui praktik jurnalistik yang jujur dan berani. Wartawan memahami bahwa menulis bukan sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga menegakkan prinsip moral, mempertahankan kebenaran meski menghadapi tekanan politik, intimidasi, atau ancaman fisik. Kesadaran ini membimbing setiap insan pers untuk melihat profesi mereka bukan hanya sebagai pekerjaan, melainkan sebagai panggilan moral yang menuntut keberanian, solidaritas, dan ketekunan dalam menjaga hak publik untuk memperoleh informasi yang sah dan tidak tersensor. Dari semangat inilah lahir tradisi baru dalam dunia pers Indonesia,

di mana kebebasan tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai proses terus-menerus untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan martabat manusia melalui kekuatan kata dan pena (Steele, 2014).

3. Kampanye Anti-Amplop

Salah satu aspek paling fundamental dalam perjuangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah upayanya membangun etos “jurnalisme bersih” di tengah kondisi media yang telah terkooptasi oleh kekuasaan Orde Baru. Istilah ini bukan sekadar slogan etis, melainkan sebuah bentuk perlawanan moral dan profesional terhadap sistem yang telah mencemari dunia pers dengan praktik-praktik koruptif. Salah satu bentuk paling nyata dari kerusakan moral itu adalah maraknya budaya amplop yakni kebiasaan wartawan menerima uang, fasilitas, atau hadiah dari narasumber, pejabat, maupun institusi tertentu sebagai imbalan halus agar pemberitaan menjadi lebih lunak, positif, atau setidaknya tidak kritis terhadap kekuasaan. Dalam praktiknya, budaya amplop ini telah menumpulkan fungsi kontrol sosial pers dan mengubahnya menjadi sekadar corong legitimasi politik rezim (Steele, 2014).

Bagi AJI, fenomena tersebut bukan hanya persoalan individu wartawan yang tergoda, tetapi persoalan struktural yang jauh lebih dalam. Budaya amplop telah dijadikan alat untuk menjinakkan media, menundukkan independensi redaksi, dan memelihara loyalitas pada penguasa. Media massa kehilangan otonominya, sementara jurnalis kehilangan jati dirinya. Di tengah suasana seperti itu, upaya melawan sensor dan pembredelan dianggap tidak akan bermakna jika moralitas profesi wartawan sendiri telah rapuh. Karena itu, AJI sejak awal menempatkan perjuangan etis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan politik melawan represi negara. Dari kesadaran inilah lahir konsep “jurnalisme bersih” suatu gagasan tentang jurnalisme yang tidak hanya bebas dari sensor negara, tetapi juga dari korupsi moral di dalam tubuhnya sendiri. AJI bertekad untuk membersihkan dunia pers dari segala bentuk kompromi yang mengaburkan kebenaran. Menurut para pendirinya, kebebasan pers tanpa integritas merupakan kebebasan yang semu; sedangkan

kebenaran yang dihasilkan melalui proses yang tidak etis pada hakikatnya setara dengan kebohongan yang dikemas secara sistematis.

Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan Kode Etik Jurnalis Independen (KEJI), sebuah dokumen yang disusun secara kolektif tidak lama setelah AJI berdiri pada 7 Agustus 1994. Proses penyusunan kode etik itu berlangsung di tengah suasana yang penuh kewaspadaan. Para pendiri AJI yaitu Goenawan Mohamad, Ahmad Taufik, Andreas Harsono, dan beberapa jurnalis lain sering kali bertemu di ruang-ruang kecil, rumah-rumah pribadi, atau kantor lembaga swadaya masyarakat yang bersimpati pada perjuangan kebebasan pers. Dalam pertemuan-pertemuan itu, mereka berdiskusi hingga larut malam, berdebat tentang prinsip, idealisme, dan tanggung jawab moral seorang jurnalis di tengah tekanan negara. Andreas Harsono berkata:

“Gagasan tentang jurnalisme bersih lahir dari keprihatinan yang sangat personal dan mendalam. Selama bertahun-tahun, wartawan hidup dalam sistem yang secara halus membuat mereka tunduk tanpa disadari. Mereka disuapi amplop, dijamu makan malam, diberi berbagai fasilitas, hingga lama-kelamaan lupa bahwa tugas utama seorang wartawan adalah melayani publik, bukan pejabat atau penguasa. Budaya amplop itu bukan sekadar soal uang; lebih dari itu, hal ini menyangkut kesadaran dan integritas. Kita sedang membicarakan bagaimana kekuasaan, secara sistematis, mampu menundukkan moral manusia.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Gagasan jurnalisme bersih muncul dari refleksi mendalam atas pengalaman panjang wartawan yang bekerja dalam sistem pers yang dipenuhi praktik kooptasi. Dalam praktik sehari-hari, berbagai bentuk fasilitas dan pemberian dari pejabat atau pemegang kekuasaan perlahan menormalisasi ketundukan, hingga batas antara profesionalisme dan kepentingan penguasa menjadi kabur. Budaya amplop kemudian tidak hanya mereduksi independensi wartawan secara material, tetapi juga menurunkan kesadaran etis mereka. Pada titik ini, persoalannya bukan lagi soal imbalan finansial, melainkan tentang bagaimana kekuasaan bekerja secara sistematis untuk melemahkan integritas dan mengalihkan orientasi jurnalisme dari kepentingan publik.

Dalam upaya membangun jurnalisme yang mandiri dan bermartabat, AJI tidak hanya mengandalkan praktik liputan alternatif, tetapi juga merumuskan fondasi etik yang secara tegas menantang budaya ketergantungan dan intervensi kekuasaan. Penyusunan Kode Etik Jurnalis Independen (KEJI) menjadi penanda penting dari sikap tersebut, sebagaimana tercermin dalam pernyataan Andreas Harsono:

“Kami ingin memutus rantai ketergantungan itu. Wartawan harus berdiri di atas kaki sendiri, hidup dari profesi yang jujur, dan menulis dengan nurani. Jurnalisme bukan alat tawar-menawar, melainkan panggilan hati. Penyusunan Kode Etik Jurnalis Independen (KEJI) saat itu merupakan langkah berani dan sangat politis. Di tengah kontrol ketat pemerintah terhadap media, kami justru merumuskan aturan yang menolak sensor, suap, dan intervensi negara. KEJI bukan sekadar kumpulan pasal moral, tetapi juga manifesto politik yang mendefinisikan ulang makna menjadi wartawan di negeri yang menindas kebebasan pers. Bagi kami, integritas adalah bentuk perlawanan tertinggi.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Upaya memutus ketergantungan wartawan terhadap kekuasaan menjadi landasan penting perjuangan AJI dalam membangun jurnalisme yang merdeka. Melalui penegasan bahwa kerja jurnalistik harus dijalani secara mandiri, jujur, dan berorientasi pada nurani, AJI menempatkan profesi wartawan sebagai praktik etis sekaligus sikap politik. Penyusunan Kode Etik Jurnalis Independen (KEJI) kemudian menjadi langkah strategis yang menantang langsung sistem pengendalian negara atas media. Dengan menolak sensor, suap, dan campur tangan kekuasaan, KEJI berfungsi bukan hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai pernyataan perlawanan simbolik yang merumuskan ulang identitas wartawan dalam situasi represi, menjadikan integritas sebagai inti dari perjuangan kebebasan pers.

Bagi para pendiri dan pendukung gerakan pers independen, jurnalisme bersih dipahami bukan sekadar sebagai standar profesional, melainkan sebagai laku etis yang menautkan kerja intelektual dengan tanggung jawab moral. Dalam konteks represi politik yang kuat, praktik jurnalistik yang jujur memperoleh makna yang jauh lebih dalam, sebagaimana tergambar dalam pernyataan berikut:

“Jurnalisme bersih bagi kami adalah semacam ibadah intelektual, sebuah bentuk kesetiaan terhadap kebenaran yang tidak bisa dibeli oleh kekuasaan atau uang. Menulis berita yang jujur pada masa itu sudah merupakan tindakan politik. Tapi lebih dari itu, ia adalah tindakan spiritual, tindakan untuk tetap setia pada nurani” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, Jakarta, 2025).

Kebebasan pers di Indonesia bukanlah hadiah yang dengan mudah diberikan oleh reformasi, melainkan hasil dari perjuangan panjang para jurnalis yang memilih mempertahankan integritas di tengah tekanan politik dan ekonomi. Pada masa pembredelan, banyak wartawan menghadapi pilihan sulit: menerima kompromi demi kenyamanan hidup atau bertahan dengan risiko kehilangan pekerjaan, penghasilan, bahkan kebebasan. Perlawanan yang dilakukan termasuk oleh jurnalis Tempo dan jaringan pers independen tidak semata untuk membela satu media, tetapi untuk menjaga harga diri dan martabat profesi jurnalistik. Kebebasan menulis yang dinikmati saat ini lahir dari keberanian untuk menolak budaya amplop, menghadapi pembredelan, dan menempatkan integritas di atas kepentingan kekuasaan, menjadikan jurnalisme bersih sebagai fondasi utama kebebasan pers (Hill, 1994).

4. Jaringan Solidaritas Nasional dan Internasional

Selain melakukan perlawanan di dalam negeri, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga memperluas gerakannya ke ranah internasional melalui pembangunan jejaring dan kerja sama dengan organisasi pers dunia. Langkah ini bukan hanya sekadar strategi teknis, melainkan bentuk kesadaran politik yang lahir dari pengalaman panjang hidup di bawah represi. Para anggota AJI menyadari bahwa perjuangan melawan kekuasaan yang begitu terorganisir dan represif tidak mungkin dilakukan sendirian. Dalam suasana domestik yang penuh pengawasan, ancaman, dan ketakutan, mereka merasa perlu mencari sekutu di luar batas negara yaitu tempat di mana suara mereka bisa didengar tanpa disensor, dan keberanian mereka tidak berakhir di ruang interogasi.

Dalam situasi pembungkaman yang sistematis, para jurnalis pers independen meyakini bahwa kekuasaan tidak pernah sepenuhnya mampu mengendalikan gagasan dan nurani. Meskipun ruang gerak dibatasi melalui pembredelan,

pencabutan izin, dan berbagai bentuk intimidasi, keyakinan terhadap daya hidup kata-kata tetap menjadi sumber kekuatan moral bagi gerakan pers. Keyakinan inilah yang tercermin dalam pernyataan berikut:

“Kita mungkin dibungkam di sini, di ruang yang tampak sepi dan sunyi, di tengah tekanan dan ancaman yang selalu mengintai, tapi suara kita tidak akan mati. Suara kita bisa melintas batas menyentuh hati orang-orang yang haus akan kebenaran, menggugah kesadaran mereka, dan menyalakan api perlawanan di mana pun ada ketidakadilan. Meskipun surat izin dicabut, kantor dibredel, atau ancaman mengintai di setiap sudut, kata-kata yang ditulis dengan nurani tetap hidup, mengalir melewati dinding-dinding yang mencoba menahan kebenaran. Inilah kekuatan sejati pers: meski dibungkam secara fisik, suara moral dan intelektualnya tetap dapat menembus batas-batas yang dibuat oleh kekuasaan.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, Jakarta, 2025).

Kalimat itu menjadi semacam mantra moral bagi para jurnalis muda AJI yang pada masa itu bekerja di bawah tekanan. Di tengah gelapnya situasi pers nasional, gagasan untuk membuka jaringan internasional memberi secercah cahaya: bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia, bahwa dunia akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia.

Sejak awal berdirinya, AJI menjalin hubungan dengan sejumlah organisasi internasional seperti International Federation of Journalists (IFJ), Article XIX, dan International Freedom of Expression Exchange (IFEX). Ketiga organisasi ini menjadi mitra utama AJI dalam mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran kebebasan pers di Indonesia. Melalui jaringan tersebut, AJI memiliki saluran untuk mengirimkan laporan, menyampaikan kronologi pembredelan, hingga menyebarkan kisah para jurnalis yang dipenjara karena menulis. Di masa ketika ruang publik di dalam negeri dibungkam oleh negara, jaringan global ini menjadi semacam paru-paru tambahan yang memungkinkan kebenaran tetap bernapas (AJI, 2023).

Salah satu momen bersejarah terjadi pada 18 Oktober 1995 ketika AJI resmi diterima sebagai anggota International Federation of Journalists (IFJ), organisasi wartawan terbesar di dunia yang bermarkas di Brussels, Belgia. Bagi AJI, pengakuan ini bukan sekadar status keanggotaan, melainkan legitimasi moral atas perjuangan mereka. Andreas Harsono mengenang

momen itu sebagai titik balik emosional bagi banyak anggota AJI, hari yang menandai bahwa perjuangan mereka akhirnya diakui dunia, Andreas Harsono berkata:

“Kami waktu itu hanyalah segelintir orang. Tidak punya kekuasaan, tidak punya dana, bahkan sering kali tidak memiliki tempat aman untuk berkumpul atau rapat. Semua terasa serba terbatas, seolah segala hal menentang langkah kami. Tapi ketika surat dari IFJ tiba, memberi tahu bahwa AJI diterima sebagai anggota, rasanya seperti dunia akhirnya mengakui perjuangan kami. Lucu ya, di negeri sendiri kami dianggap kriminal, diburu dan diawasi, tapi di luar negeri, orang melihat kami sebagai pembela kebebasan, sebagai suara yang menentang ketidakadilan.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Pada masa awal berdirinya, AJI bergerak dalam kondisi yang serba terbatas dan penuh kerentanan. Jumlah anggotanya sedikit, tanpa dukungan sumber daya maupun ruang aman untuk berorganisasi, sementara tekanan dan pengawasan terus membayangi setiap langkah. Dalam situasi ketika gerakan ini dipinggirkan dan dicurigai di dalam negeri, pengakuan dari komunitas jurnalis internasional melalui penerimaan AJI sebagai anggota International Federation of Journalists (IFJ) menjadi momentum penting. Dukungan tersebut tidak hanya memberi legitimasi moral, tetapi juga menegaskan kontras tajam antara perlakuan represif negara terhadap AJI dan pandangan dunia internasional yang melihatnya sebagai bagian dari perjuangan global untuk kebebasan pers dan keadilan.

Bagi para pendiri AJI, dukungan dan pengakuan dari komunitas internasional memiliki arti yang jauh melampaui urusan administratif atau politik organisasi. Di tengah tekanan, stigma, dan rasa terisolasi akibat represi negara, pengakuan tersebut menjadi sumber kekuatan moral yang menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia dan memiliki resonansi di luar batas-batas nasional, sebagaimana tergambar dalam pernyataan berikut:

“Bagi kami, ini bukan sekadar soal politik atau prosedur organisasi. Ini soal martabat. Saat kami ditekan, dituduh, dibungkam, lalu tiba-tiba ada orang di belahan dunia lain yang mau mendengar suara kami, rasanya seperti lampu kecil yang menembus gelap. Tiba-tiba kami tidak lagi

merasa sendiri dalam perjuangan yang panjang dan penuh ketakutan itu. Ada semacam pengakuan yang memberi kekuatan, sebuah bukti bahwa keberanian kami, meski kecil, memiliki makna.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Melalui jejaring internasional, AJI mulai aktif berkorespondensi dengan lembaga-lembaga seperti The Freedom Forum di Amerika Serikat, Committee to Protect Journalists (CPJ), International Press Institute (IPI) di Wina, dan Global Network of Editors and Media Executives di Zurich. Mereka mengirimkan laporan tentang pembredelan Tempo, penangkapan wartawan, serta penutupan media independen lainnya. Dalam banyak kasus, laporan-laporan itu menjadi dasar bagi organisasi internasional untuk menekan pemerintah Indonesia melalui kampanye publik dan diplomasi internasional. Andreas menekankan bahwa jejaring internasional tidak hanya memberi ruang advokasi, tetapi juga menjadi sekolah politik bagi jurnalis Indonesia (AJI, 2023).

Dalam membangun gerakan pers independen, AJI tidak hanya bertumpu pada pengalaman domestik, tetapi juga menyerap pelajaran dari perjuangan jurnalis di berbagai belahan dunia yang menghadapi represi serupa. Solidaritas dan pertukaran pengalaman lintas negara menjadi sumber refleksi penting tentang makna keberanian dan konsekuensi moral dalam praktik jurnalistik, sebagaimana tercermin dalam pernyataan berikut:

“Kami belajar banyak dari pengalaman negara lain. Dari wartawan Amerika Latin yang berani melawan junta militer, dari jurnalis Eropa Timur yang bertahan di bawah tekanan komunisme, hingga media Afrika yang tetap eksis di tengah perang saudara. Dari semua itu kami menyadari satu hal: jurnalisme sejati selalu memiliki harga, dan harga itu adalah keberanian. Jika kamu tidak siap membayar harga itu, maka yang kamu tulis bukan kebenaran, melainkan sekadar kenyamanan bagi mereka yang berkuasa.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

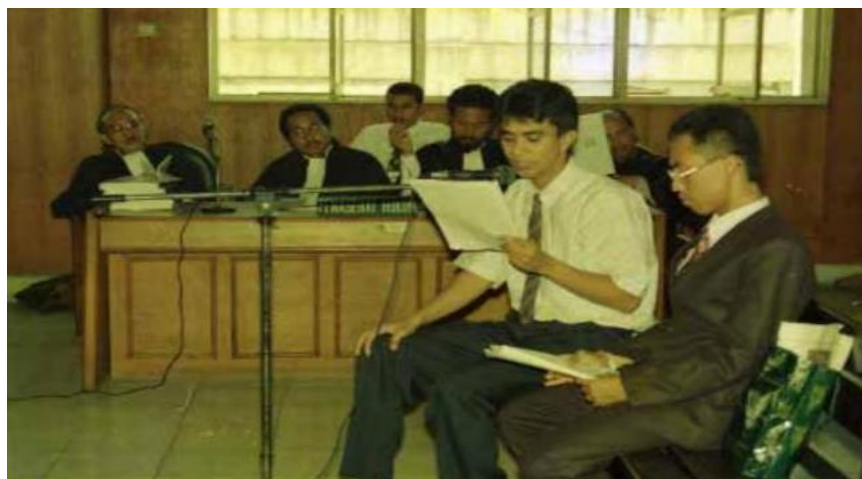
Solidaritas antarlajalis bersifat lintas batas dan memainkan peran krusial dalam menjaga kebebasan pers. Solidaritas ini tidak hanya berbentuk dukungan moral, tetapi juga menjadi kekuatan spiritual yang menghubungkan para wartawan di seluruh dunia. Dari pengalaman ini, terlihat bahwa kebebasan pers bukan sekadar persoalan politik atau hukum negara,

melainkan isu kemanusiaan yang menuntut kerja sama, empati, dan keberanian kolektif.

5. Advokasi Wartawan yang Ditangkap

Karena aktivitasnya dianggap ilegal oleh pemerintah Orde Baru, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sejak awal berdirinya harus berhadapan dengan tekanan dan kriminalisasi yang keras. Negara menuduh AJI sebagai organisasi liar yang melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982, yang pada saat itu hanya mengakui satu organisasi wartawan resmi, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pemerintah melalui Departemen Penerangan menilai AJI sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional dan kesatuan sistem pers pembangunan. Tuduhan itu tidak hanya hadir dalam bentuk pernyataan politik, tetapi menjelma menjadi praktik pengawasan dan intimidasi yang nyaris tanpa henti.

Setiap langkah AJI, sekecil apa pun, diawasi. Rapat-rapat kecil mereka di rumah anggota, penerbitan buletin Independen yang dicetak dengan mesin sederhana, hingga pelatihan jurnalistik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sering kali berakhir dengan pembubaran oleh aparat atau pemanggilan ke kantor kepolisian. Dalam banyak kesaksian, suasana rapat AJI kala itu diwarnai oleh ketegangan dan rasa waswas. Salah satu anggota bahkan pernah berkata bahwa setiap kali mendengar suara mobil berhenti di depan rumah tempat mereka berkumpul, jantungnya berdegup keras, takut itu mobil aparat (Manan, 2014).



Gambar 4. 32. Ahmad Taufik dan Eko “Item” Maryadi di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Juni 1995.

(Sumber: Koleksi Andreas Harsono)

Puncak represi itu terjadi ketika Ahmad Taufik salah satu pendiri AJI dan mantan wartawan Tempo ditangkap oleh aparat keamanan pada Tahun 1995. Penangkapannya menandai babak baru represi terhadap jurnalis independen di Indonesia. Taufik dituduh menerbitkan buletin Independen tanpa izin dan dianggap menghina Presiden Soeharto melalui tulisannya yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Tuduhan itu kemudian dijadikan dasar untuk menjeratnya dengan pasal menyebarkan kebencian terhadap pemerintah yang sah, dan ia dijatuhi hukuman penjara tiga tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penangkapan terhadap salah satu anggota AJI menjadi momen yang sangat menentukan dalam perjalanan gerakan pers independen. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan duka dan ketakutan, tetapi juga memaksa AJI untuk berhadapan langsung dengan risiko nyata dari pilihan perjuangannya. Dalam situasi itulah, solidaritas internal dan langkah-langkah kolektif mulai dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap pembungkaman, sebagaimana tergambar dalam pernyataan berikut:

“Waktu Taufik ditangkap, kami semua terpukul. Dia bukan sekadar teman, melainkan saudara seperjuangan. Kami sudah sadar risiko mendirikan AJI, tapi melihat seseorang benar-benar dibawa ke penjara tetap meninggalkan rasa sesak yang dalam. Anehnya, penahanan itu justru memperkuat keyakinan kami bahwa perjuangan ini tidak salah. Setelah Taufik ditangkap, kami menyadari satu hal penting yaitu diam berarti kalah. Maka kami mulai bergerak. Kami mengumpulkan dana, mencari pengacara, mengirim surat ke organisasi internasional, dan menulis laporan ke luar negeri. Kami tidak ingin kisah Taufik hilang dalam kesunyian. Ia harus menjadi simbol perjuangan. Saya masih ingat wajahnya di pengadilan tersenyum kecil, tapi tegar. Bagi kami, senyum itu adalah pesan diam yang kuat seperti jangan pernah menyerah.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Penangkapan terhadap Taufik dan wartawan lainnya menjadi pukulan emosional yang mendalam bagi jaringan AJI, karena peristiwa tersebut mengubah risiko yang selama ini disadari secara abstrak menjadi kenyataan yang konkret. Namun alih-alih melumpuhkan, tindakan represif itu justru mengkristalkan keyakinan bahwa jalan yang mereka tempuh memiliki dasar moral yang kuat. Kesadaran bahwa sikap diam hanya akan memperpanjang kekalahan mendorong AJI untuk bergerak lebih terorganisasi, membangun solidaritas, menghimpun dukungan hukum, serta menggalang perhatian internasional melalui laporan dan korespondensi lintas negara (Manan, 2014).

Dalam menghadapi kriminalisasi terhadap wartawan, AJI memandang perjuangan kebebasan pers sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembelaan hak asasi manusia. Ketika kerja jurnalistik dikriminalkan, respons terhadap represi tersebut melampaui urusan profesi semata dan menjelma menjadi komitmen moral yang melekat pada praktik jurnalistik itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam pernyataan berikut:

“Kami tidak bisa lagi memisahkan diri dari isu hak asasi manusia. Ketika negara menahan wartawan hanya karena menulis kebenaran, maka melawan penahanan itu bukan sekadar aktivitas hukum melainkan perpanjangan dari tugas jurnalistik itu sendiri. Setiap surat, setiap gugatan, setiap pernyataan protes bukan hanya upaya untuk membela individu, tetapi juga upaya untuk mempertahankan prinsip bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Kami sadar bahwa menulis berita dan memperjuangkan keadilan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Kami tidak hanya menulis berita; kami sedang menulis sejarah perlawanan, meletakkan fondasi moral bagi generasi wartawan

berikutnya, dan menunjukkan bahwa jurnalisme memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan, bahkan ketika risiko pribadi selalu mengintai.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Dalam situasi ketika kerja jurnalistik berhadapan langsung dengan represi negara, AJI memandang pembelaan terhadap wartawan yang dikriminalkan sebagai bagian inheren dari praktik jurnalisme itu sendiri. Upaya hukum, korespondensi, dan pernyataan protes tidak ditempatkan semata sebagai pembelaan individual, melainkan sebagai cara menjaga prinsip bahwa kebenaran tidak boleh diredam oleh kekuasaan. Kesadaran ini menegaskan bahwa aktivitas menulis berita berjalan seiring dengan perjuangan menuntut keadilan, sekaligus membangun warisan moral bagi generasi jurnalis berikutnya. Dalam kerangka tersebut, jurnalisme dipahami sebagai kekuatan etis yang mampu menantang ketidakadilan, meski selalu disertai risiko personal.

Penangkapan terhadap Taufik menjadi titik krusial yang memperlihatkan bagaimana represi negara justru memunculkan solidaritas dan kesadaran kolektif di kalangan jurnalis independen. Dalam situasi di mana hukum digunakan sebagai alat intimidasi, AJI merespons dengan membangun solidaritas moral dan mengartikulasikan ulang peran jurnalis sebagai komunitas yang saling melindungi serta berani menuntut keadilan, sebagaimana tercermin dalam pernyataan berikut:

“Saya masih ingat jelas ketika Taufik ditangkap. Banyak yang takut dan marah, tetapi muncul satu hal paling penting yaitu rasa saling melindungi. Wartawan tidak bisa hanya berpikir sebagai individu; dalam situasi represif, kita harus menjadi komunitas moral. Langkah AJI saat itu membangun kembali makna profesi jurnalis seperti keberanian berdiri di sisi kebenaran, meski berhadapan dengan negara. Di masa Orde Baru, hukum sering dipakai untuk menakuti dan membungkam. Namun melalui kasus Taufik, AJI membalikkan keadaan, menunjukkan bahwa hukum bisa menjadi sarana perlawanan. Dengan membawa kasus ini ke publik, AJI menegaskan: hukum bukan monopoli negara, tetapi milik warga yang berani menuntut keadilan, sekaligus memperkuat prinsip moral dan integritas jurnalisme.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Penahanan terhadap Taufik menjadi peristiwa yang memperjelas bahwa tekanan negara tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga menumbuhkan solidaritas di kalangan jurnalis independen. Dalam situasi represif, AJI mendorong wartawan untuk melampaui kepentingan individual dan bertindak sebagai komunitas etis yang saling menjaga. Melalui respons kolektif atas kasus tersebut, AJI menegaskan kembali makna profesi jurnalis sebagai keberanian moral untuk berpihak pada kebenaran. Alih-alih tunduk pada hukum yang digunakan sebagai alat pembungkaman, AJI justru memanfaatkan ruang hukum untuk menantang kekuasaan, menjadikannya sarana perjuangan publik yang menegaskan bahwa keadilan bukan hak eksklusif negara, melainkan milik warga yang berani memperjuangkannya.

Di tengah tekanan politik dan ancaman yang terus membayangi, pengalaman para jurnalis muda dalam gerakan pers independen meninggalkan kesan mendalam tentang keteguhan dan daya tahan moral mereka. Meski berhadapan dengan kekuasaan yang jauh lebih besar, semangat kolektif dan keyakinan pada kekuatan kata-kata menjadi sumber keberanian yang menjaga perjuangan tetap hidup, sebagaimana tergambar dalam pernyataan berikut:

“Yang paling saya ingat dari masa itu adalah semangat mereka. Kita semua tahu betapa besar kekuasaan yang dihadapi, tapi anak-anak muda ini tidak pernah menyerah. Mereka menulis, melawan, bahkan tertawa di tengah ancaman yang menyesak, tetap percaya bahwa kata-kata memiliki kekuatan.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Dalam sejarah pers Indonesia, tidak banyak wartawan yang berani mengambil risiko sebesar itu. AJI membuktikan bahwa jurnalisme bukan sekadar profesi atau pekerjaan rutin, melainkan sebuah bentuk perlawanan moral yang nyata, tulus, dan konsisten. Organisasi ini menegaskan bahwa menjadi wartawan berarti lebih dari sekadar menyampaikan informasi; ia adalah komitmen untuk menulis dengan nurani, mempertahankan kebenaran, dan menegakkan integritas di tengah tekanan politik yang berat. Tindakan-tindakan kecil maupun besar yang dilakukan anggota AJI mulai dari advokasi hukum hingga pelatihan bawah tanah bagi jurnalis muda adalah manifestasi dari keberanian yang luar biasa. Keberanian itu bukan sekadar menghadapi risiko pribadi,

tetapi juga berjuang untuk prinsip etika dan moral jurnalisme, menunjukkan bahwa di tengah intimidasi dan sensor, ada ruang bagi kebenaran untuk tetap hidup dan bersinar.

4.1.4 Terbit Kembali Tempo: Simbol Kebangkitan Jurnalisme Pasca Pembredelan

Kembalinya Majalah Tempo ke ruang publik pada Tahun 1998 merupakan puncak dari perjuangan panjang para jurnalisnya melawan represi politik dan pembungkaman informasi oleh rezim Orde Baru. Setelah dibredel pada 21 Juni 1994 oleh Menteri Penerangan Harmoko, Tempo terpaksa menghentikan penerbitannya selama empat tahun. Namun dalam kurun waktu itu, semangat dan idealisme jurnalisme Tempo tidak pernah padam. Para redaktornya tetap aktif di berbagai ruang perlawanan intelektual, seperti melalui Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Institut Studi Arus Informasi (ISAI), yang menjadi wadah bagi jurnalis independen untuk menulis, meneliti, serta menyebarkan informasi alternatif di tengah kontrol ketat negara terhadap media.

Politik menjelang Tahun 1998 memainkan peran besar dalam membuka jalan bagi kebangkitan kembali Tempo. Krisis moneter yang menghantam Asia sejak pertengahan 1997 mengguncang stabilitas ekonomi Indonesia dan memperlemah legitimasi pemerintahan Soeharto. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan desakan reformasi dari berbagai kalangan masyarakat akhirnya memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Runtuhnya rezim Orde Baru membawa perubahan besar dalam struktur kekuasaan dan kehidupan publik Indonesia.

Pemerintahan baru di bawah Presiden B.J. Habibie menandai titik balik penting bagi kebebasan pers di Indonesia. Setelah runtuhnya Orde Baru pada Mei 1998, pemerintah menghapus sistem perizinan pers melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan membubarkan Departemen Penerangan dua instrumen utama yang selama puluhan tahun digunakan untuk mengontrol, menyensor, dan membungkam media. Kebijakan ini secara

efektif mengakhiri praktik pembredelan dan membuka kembali ruang bagi media independen untuk beroperasi tanpa ancaman represi negara. Dalam konteks perubahan inilah Majalah Tempo dapat terbit kembali. Tidak ada satu surat izin khusus yang “mengaktifkan” Tempo, melainkan perubahan kebijakan negara di awal era Reformasi yang menghentikan larangan dan kontrol ketat terhadap pers (Crouch, 2010).

Di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, kebebasan pers mulai dipulihkan, sementara Menteri Penerangan Yunus Yosfiah yang menjabat pada 1998–1999 tidak lagi memberlakukan mekanisme pembredelan seperti pada masa Orde Baru. Pemerintah tidak menghalangi kembalinya Tempo, sehingga majalah tersebut dapat terbit kembali tanpa harus tunduk pada sistem perizinan represif sebelumnya. Di tengah iklim politik yang lebih terbuka itulah, semangat di kalangan mantan redaktur dan wartawan Tempo kembali menyala untuk menghidupkan majalah yang pernah menjadi simbol perlawanan terhadap tirani informasi negara, sekaligus menandai babak baru kebebasan pers di Indonesia pasca-Reformasi.

Jauh sebelum runtuhnya Orde Baru, di kalangan jurnalis Tempo telah tumbuh keyakinan bahwa kembalinya majalah tersebut merupakan keniscayaan begitu ruang politik memungkinkan. Pembredelan dipahami bukan hanya sebagai larangan administratif, tetapi sebagai serangan terhadap martabat dan identitas profesi jurnalistik. Karena itu, meski tidak dapat terbit secara resmi, semangat dan praktik intelektual Tempo tetap dijaga melalui berbagai aktivitas informal dan jaringan bawah tanah, sebagaimana tergambar dalam pernyataan berikut:

“Sebelum Soeharto jatuh, kami sudah menyadari jika perubahan benar-benar datang, Tempo harus kembali. Ini bukan sekadar soal media, tetapi soal martabat. Pembredelan itu bukan hanya melarang majalah terbit, tapi juga menghina profesi kami sebagai jurnalis. Kami ingin menunjukkan bahwa suara kebenaran tidak bisa dimatikan. Meski dibungkam selama empat tahun, kami yakin Tempo akan hidup kembali. Kami sudah siap secara moral. Sejak dibredel pada 1994, kami membangun jaringan-jaringan bawah tanah, terus menulis, berdiskusi, dan menyebarkan gagasan secara diam-diam. Semua itu adalah cara

kami memastikan bahwa Tempo tetap hidup, meski tanpa kertas dan tanpa ruang resmi.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Pasca-kejatuhan Soeharto, sejumlah tokoh-tokoh Tempo mengadakan pertemuan informal di rumah Goenawan di Jakarta Timur. Rumah tersebut, yang semula menjadi tempat diskusi sastra dan pertemuan para aktivis, akhirnya menjadi pusat koordinasi lahirnya kembali Tempo. Pertemuan-pertemuan itu berlangsung dalam suasana hangat namun tegang. Para jurnalis berdiskusi tentang arah editorial, bentuk hukum perusahaan, hingga siapa yang akan memimpin redaksi di era baru. Goenawan menolak kembali menjadi pemimpin redaksi dan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada generasi yang lebih muda, sebagaimana tergambar dalam pernyataan berikut

“Saya tidak mau lagi jadi pemimpin redaksi. Zaman sudah berubah, harus ada regenerasi. Tapi semangatnya tetap independen dari kekuasaan. Dan akhirnya Bambang Harymurti dipilih menjadi Pemimpin Redaksi. Keputusan ini kami buat bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk regenerasi ideologis bahwa semangat Tempo harus diteruskan tanpa tergantung pada sosok pendirinya.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Kembalinya Tempo pada masa awal Reformasi berlangsung dalam kondisi yang jauh dari ideal, ditandai oleh keterputusan institusional dan terpecahnya sumber daya redaksi akibat pembredelan yang panjang. Upaya menghidupkan kembali majalah tersebut tidak sekadar menyangkut persoalan teknis penerbitan, tetapi juga mengandung makna simbolik sebagai pemulihan martabat pers dan penegasan kembali nilai kebebasan berekspresi, sebagaimana tercermin dalam pernyataan berikut:

“Proses penerbitan kembali Tempo tidaklah mudah. Banyak arsip redaksi hilang, kantor lama tidak lagi berfungsi, dan sebagian besar kru telah berpencar ke berbagai media. Namun, di balik semua itu, ada semangat yang tak padam. Ada tekad untuk membuktikan bahwa Tempo belum mati. Membangun kembali Tempo bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga tindakan simbolik untuk menegaskan kembali martabat pers yang telah dirampas oleh kekuasaan. Setiap langkah yang kami ambil adalah pernyataan moral bahwa kebebasan menulis dan menyuarakan kebenaran tidak bisa dibungkam.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Di tengah sisa ketakutan dan kehampaan setelah pembredelan Tempo, suasana di antara para jurnalis penuh dengan ketegangan sekaligus tekad yang membara. Setiap langkah kecil diwarnai waspada; setiap pertemuan rahasia diwarnai bisik-bisik penuh strategi, dan setiap arsip yang terselamatkan menjadi harta yang amat berharga.

Bagi para jurnalis Tempo, penerbitan kembali majalah tersebut dipahami sebagai tindakan yang melampaui pertimbangan ekonomi atau keberlanjutan bisnis media. Upaya ini dimaknai sebagai bagian dari proses pemulihan sejarah dan penegasan kembali integritas profesi jurnalistik, sekaligus usaha mengembalikan kepercayaan publik terhadap pers yang independen. Pemaknaan tersebut tercermin dalam pernyataan berikut:

“Kami sadar, menerbitkan Tempo lagi bukan sekadar soal bisnis media. Ini jauh lebih dari itu. Ini soal sejarah, soal memulihkan martabat jurnalisme, dan soal menegaskan kembali kepercayaan publik bahwa pers bisa berdiri di atas kaki sendiri. Setiap lembar yang dicetak Tempo bukan hanya berita, tetapi juga pernyataan moral bahwa suara kebenaran tidak bisa dibungkam, meski rezim berusaha menutupnya.”
(Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Edisi perdana Tempo setelah vakum panjang menjadi simbol keberanian, integritas, dan kemerdekaan pers yang sesungguhnya. Setelah empat tahun dibungkam, majalah ini kembali muncul bukan sekadar untuk memenuhi pasar media, tetapi sebagai suara moral yang menegaskan bahwa kebebasan pers tidak bisa dipadamkan oleh tekanan politik maupun pembredelan. Tanpa menahan diri, wajah Soeharto terpampang besar di sampul edisi tersebut dengan judul provokatif: “Mengapa Soeharto Menantang.” Wajah Presiden Kedua Republik Indonesia itu menggantikan sosok Presiden Amerika Serikat pertama, George Washington, yang biasanya menghiasi pecahan uang kertas satu dolar AS pada Tahun 1995 dan sebuah pilihan simbolis yang sarat pesan politik dan historis. Simbol itu tidak hanya menyoroti kekuasaan yang dijalankan Soeharto, tetapi juga menandai keberanian Tempo untuk menentang arus ketakutan. Pemberitaan itu mengangkat kasus di mana Soeharto menuntut Time Asia terkait dugaan kekayaan keluarganya yang

mencapai 27 miliar dolar AS. Dengan menjadikan isu itu sebagai laporan utama, Tempo menegaskan bahwa kembalinya mereka bukan untuk menyanjung kekuasaan, melainkan untuk menegaskan kebenaran dan mengawasi penguasa secara kritis.



Gambar 4. 33. Sampul Majalah Tempo "Mengapa SOEHARTO Menantang" Edisi 3 Oktober 1998

(Sumber: Data Tempo.co)

Majalah “Mengapa Soeharto Menantang” hadir sebagai dokumen penting dalam sejarah pers dan politik Indonesia pada masa awal Reformasi, ketika kekuasaan Orde Baru telah runtuh secara formal, tetapi jejak, struktur, dan mentalitas kekuasaannya masih sangat kuat mencengkeram kehidupan bernegara. Majalah ini tidak hanya mencatat peristiwa, melainkan berupaya membongkar makna di balik sikap dan tindakan Soeharto setelah lengser dari kursi presiden pada Mei 1998. Indonesia pada awal Reformasi digambarkan berada dalam kondisi transisi yang rapuh, ditandai krisis ekonomi, konflik

sosial, melemahnya institusi negara, dan rendahnya kepercayaan publik. Dalam situasi ini, Soeharto menempati posisi simbolik yang ambigu: telah lengser, tetapi masih dipandang sebagai “bapak pembangunan” oleh sebagian kalangan. Majalah ini menegaskan bahwa kejatuhan Soeharto bukan akhir Orde Baru, melainkan awal pertarungan wacana, ingatan sejarah, dan tuntutan pertanggungjawaban moral. Judul “Mengapa Soeharto Menantang” dimaknai sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap agenda reformasi, supremasi hukum, dan keadilan transisional.



Gambar 4. 34. Majalah Tempo "Mengapa SOEHARTO Menantang"
Edisi 3 Oktober 1998 Hal 18

(Sumber: Data Tempo.co)

Halaman majalah ini mengangkat laporan utama bertajuk “Harta Soeharto: Jarum dalam Jerami”, sebuah metafora kuat yang sejak awal menegaskan betapa sulit dan rumitnya upaya negara melacak kekayaan mantan Presiden Soeharto pasca-kejatuhan Orde Baru. Judul tersebut tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis, karena menyiratkan bahwa meskipun kehendak politik telah muncul, realisasi penelusuran harta Soeharto dihadapkan pada hambatan struktural yang nyaris mustahil ditembus. Subjudul artikel menjelaskan konteks utama laporan ini: Soeharto telah menyerahkan konsep surat kuasa kepada Jaksa Agung untuk melacak hartanya, termasuk aset-aset yang berada di luar negeri. Namun, langkah tersebut tidak serta-merta membuka jalan yang mulus. Justru sebaliknya, pencarian harta itu digambarkan menghadapi banyak hambatan, terutama karena kurangnya keterbukaan dan ketegasan dari orang-orang yang terlibat dalam tim penelusuran.

Narasi artikel dimulai dengan penggambaran simbolik mengenai sikap Soeharto. Ia digambarkan hanya mengucapkan “satu kalimat, satu kata” ketika menyerahkan surat kuasa tersebut. Sikap ini mencerminkan karakter khas Soeharto selama berkuasa: minim penjelasan, penuh kontrol, dan menyisakan tafsir. Tempo menyoroti bahwa peristiwa tersebut terjadi di halaman Kantor Kejaksaan Agung, dengan pengawasan ketat, menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi lengser pun Soeharto masih diperlakukan sebagai figur berkuasa.

Artikel kemudian mengulas isi dan makna surat kuasa tersebut. Meski secara formal tampak sebagai bentuk kerja sama dengan penegak hukum, Tempo mempertanyakan substansi dan efektivitasnya. Surat kuasa dinilai belum menjamin keterbukaan penuh, karena tidak disertai daftar aset yang jelas, mekanisme pelacakan yang transparan, maupun batas waktu yang tegas. Dengan demikian, surat kuasa itu lebih tampak sebagai gestur politis ketimbang komitmen hukum yang sungguh-sungguh. Laporan ini lalu masuk ke bagian analisis mengenai kerumitan jaringan kekayaan Soeharto. Disebutkan bahwa harta tersebut tidak hanya berupa aset pribadi, tetapi juga

tersebar dalam bentuk yayasan, perusahaan, rekening atas nama pihak ketiga, dan investasi luar negeri. Kondisi ini membuat upaya pelacakan menjadi seperti mencari jarum di tengah tumpukan jerami yang banyak kemungkinan, tetapi minim kepastian.

Tempo juga menyoroti kelemahan institusional aparat penegak hukum. Jaksa Agung dan timnya digambarkan bekerja dalam tekanan politik yang besar, dengan sumber daya dan keberanian yang terbatas. Ada kesan bahwa aparat negara masih ragu untuk benar-benar menyentuh inti kekuasaan lama. Hal ini memperkuat kritik bahwa reformasi hukum belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang Orde Baru. Di sisi visual, halaman ini menampilkan foto demonstrasi masyarakat dengan poster bertuliskan “Adili Gerombolan Soeharto”. Kehadiran foto ini bukan sekadar pelengkap, melainkan kontras tajam dengan sikap elitis dan tertutup elite politik. Foto tersebut merepresentasikan suara publik yang lantang menuntut keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban, berhadapan dengan proses hukum yang berjalan lamban dan penuh kompromi. Tempo menempatkan foto aksi massa di tengah laporan untuk memperlihatkan adanya kesenjangan antara kehendak rakyat dan tindakan negara. Rakyat menginginkan pengadilan dan pembongkaran total kekayaan Soeharto, sementara negara tampak berhati-hati, ambigu, bahkan cenderung ragu (Tempo, 1998).

Dalam sebuah sesi wawancara pada Tahun 2025, tokoh pers legendaris Goenawan Mohamad merefleksikan kembali esensi dari perlawanan dan integritas sebuah institusi media. Beliau menekankan bahwa setiap kata yang dicetak bukan sekadar barisan informasi, melainkan sebuah pernyataan sikap terhadap mereka yang memegang kendali. Ketika ditanya mengenai alasan di balik keberanian Tempo membuat kembali majalah ini, ia menjawab dengan penuh keyakinan:

“Itu bukan tindakan sembrono, melainkan pernyataan moral. Kami ingin menunjukkan bahwa Tempo tidak lahir untuk menyanjung siapa pun, apalagi kekuasaan. Memang ada ketegangan banyak yang berpikir, ‘Jangan dulu, ini terlalu provokatif.’ Tapi justru di situlah tanggung jawab kami. Kalau takut sejak awal, pembredelan benar-benar berhasil

membungkam kami. Keputusan itu, meski berisiko, adalah perlawanan yang tegas. Setiap halaman yang diterbitkan bukan sekadar informasi, tetapi simbol bahwa kami menolak tunduk pada intimidasi dan sensor. Keberanian bukan tanpa rasa takut, tapi tentang tetap melangkah meski ketakutan itu ada.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).



Gambar 4. 35. Majalah Tempo "Mengapa SOEHARTO Menantang"

Edisi 3 Oktober 1998 Hal 19

(Sumber: Data Tempo.co)

Artikel dalam majalah Tempo edisi 3 Oktober 1998 ini mengisahkan momen dramatis kemunculan mantan Presiden Soeharto di gedung Kejaksaan Agung. Narasi dimulai dengan suasana riuh saat pria berusia 77 tahun tersebut hendak meninggalkan lokasi menggunakan mobil jip Mercedes-Benz miliknya. Kerumunan fotografer terus membuntuti dan membidikkan kamera ke arah Soeharto, bahkan hingga menghalangi laju kendaraannya di pintu keluar. Situasi sempat memanas ketika mobil tersebut tertahan di lampu merah depan Kejaksaan Agung, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan masa kekuasaannya dulu ketika jalanan selalu dikosongkan untuknya.

Di tengah kepanasan wartawan, muncul gangguan dari beberapa pengamen jalanan yang ikut mengerumuni mobil. Salah satu pengamen bernama Oji bahkan secara terang-terangan menunjukkan sikap bermusuhan dengan mengacung-acungkan gitarnya dan menyatakan keinginannya untuk memukul sang mantan presiden. Hal ini memaksa beberapa pengawal Soeharto turun dari mobil untuk mengamankan situasi layaknya polisi lalu lintas, bahkan salah satu pengawal terlihat sigap memegang pistol Colt di pinggangnya yang sempat tersenggol fotografer sebelum akhirnya mobil tersebut dapat melaju kencang saat lampu hijau menyala.

Latar belakang kehadiran Soeharto di Kejaksaan Agung dijelaskan sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Jalan Cendana antara Soeharto dengan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib serta Menko Wasbang Hartarto. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengklarifikasi pernyataan Soeharto yang sebelumnya disiarkan melalui Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), di mana ia mengklaim tidak memiliki harta sepeser pun di luar negeri. Namun, narasi artikel ini juga menyoroti adanya kontradiksi besar antara pengakuan tersebut dengan laporan media internasional seperti majalah Forbes yang menaksir kekayaannya mencapai US\$ 4 miliar, serta data dari Christianto Wibisono yang menghitung total kekayaan keluarga besar Soeharto mencapai angka Rp 200 triliun. Artikel ini ditutup dengan kutipan dari pihak kejaksaan yang menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu untuk

memeriksa harta mantan presiden jika ditemukan unsur pidana, meskipun pada saat itu kejaksaan mengaku belum memiliki bukti yang cukup. Di sisi lain, Soeharto sendiri menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan surat kuasa guna mengambil uang di bank luar negeri jika memang terbukti ada, sebagai bentuk pembuktian atas klaim ketidakbersalahannya (Tempo, 1998).



Gambar 4. 36. Majalah Tempo "Mengapa SOEHARTO Menantang"

Edisi 3 Oktober 1998 Hal 20

(Sumber: Data Tempo.co)

Halaman lanjutan dari majalah Tempo edisi 3 Oktober 1998 ini memaparkan langkah-langkah teknis yang diambil oleh Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti pemeriksaan harta kekayaan mantan Presiden Soeharto. Narasi berlanjut pada penyerahan dua konsep surat kuasa dari Soeharto kepada Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib pada hari Jumat sebelumnya. Surat pertama ditujukan agar Kejaksaan Agung dapat menerima dan mentransfer aset atas nama Soeharto di luar negeri untuk dikembalikan kepada pemerintah Indonesia, sementara surat kedua ditujukan langsung kepada bank-bank di luar negeri yang kemungkinan memiliki klien atas nama Soeharto. Namun, surat kuasa tersebut belum ditandatangani karena belum adanya izin dari bank terkait untuk memberikan informasi atau keterangan kepada Jaksa Agung.

Sebagai bagian dari upaya pelacakan, pihak Kejaksaan Agung juga membentuk dua tim pelaksana dengan tugas yang berbeda. Tim pertama difokuskan untuk menangani prosedur jika di kemudian hari ditemukan rekening atas nama Soeharto, sedangkan tim kedua bertugas secara aktif mencari informasi, keterangan, data, serta fakta lapangan mengenai harta kekayaan sang mantan presiden. Selain itu, kejaksaan membentuk tim ahli yang melibatkan tokoh-tokoh hukum dan nasional seperti Adnan Buyung Nasution, T. Mulya Lubis, dan Amien Rais meskipun Amien Rais belakangan menyatakan penolakan dengan harapan tim ini dapat bekerja secara independen dalam memberikan masukan dan kritik.

Langkah-langkah yang diambil aparat kejaksaan ini dinilai sebagai upaya keras, meski terkesan terlambat, untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mendesak adanya transparansi. Jaksa Agung Ghalib menegaskan bahwa pihaknya tidak ragu untuk memeriksa Soeharto jika ditemukan unsur pidana, namun ia meminta masyarakat untuk bersabar karena hingga saat itu belum ditemukan bukti kuat untuk menetapkan status tersangka. Meskipun Ghalib menjelaskan langkah-langkah ini dengan penuh semangat, banyak pihak yang masih meragukan keseriusan pemerintah dalam melacak kasus ini.

Keraguan publik diperkuat oleh pandangan tokoh-tokoh politik, seperti Yusril Ihza Mahendra yang menilai tim pengusut belum memiliki keberanian yang cukup. Narasi artikel ini juga menyoroti adanya kesan kesungkungan dari pemerintahan Presiden Habibie untuk memeriksa Soeharto secara mendalam. Hal ini tercermin dari pernyataan Ghalib yang terkesan merendahkan dengan mengaku merasa lega karena Soeharto bersedia dimintai keterangan, sebuah sikap yang dianggap ganjil mengingat posisi Ghalib sebagai pejabat yang secara hukum memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki kekayaan warga negara yang diduga berasal dari hasil korupsi (Tempo, 1998).



**Gambar 4. 37. Majalah Tempo "Mengapa SOEHARTO Menantang"
Edisi 3 Oktober 1998 Hal 22**

(Sumber: Data Tempo.co)

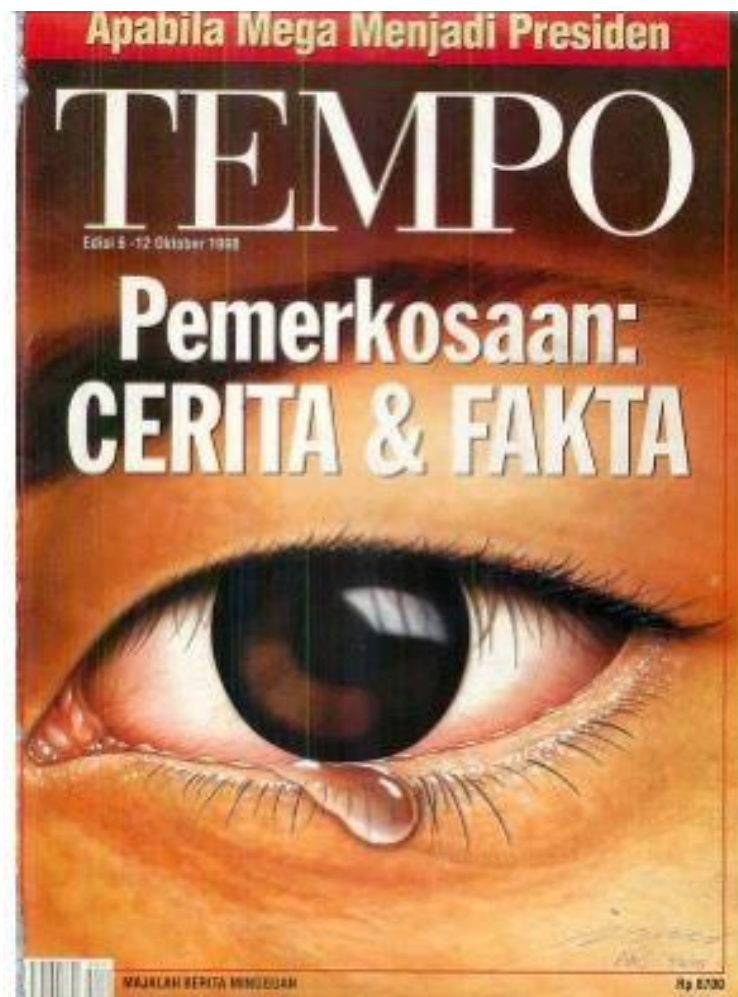
Dalam majalah TEMPO edisi 3 Oktober 1998 ini menyajikan juga sebuah narasi jurnalistik yang sangat kuat mengenai titik balik sejarah militer di Indonesia pasca-tumbanganya Orde Baru. Laporan bertajuk "Hankam Dijaga, Sospol Dilepaskan?" ini secara mendalam mengulas tuntutan reformasi internal di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang saat itu sedang berada di bawah sorotan tajam publik. Fokus utama tulisan ini adalah desakan masif agar militer segera meninggalkan peran sosial-politiknya dan kembali sepenuhnya kepada fungsi utama sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara.

Kekecewaan masyarakat digambarkan dengan sangat gamblang melalui aksi-aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah, terutama di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di sana, muncul ungkapan kemarahan yang sangat radikal melalui spanduk bertuliskan "*O to hell with ABRI*", sebuah kalimat yang mencerminkan betapa rusaknya hubungan emosional antara rakyat dan militer pada masa itu. Secara visual, narasi ini diperkuat oleh foto demonstrasi yang menunjukkan massa membawa poster karikatur seorang tentara yang diikat dengan tulisan tegas "Bersihkan Parlemen dari Militer!", yang menuntut penghapusan jatah kursi militer di lembaga legislatif.

Tulisan tersebut juga membedah akar dari kemarahan publik, yakni terungkapnya berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan keterlibatan militer dalam urusan sipil yang terlalu jauh. Artikel ini menyebutkan bahwa citra ABRI hancur akibat terbongkarnya berbagai "dosa" politik masa lalu, mulai dari kasus penculikan aktivis pro-demokrasi hingga kekerasan militer di wilayah-wilayah seperti Aceh, Timor Timur, dan peristiwa Tanjung Priok yang selama bertahun-tahun tertutup rapat. Penempatan anggota militer aktif dalam birokrasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan peran ganda yang tidak lagi relevan dengan semangat reformasi.

Di sisi lain, majalah ini juga memotret dinamika yang terjadi di internal militer sendiri, di mana para petinggi ABRI mulai menyadari bahwa perubahan adalah sebuah keharusan. Dalam sebuah seminar penting bertajuk

"Peran ABRI Abad XXI" yang diadakan di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI di Bandung, terjadi perdebatan mengenai bagaimana militer harus mendefinisikan kembali jati dirinya. Letnan Jenderal (Purn.) Z.A. Maulani, yang saat itu menjabat sebagai Kepala BAKIN, mengakui dalam forum tersebut bahwa penggunaan "baju dobel" oleh militer telah menimbulkan masalah besar bagi citra institusi. Narasi penutup artikel ini menyiratkan bahwa meskipun proses redefinisi peran sedang dirancang, tekanan dari luar tetap menjadi faktor penentu utama bagi masa depan militer yang lebih demokratis di Indonesia (Tempo, 1998).



Gambar 4. 38. Sampul Majalah Tempo "Pemeriksaan: CERITA & FAKTA" Edisi 6-12 Oktober 1998

(Sumber: Data Tempo.co)

Majalah Tempo kembali terbit pada edisi 6–12 Oktober 1998 dengan mengusung laporan utama berjudul “Pemeriksaan: CERITA & FAKTA”. Terbitnya edisi ini menjadi penanda penting bangkitnya kembali pers independen di tengah euforia sekaligus kegamangan awal Reformasi. TEMPO tidak hanya kembali hadir sebagai media, tetapi juga sebagai ruang keberanian untuk mengungkap kebenaran yang selama ini dibungkam, khususnya terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998. Kehadiran edisi tersebut mempertegas peran TEMPO sebagai media yang berpihak pada korban dan kebenaran, sekaligus menunjukkan perubahan iklim politik yang memungkinkan isu-isu sensitif yang sebelumnya dianggap tabu dan diangkat ke ruang publik. Dalam konteks inilah, laporan-laporan TEMPO pada Oktober 1998 harus dibaca bukan sekadar sebagai produk jurnalistik, melainkan sebagai dokumen sejarah yang merekam pergulatan bangsa menghadapi masa lalunya sendiri.

Dalam laporan tersebut, Tempo menghadirkan kesaksian korban dan fakta lapangan yang membuktikan bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan bukanlah rumor, melainkan kenyataan pahit yang dialami oleh warga negara Indonesia karena identitas etnis mereka. Goenawan mengenang keputusan untuk memuat laporan itu sebagai momen yang penuh pertimbangan. Ia berkata:

“Langkah itu sangat berat. Kami sadar bahwa publikasi ini bisa memicu reaksi keras dari kekuasaan, bahkan ancaman langsung terhadap redaksi dan staf. Tapi menutup mata dan diam sama saja dengan mengkhianati nurani jurnalistik kami. Saat itulah kami memutuskan untuk menulis, bukan bersembunyi. Tempo menegaskan dirinya sebagai media yang berkomitmen pada kebenaran dan keadilan sosial, bukan sekadar alat politik atau sensasi pasar. Setiap kata yang kami tulis menjadi pernyataan moral: bahwa integritas jurnalistik harus dijaga meski berada di bawah tekanan terbesar sekalipun, dan bahwa suara kebenaran tidak boleh dibungkam oleh takut atau intimidasi.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).



Gambar 4. 39. Majalah Tempo "Pemeriksaan: CERITA & FAKTA"
Edisi 6-12 Oktober 1998 Hal 15

(Sumber: Data Tempo.co)

Artikel opini dari Majalah TEMPO edisi 12 Oktober 1998 yang berjudul "Pemeriksaan, Cerita, Fakta" menyajikan sebuah narasi mendalam mengenai pergulatan antara kebenaran pahit dan keraguan publik terkait tragedi Mei 1998. Tulisan ini diawali dengan penegasan bahwa meskipun banyak cerita yang beredar, hal itu tidak mengurangi fakta bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan keturunan Tionghoa benar-benar terjadi. Penulis

menekankan bahwa laporan mengenai korban seperti Mona dan gadis-gadis lainnya bukanlah sekadar teriakan kosong, melainkan sebuah realitas di mana mereka dijadikan sasaran karena ras mereka. Inti dari pembahasan ini menyoroti perdebatan mengenai validitas data antara Tim Relawan Kemanusiaan yang dipimpin oleh Romo Sandyawan dengan penilaian dari Human Rights Watch (HRW) Asia. Tim Relawan melaporkan adanya 168 korban pemerkosaan massal dalam waktu dua hari yang diduga dilakukan secara terorganisasi. Namun, HRW bersikap lebih skeptis dengan menyatakan bahwa jumlah yang dapat diverifikasi secara fisik berada di bawah angka tersebut, kemungkinan besar akibat suasana kacau saat itu yang mempersulit pengecekan fakta secara akurat. Meski terdapat perbedaan angka, artikel ini secara bijak memposisikan bahwa ketidakmampuan membuktikan sebuah kasus secara hukum bukan berarti peristiwa itu tidak pernah terjadi.

Lebih jauh, narasi ini membawa pembaca pada refleksi sejarah mengenai "politik angka." Penulis memberikan perbandingan dengan peristiwa besar lainnya, seperti jumlah korban pasukan Westerling di Sulawesi, tragedi 1965, hingga Holocaust di Eropa, di mana angka korban selalu menjadi bahan perdebatan yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Dalam konteks Mei 1998, artikel ini membela kepentingan Tim Relawan sebagai "kepentingan yang tidak menjijikkan." Hal ini dianggap sebagai bentuk advokasi suci untuk menarik perhatian masyarakat pada kejahatan yang kotor dan melindungi mereka yang tak berdaya, bukan untuk mencemarkan nama baik bangsa.

Pada akhirnya, keberanian Tim Relawan dan gerakan lainnya, seperti Solidaritas Nusa Bangsa yang dipimpin Ester Jusuf, dinilai telah berhasil mengguncang kesadaran publik dan memaksa pemerintah untuk bertindak. Meskipun awalnya menyangkal, desakan dari masyarakat dan data yang terus muncul diperkuat oleh jajak pendapat yang menunjukkan mayoritas publik percaya pada kejadian tersebut akhirnya membuat pemerintah melunak. Artikel ditutup dengan catatan bahwa pengakuan dari Menteri Kehakiman saat itu menjadi titik balik penting di mana pemerintah akhirnya mengakui

bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan keturunan Tionghoa memang benar terjadi, sebuah kemenangan moral di tengah kabut ketidakpastian fakta (Tempo, 1998).



INVESTIGASI

Jalan Panjang Tragedi Itu

Kontroversi pemerkosaan Mei belum berakhir. Juga, perdebatan yang meragukan cara kerja Tim Relawan. Oktober ini, TGPF akan membuka fakta-fakta penemuannya.

Anders Levinson dan Ita Nadia belum pernah berkenalan. Keduanya tak punya hubungan apa pun. Tapi, mereka sekaligus punya kesamaan yang unik. Levinson dan Ita akan selalu mengingatkan kita pada pemerkosaan massal perempuan Bosnia.

Dalam sebuah wawancara kepada *The Guardian*, akhir Desember 1992, Levinson menegaskan telah terjadi pemerkosaan massal di Bosnia. Ia menyebutkan, 30.000 hingga 50.000 wanita dinodai dan dirusak kelaminnya oleh tentara Serbia di 17 kamp pengungsi. Bekas Ketua Komisi PBB untuk Bantuan Pengungsi itu juga menegaskan, pemerkosaan itu merupakan bagian dari usaha pembersihan etnis Bosnia yang direkayasa Serbia.

Hal yang sama dijelaskan Ita Fatia Nadia dalam sebuah wawancara pada Agustus 1998. Bukan di *The Guardian*, tentu saja, tapi kepada Dr. Sjalir dalam acara televisi Info Untuk Anda. Dalam acara yang ditayangkan Indosiar pada Sabtu, 8 Agustus, pukul 07.00 itu, Ia menyebutkan pemerkosaan terhadap etnis Cina dalam kerusuhan Mei 1998 sama dengan aksi pemerkosaan massal di Bosnia.

Sebelumnya, 13 Juli 1998, koordinator divisi kekerasan terhadap perempuan dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan ini menandatangani Dokumen Awal No. 3. Dokumentasi setebal 19 halaman ini merencan data-data pemerkosaan Mei, dilengkapi berbagai tabel. Di situ tertera korban pemerkosaan dan pelecehan seksual massal yang melapor sampai 3 Juli 1998. Jumlahnya, 168. Dari Jakarta dan sekitarnya, 152. Sisanya (16) dari Solo, Medan, Palembang, dan Surabaya.

Pernyataan ini kontan mengundang sambutan, kritik, protes, dan perdebatan. Di dalam dan luar negeri. Sebab, tanah kata,

angka 168 di atas tak terbantahkan kebenarannya, inilah pemerkosaan massal paling dahsyat di Indonesia dalam sejarah abad XX. Bandingkan dengan pemerkosaan di Aceh saja, misalnya; 600 orang dalam sembilan tahun—berdasarkan wawancara dengan Drs. Hasbullah M. Saad M.S., dari Forum Peduli Hak Asasi Manusia. Dengan lain kata, angka 168 untuk pemerkosaan dalam beberapa hari kerusuhan memang luar biasa.

Banyak reaksi dan kritik muncul menyusul publikasi Tim Relawan. Kepala Kepolisian RI, Letnan Jenderal Roesmanahadi, memberi pernyataan. Menurut dia, selama tidak ada bukti, pemerkosaan itu tidak ada. Kolonel Gories Mere, Kepala Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, kemudian muncul di televisi. Pernyataannya, "Polisi sudah menyelidik hingga 103 kasus, tapi tidak pernah kami dapatkan bukti konkrit."

Polda Metro Jaya dalam penelitian tersebut menurunkan Tim Merpati (lihat *Merpati Gagal Menemui Korban*). Tim penyelidikan yang dikomandani Kapolda Noegroho Djajusman ini terdiri dari para polisi maupun polwan yang turun ke lapangan menyelidik para korban pemerkosaan. Sedangkan Gories Mere menjadi kepala pelaksana lapangan.

Sementara itu, di beberapa kota besar di dunia muncul sejumlah protes dan demonstrasi terhadap pemerintah Indonesia. Tuntutannya, meminta pemerintah RI mengusut tuntas kasus pemerkosaan. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KRI) di Boston, Beijing, Bangkok, Hong Kong mendapat kunjungan "tamu-tamu khusus" itu di luar pagar KRI.

Di Taipei, pejuang hak-hak perempuan, politisi, ekonom, dosen, bersama-sama mendesak pemerintah Taiwan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Indonesia. Huang Zel-

TIM INVESTIGASI
Redaktur Pelaksana: Wahyu Muryadi
Penulis: Hermin Y. Kicson, Arianisa Bramasutarna, Mardiyah Chaim
Reporter: Iwan Setiawan, Andri Karna, Anam Herdi H. Hamman
Periset Foto: Galat Sri Widodo
Redaktur Desain: Glang Sabarun

MEREKA BERICARA

					
ESTER JUSUF (Korban Solidaritas Nusa Bangsa) Saya tidak tahu bagaimana persisnya metoda pengumpulan data tim relawan. Kami sendiri baru menemukan 176 korban pemerkosaan Mei.	GORIES MERRE (Kadiserse, Polda Metro Jaya) Polisi telah menyelidik hingga 103 kasus, namun tidak pernah kami dapatkan bukti konkrit...	ROMO SANDIYAWAN (Tim Relawan untuk Kemanusiaan) Korban pemerkosaan dan pelecehan seksual massal yang melapor sampai 3 Juli 1998 jumlahnya 168 orang. Setelah diverifikasi angka korban bisa jadi justru meningkat.	TUTTY ALAWIYAH (Menteri Negara Urusan Pemasaran) Kalau memang sudah ada data, kami akan segera menghubungi Komnas, karena kita memang sejalan untuk menyelesaikan masalah ini...	SYDNEY JONES (Direktur Eksekutif Asia Watch) Kami menyebarkan jumlah yang mungkin lebih rendah berdasarkan pengujian beberapa kasus. Data tim relawan terkumpul dari berbagai sumber yang tidak seragam kredibilitasnya.	MARZUKI DARUSMAN (Ketika Tim Gabungan Peran Fiskal) Berdasarkan hasil testimoni dan kesaksian serta informasi dari saksi ahli, hingga kini kami yakin telah terjadi penyengatan seksual, termasuk pemerkosaan, dalam peristiwa 13-15 Mei 1998.

56 TEMPO, 12 Oktober 1998

Gambar 4. 40. Majalah Tempo "Pemukosaan: CERITA & FAKTA"
Edisi 6-12 Oktober 1998 Hal 56

(Sumber: Data Tempo.co)

Artikel dalam majalah Tempo edisi 12 Oktober 1998 ini menyajikan sebuah laporan mendalam mengenai pergulatan mencari keadilan atas tragedi kemanusiaan yang terjadi selama Kerusuhan Mei 1998. Narasi dibuka dengan

sebuah perbandingan yang tajam antara peristiwa di Indonesia dengan tragedi pembersihan etnis di Bosnia. Penulis menyandingkan sosok Anders Levinsen, mantan Ketua Komisi PBB, dengan aktivis kemanusiaan Ita Nadia. Keduanya ditarik dalam satu garis merah karena sama-sama berupaya menyuarakan fakta tentang pemerkosaan massal sebagai senjata kekerasan. Ita Nadia secara tegas menyebut bahwa pola kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa di Jakarta memiliki kesamaan metodis dengan apa yang terjadi di Bosnia, sebuah pernyataan yang langsung memantik diskusi panas di ruang publik.

Ketegangan dalam artikel ini memuncak ketika memaparkan data yang dirilis oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Berdasarkan dokumen yang mereka susun, tercatat ada 168 korban kekerasan seksual yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Solo, dan Medan. Namun, pengungkapan data ini tidak berjalan mulus karena langsung berhadapan dengan tembok penyangkalan dari pihak otoritas keamanan. Kapolri saat itu, Letnan Jenderal Roesmanhadi, menyatakan bahwa tanpa adanya bukti fisik atau saksi yang melihat langsung, kasus pemerkosaan tersebut tidak bisa dianggap ada. Senada dengan itu, Gories Mere dari Polda Metro Jaya mengeklaim bahwa meskipun pihaknya telah menyelidiki ratusan kasus, mereka tetap tidak menemukan bukti konkret di lapangan yang bisa dijadikan landasan hukum.

Kondisi di dalam negeri yang penuh perdebatan ini rupanya mendapat sorotan tajam dari dunia internasional. Majalah ini mencatat bagaimana kemarahan meluas hingga ke luar negeri, di mana gelombang demonstrasi melanda kantor-kantor KBRI di Boston hingga Hong Kong. Di Taipei, tekanan bahkan datang dalam bentuk desakan sanksi ekonomi terhadap Indonesia. Dunia menuntut agar pemerintah Indonesia mengusut tuntas kasus ini tanpa menutup-nutupi fakta. Tekanan global inilah yang kemudian menjadi latar belakang penting bagi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang saat itu dipimpin oleh Marzuki Darusman.

Narasi artikel ini kemudian ditutup dengan menampilkan beragam perspektif dari tokoh-tokoh kunci melalui rubrik "Mereka Berbicara". Di sini terlihat

adanya kontras yang nyata: di satu sisi, para aktivis seperti Romo Sandyawan dan Ester Jusuf tetap teguh pada temuan lapangan mereka mengenai adanya korban nyata. Di sisi lain, tokoh seperti Sydney Jones dari Asia Watch memberikan catatan kritis mengenai perlunya verifikasi data yang lebih ketat karena sumber yang tidak seragam. Namun, pada akhirnya, Marzuki Darusman sebagai ketua TGPF menegaskan keyakinan timnya bahwa serangan seksual tersebut memang benar-benar terjadi sebagai bagian dari rangkaian peristiwa kelam pada 13-15 Mei 1998, sebuah pengakuan penting di tengah upaya penyangkalan yang masif (Tempo, 1998).



Gambar 4. 41. Majalah Tempo "Pemeriksaan: CERITA & FAKTA"
Edisi 6-12 Oktober 1998 Hal 58

(Sumber: Data Tempo.co)

Lanjutan laporan investigasi Majalah Tempo edisi 12 Oktober 1998 ini memperdalam narasi mengenai reaksi keras dunia internasional serta polemik seputar kebenaran data dan bukti fisik yang beredar di publik. Narasi berlanjut dengan menggambarkan kemarahan di luar negeri, di mana tokoh pejuang wanita Taiwan, Huang Zelling, menyerukan sanksi ekonomi terhadap Indonesia sebagai hukuman atas pemerkosaan massal tersebut. Di Hong Kong, tensi bahkan lebih tinggi dengan adanya aksi pelemparan telur busuk ke Konsulat Jenderal RI. Tercatat terjadi 17 kali demonstrasi yang melibatkan sekitar 4.000 orang antara bulan Juli hingga Agustus 1998. Di tengah situasi ini, 11 anggota LSM Taiwan berkunjung ke Jakarta untuk menemui tokoh-tokoh seperti Gus Dur dan Menteri Tutty Alawiyah guna mengumpulkan data. Muncul sebuah klaim kontroversial dari Menteri Penerangan Yunus Yosfiah yang menyebut bahwa pemerintah RI merasa "dikerjai" oleh organisasi-organisasi yang dianggap mendramatisasi keadaan. Namun, klaim tersebut segera dibantah oleh Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taiwan melalui pengacara Wang Ching-Feng yang menyatakan tidak pernah membuat pernyataan semacam itu.

Ketegangan narasi kemudian beralih ke dunia maya, di mana sebuah situs internet bernama VOICE (*Victimization of Indonesian Chinese Ethnicity*) menjadi pusat perhatian. Di situs ini, muncul kisah yang sangat mengerikan tentang "Venny", yang disebut diperkosa oleh lima laki-laki di Apartemen Mitra Bahari, Pluit. Kisah ini sempat menghebohkan publik sebelum akhirnya dilakukan pengecekan lapangan oleh pers dan aktivis. Pihak pengelola apartemen, Bob Sidharta dan Mualim, membantah adanya pemerkosaan dan menyatakan bahwa yang terjadi di lokasi tersebut hanyalah penjarahan. Ester Jusuf dari LSM Solidaritas Nusa Bangsa juga menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa berdasarkan pengakuan penghuni apartemen, mereka tidak pernah mendengar adanya pemerkosaan di lokasi tersebut.

Bagian akhir narasi menyoroti masalah kredibilitas bukti visual yang beredar luas di internet. Harian Asian Wall Street Journal mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan bahwa banyak foto pemerkosaan yang diklaim terjadi di

Jakarta ternyata adalah hasil manipulasi. Beberapa foto tersebut bahkan berasal dari situs web di Amerika Serikat yang sudah beredar jauh sebelum peristiwa Mei 1998 terjadi. Meskipun Romo Sandyawan secara tegas menyatakan bahwa foto-foto tersebut palsu, asal-usul penyebarannya tetap menjadi misteri yang memperkeruh upaya pengungkapan kebenaran yang sesungguhnya di tengah simpang siurnya informasi (Tempo, 1998).



■ Romo Sandyawan Sumardi, S.J.

"Jumlah Korban Bisa Bertambah"

ROMO Sandyawan Sumardi rupanya sedang puasa bicara kepada pers. Apalagi jika ditanya soal kasus pemerkosaan medio Mei. "Agar suasana mendingin dulu," katanya. Padahal, gelombang kontroversi memang berpusar kencang di sekeliling sekretaris Tim Relawan untuk Kemanusiaan ini. Romolah yang pertama kali berani bicara lantang: jumlah korban pemerkosaan mencapai 168 orang—dan reaksi internasional pun memojokkan pemerintah. Bagaimana Romo sampai pada kesimpulan itu? Berikut penuturannya kepada Iwan Setiawan dari TEMPO, akhir September lalu.

Semula Tim Relawan menyebut 168 orang yang diperkosa pada kerusuhan Mei lalu. Setelah diselidiki, berapa jumlahnya?

Saat ini saya tidak mau menyebutkannya. Sudah menjadi kesepakatan dari Tim Relawan, kami baru akan memberi tahu angka pasti korban setelah TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) mengumumkan hasil temuannya. Orang sering berasumsi bahwa setelah verifikasi, jumlahnya berkurang. Bisa jadi justru meningkat karena ada korban yang baru melapor.

Tapi, menurut Sidney Jones dari Asia Watch, metode pengumpulan data Anda lemah....

Tidak benar pengambilan data Tim Relawan dilakukan asal-asalan, misalnya hanya lewat telepon atau internet. Kami hanya memasukkan data yang diperoleh langsung dari sumber primer: korban atau keluarganya. Sehingga, kami punya data lengkap korban, mulai dari nama, umur, alamat, kapan korban diperkosa, dan tempat terjadinya.

Sebelum kasus ini, hubungan Sidney dengan LSM di Indonesia baik. Termasuk dengan saya. Selama ini ia dikenal sebagai pembuat laporan yang baik. Tapi, kali ini Sidney berlaku naif. Ia melakukan investigasi dengan mencari korban langsung di rumah-rumah sakit. Tentu saja para dokter menutupinya. Kesalahan ini seperti kesalahan polisi. Seharusnya ia tahu, dokter tidak berhak memberikan data tanpa persetujuan pasien.

Sampai ada seorang dokter yang merawat korban protes. Ternyata, Sidney mendatangnya dan mengukunya mendapat izin saya untuk menemui korban. Kasus semacam ini sering terjadi. Selain itu, ia mengumpulkan data hanya dalam waktu satu setengah minggu. Jadi, datanya sangat lemah. Dasar penilaiannya atas data tim relawan juga lemah karena ia tidak pernah mempelajari data yang kami buat. Ia cuma melihatnya

sekilas di Kalyanamitra (LSM yang menangani persoalan perempuan).

Jadi, benar terjadi pemerkosaan massal?

Ya, benar. Buktinya, dalam waktu singkat, pada 13-14 Mei, terjadi banyak pemerkosaan di wilayah yang amat luas dan waktunya hampir bersamaan. Dan jelas, itu terorganisasi. Pemerkosaan berlangsung sistematis. Dengan pola dan modus operandi yang seragam. Pelakunya dua atau tiga orang dan dilaksanakan secara cepat.

Adakah korban yang berani bersaksi?

Ya. Tapi kapan mereka akan bersaksi, saya tidak tahu. Untuk membuat mereka berani bersaksi, butuh waktu lama untuk menyembuhkan traumanya lebih dulu. Apalagi jika keluarga korban terus diteror seperti sekarang. Kami para pendamping juga diteror lewat telepon, walau sejauh ini belum terjadi penganiayaan fisik. Saya sendiri pernah didatangi tiga orang. Mereka bilang, membunuh saya adalah perkara mudah. Tapi yang membuat saya khawatir, takut, dan marah, adalah pengakuan mereka sendiri yang mereka para pemerkosa pada kerusuhan Mei lalu. Mereka juga mengancam memerkosa empat gadis keturunan Tionghoa yang sedang bersama saya saat itu.

Bagaimana ciri-cirinya?

Ketiganya berbadan kekar, berambut pendek, gaya bicaranya tegas dan tidak suka dibantah. Melihat caranya mengintimidasi, mereka terlihat sangat profesional.

Ada indikasi keterlibatan militer?

Dari bukti-bukti yang kami dapat di lapangan, agak sulit untuk langsung mengatakan militer terlibat.

Anda menemui langsung korban?

Ya. Saya menemui lebih dari 15 korban. Sebagian besar kondisinya amat memprihatinkan. Rata-rata stres berat, bahkan ada yang gila.

Yang Anda bawa ke Kongres AS dan Jenewa bukan korban pemerkosaan Mei....

Benar. Di depan Kongres saya jelaskan bahwa ia adalah korban pemerkosaan bulan Juni di Jakarta. Tetapi, menurut pengakuannya kepada saya, ketiga pemerkosanya itu bilang ikut memerkosa pada bulan Mei. Jadi, jelas, peristiwa setelah Mei berhubungan erat dengan pemerkosaan Mei.

Bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? Diajukan ke meja hijau?

Hukum di Indonesia terlalu sempit untuk mengusut pemerkosaan massal. Kasus ini juga berbeda dengan yang terjadi di Bosnia dan Rwanda. Di sana suasana kan peperangan. Di sini tidak. Pemerkosaan dipilih sebagai satu bentuk teror karena dampaknya yang demikian buruk. Jadi, pendekatan dari segi hukum saja tidak mencukupi. Bisa jadi, korban malah dianggap tidak ada karena bukti dan saksi yang ada dinilai tidak mencukupi.

Maka, perlu ada pendekatan ekstrasudial. Harus ada usaha simultan dari pemerintah dan masyarakat untuk membongkar jaringan pelaku kekerasan itu. Saya yakin, pemerkosaan ini terkait dengan peristiwa penjarahan dan pembunuhan. Rakyat kecil kan cuma jadi tumbal. Sesulit apa pun, kami akan berupaya membawanya ke pengadilan. Kita harus mencoba semua jalan. ■



66
TEMPO, 12 Oktober 1998

Gambar 4. 42. Majalah Tempo "Pemeriksaan: CERITA & FAKTA"

Edisi 6-12 Oktober 1998 Hal 66

(Sumber: Data Tempo.co)

Artikel investigasi dari majalah TEMPO edisi 12 Oktober 1998 ini menyajikan sebuah narasi mendalam mengenai perjuangan Romo Sandyawan Sumardi, S.J. dalam mengungkap tragedi pemerkosaan massal yang menyertai kerusuhan Mei 1998. Di tengah suasana politik yang masih memanas, Romo Sandyawan yang menjabat sebagai Sekretaris Tim Relawan untuk Kemanusiaan menjadi sosok kunci yang berani menyuarakan fakta bahwa jumlah korban pemerkosaan mencapai angka yang mengejutkan, yakni 168 orang. Pernyataan ini tidak hanya memicu kontroversi di dalam negeri tetapi juga menarik perhatian dunia internasional hingga membuat pemerintah Indonesia saat itu merasa terpojok.

Dalam percakapannya dengan Iwan Setiawan dari TEMPO, Romo Sandyawan menjelaskan bahwa meskipun ada tekanan untuk memastikan jumlah pasti korban, ia meyakini angka tersebut justru bisa terus bertambah seiring dengan banyaknya korban baru yang mulai berani melapor setelah proses verifikasi dilakukan. Ia juga memberikan pembelaan yang kuat terhadap metodologi pengumpulan data timnya yang sempat dikritik oleh Sidney Jones dari Asia Watch. Romo menegaskan bahwa data mereka didapat langsung dari sumber primer, yakni korban dan keluarganya, mencakup detail identitas yang lengkap, sehingga ia menganggap kritik Sidney Jones yang hanya melakukan investigasi singkat di rumah sakit sebagai tindakan yang naif dan tidak memahami kode etik medis.

Narasi dalam artikel ini juga mengungkap kengerian yang sistematis di balik peristiwa tersebut. Romo Sandyawan memaparkan bahwa pemerkosaan yang terjadi pada 13 hingga 14 Mei dilakukan secara terorganisir di wilayah yang luas dalam waktu yang hampir bersamaan. Para pelaku digambarkan memiliki ciri fisik yang serupa, yakni berbadan kekar, berambut pendek, dan menunjukkan sikap yang sangat profesional dalam mengintimidasi korban. Meskipun sulit untuk secara langsung menunjuk keterlibatan militer secara institusional, pola serangan yang rapi menunjukkan adanya koordinasi yang matang. Romo sendiri tidak luput dari ancaman; ia menceritakan pengalaman pribadinya didatangi oleh orang-orang yang mengaku sebagai perekrut massa

pemerksa dan mengancam keselamatan para gadis keturunan Tionghoa yang sedang ia lindungi.

Kondisi para korban digambarkan sangat mengenaskan, di mana mayoritas mengalami stres berat hingga gangguan jiwa akibat trauma yang mendalam. Di akhir narasi, Romo Sandyawan menyuarakan keraguan terhadap sistem hukum Indonesia yang dianggapnya terlalu sempit untuk menangani kasus pemerkosaan massal yang digunakan sebagai alat teror. Ia menyerukan perlunya upaya ekstralégal dan kerja sama antara pemerintah serta masyarakat untuk membongkar jaringan pelaku kekerasan ini hingga ke akarnya. Baginya, meskipun rakyat kecil sering kali dijadikan tumbal dalam pergolakan politik, keadilan harus tetap diperjuangkan melalui segala jalur hukum yang tersedia (Tempo, 1998).

Di tengah upaya mengungkap berbagai pelanggaran kemanusiaan yang mengiringi masa transisi Reformasi, suara para jurnalis senior menjadi rujukan penting untuk memahami makna peristiwa tersebut secara lebih jernih. Goenawan Mohamad berkata:

“Peristiwa itu menunjukkan kekerasan yang tidak terjadi secara spontan, melainkan bergerak dengan pola yang rapi dan terkoordinasi. Kesaksian para korban mengungkap adanya teror yang dijalankan secara sistematis, sementara hukum formal sering kali tidak cukup kuat untuk menjangkaunya. Karena itu, kebenaran harus dibuka dengan keberanian moral agar keadilan bagi para korban tetap diperjuangkan.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

PEMERKOSAAN DIBULAN MEI 1998

■ Sidney Jones

"Debat Pemerksaan Cenderung Destruktif"

ANGKA adalah simpul penting dalam kasus pemerksaan massal bulan Mei lalu. Tim Relawan yang dimotori Romo Sandiawan, S.J. mencatat ada 168 korban pemerksaan—angka yang mengundang kekagetan sekaligus keraguan. Debat kian hangat ketika lembaga hak asasi Asia Watch menyangsikan data Tim Relawan. Berikut ini wawancara TEMPO dengan Sidney Jones, Direktur Eksekutif Asia Watch.

Asia Watch melaporkan jumlah korban pemerksaan massal yang lebih sedikit dibandingkan dengan versi Tim Relawan. Bisa Anda jelaskan alasannya?

Kami menyebut jumlahnya mungkin lebih rendah berdasarkan pengujian beberapa kasus, meskipun kami juga mempertimbangkan kasus pemerksaan yang tidak dilaporkan. Data Tim Relawan terkumpul dari berbagai sumber yang tidak seragam kredibilitasnya. Sebagai sumber, kredibilitas dokter yang menangani korban tentu lebih tinggi. Ini lain dengan seorang pejalan kaki yang menyaksikan perempuan yang stres dan menyangkannya sebagai korban pemerksaan.

Pada beberapa kasus, sebagian dari laporan itu mungkin kredibel. Tapi sebagian lainnya tidak. Misalnya, seseorang melihat tetangganya diperksa dan lantas meninggal di Singapura. Penting bagi si pewawancara untuk bertanya bagaimana dia tahu tempat si korban meninggal. Bila laporan bersumber dari telepon seseorang yang panik, memang mustahil menanyakan hal yang detail. Lebih baik abaikan saja data yang meragukan dan gunakan yang betul-betul *verifiable*, yang bisa dicek, dan berasal dari sumber independen.

Apakah Anda pernah bertemu dengan korban pemerksaan selama melakukan investigasi?

Saya tidak bertemu dengan korban selama kunjungan saya ke Indonesia, tapi itu tidak berarti saya berpendapat pemerksaan tidak ada. Sewaktu saya di Jakarta, pertengahan Agustus lalu, beberapa pejabat membantah data Tim Relawan dan itu adalah klimaks rasa skeptis dan tidak percaya. Dalam situasi begitu, tidak mungkin korban pemerksaan mau menemui orang asing.

Kabarinya, Anda bertemu dengan korban yang dibawa Romo Sandi ke Washington?

Saya memang bertemu dengan korban yang dibawa Romo Sandi ke Washington. Dia diperksa pada bulan Juni oleh laki-laki yang mengaku memerksa perempuan Cina saat kerusuhan Mei.

Ada kecurigaan bahwa pemerksaan Mei itu terorganisasi dan sistematis, semacam *ethnic cleansing* di Bosnia. Bagaimana pendapat Anda?

Saya tidak punya cukup informasi untuk menyatakan ada pemerksaan sistematis. Angka adalah poin penting dalam isu ini. Dua orang diperksa dalam tiga hari tidak bisa menjadi bukti adanya organisasi di belakangnya. Bila kasusnya di atas 100, indikasi pemerksaan terorganisasi lebih kuat. Tapi, untuk membuktikan ada pemerksaan sistematis pada etnis Cina, dibutuhkan bukti yang lebih kuat ketimbang yang selama ini saya dapatkan.

Apa yang Anda lihat sebagai poin utama dalam kasus pemerksaan massal?

Debat ada tidaknya pemerksaan cenderung destruktif. Ada bukti yang lebih kuat untuk bentuk kekerasan lain yang terorganisasi seperti penjarahan atau pembakaran rumah dan toko. Bila bukti penjarahan bisa menuju proses pengadilan, dengan sendirinya tuntutan pembuktian pemerksaan akan lebih tinggi. Dua jenis pelanggaran itu berkaitan.

Kekawatiran saya, ketakutan pada pemerksaan digunakan untuk mengeror etnis Cina. Beberapa elemen rasial ekstrem sedang tumbuh di Indonesia seiring dengan iklim politik yang mulai terbuka. Mereka percaya bahwa etnis Cina bisa diancam dengan ketakutan akan pemerksaan. Satu-satunya jalan untuk meng-counter ini adalah dengan memastikan bahwa data pemerksaan itu solid dan bukan desas-desus.

Apakah Anda pernah menjumpai kasus serupa ini di luar negeri?

Kolega saya di Bosnia menemukan kesulitan yang sama dalam investigasi pemerksaan. Di sana terbukti jelas bahwa pemerksaan memang terjadi. Ada lebih dari 30 ribu kasus yang dilaporkan. Tim PBB memperkirakan ada sekitar 800 pemerksaan selama perang yang lebih dari setahun. Beberapa pihak percaya angkanya lebih rendah. Memang pemerksaan adalah pelanggaran hak asasi yang paling susah diinvestigasi. Bila ada sebuah mal terbakar, mayat yang terbakar bisa dihitung. Tapi tidak gampang menghitung perempuan yang mengalami trauma atau terlalu takut akan stigma sosial untuk melaporkan apa yang terjadi.

Aksi advokasi sering memakai statemen yang hiperbolik. Bagaimana strategi yang terbaik? Teliti dengan fakta, dengan risiko kehilangan perhatian sosial, atau mendramatisasi insiden?

Saya tidak percaya hiperbol bisa membantu penegakan hak asasi. Dan tidak ada hubungan hiperbol dengan kasus ini. Yang terjadi adalah situasi *chaos* yang dilaporkan berbagai grup, terkadang dengan telepon. Banyak di antaranya yang tidak mungkin dituliskan dengan detail. Pilihannya memotong kasus yang banyak guna mendapat yang sedikit tapi kuat. Dalam Kasus 27 Juli, saat itu dilaporkan lebih dari 100 orang hilang, dan setelah pengecekan yang ketat oleh Komnas HAM—bahkan sampai *door to door*—jumlah yang hilang tinggal puluhan. Untuk kasus pemerksaan, memang perlu waktu untuk mendapat gambaran nyata. ■



TEMPO, 12 Oktober 1998 67

Gambar 4. 43. Majalah Tempo "Pemerksaan: CERITA & FAKTA"
Edisi 6-12 Oktober 1998 Hal 67

(Sumber: Data Tempo.co)

Artikel dalam Majalah TEMPO edisi 12 Oktober 1998 ini menyajikan wawancara mendalam dengan Sidney Jones, Direktur Eksekutif Asia Watch, mengenai isu sensitif pemerksaan massal yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998 di Indonesia. Narasi artikel ini dibuka dengan menyoroti ketegangan antara data yang dimiliki oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan dengan

keraguan yang muncul dari lembaga internasional seperti Asia Watch. Sidney Jones menjelaskan bahwa perbedaan angka korban terjadi karena pihaknya menerapkan standar verifikasi yang sangat ketat. Ia menekankan bahwa dalam investigasi hak asasi manusia, kesaksian dari pihak kedua atau laporan melalui telepon yang bersifat emosional sering kali sulit diverifikasi, sehingga ia lebih memilih menggunakan data yang berasal dari sumber independen dan dapat dibuktikan secara faktual, seperti catatan medis dari dokter yang menangani korban secara langsung.

Dalam percakapan tersebut, Sidney Jones mengungkapkan bahwa meskipun ia tidak bertemu langsung dengan korban saat berkunjung ke Indonesia pada Agustus 1998 karena situasi politik yang penuh skeptisisme, ia telah bertemu dengan korban yang dibawa oleh Romo Sandyawan ke Washington. Pertemuan ini menjadi bukti nyata baginya bahwa kekerasan seksual tersebut memang terjadi, meskipun ia tetap bersikap hati-hati dalam menyimpulkan apakah tindakan tersebut dilakukan secara sistematis dan terorganisasi layaknya pembersihan etnis di Bosnia. Menurutnya, untuk membuktikan adanya organisasi atau instruksi sistematis di balik pemerkosaan massal terhadap etnis Tionghoa, diperlukan bukti pola dan angka yang jauh lebih kuat daripada yang tersedia saat itu.

Sidney Jones juga menyayangkan arah perdebatan publik di Indonesia yang ia nilai cenderung destruktif. Ia melihat bahwa perdebatan mengenai "ada atau tidaknya" pemerkosaan justru sering digunakan oleh kelompok rasial ekstrem untuk menyebarkan ketakutan lebih lanjut. Baginya, cara paling efektif untuk melawan teror tersebut adalah dengan memastikan bahwa data pemerkosaan yang dipublikasikan adalah data yang solid dan bukan sekadar desas-desus. Ia mengakui bahwa pemerkosaan adalah pelanggaran HAM yang paling sulit diinvestigasi dibandingkan dengan pembakaran gedung atau penjarahan, karena korban sering kali mengalami trauma hebat dan dihantui oleh stigma sosial yang mencegah mereka untuk melapor.

Di bagian akhir narasi, Sidney Jones menegaskan prinsipnya dalam melakukan advokasi hak asasi manusia. Ia secara tegas menolak penggunaan

pernyataan yang hiperbolis atau dilebih-lebihkan demi mendapatkan perhatian publik. Baginya, kejujuran pada fakta, meskipun harus menghadapi risiko kehilangan perhatian sosial, jauh lebih penting untuk menjaga kredibilitas perjuangan HAM dalam jangka panjang. Ia merujuk pada pengalaman investigasi kasus 27 Juli sebagai contoh di mana pengecekan fakta secara ketat dari pintu ke pintu memberikan gambaran yang jauh lebih akurat dan tidak terbantahkan dibandingkan laporan awal yang bombastis namun tidak terbukti (Tempo, 1998).

Keberanian inilah yang membedakan Tempo dari banyak media lain pada awal era reformasi. Saat sebagian besar media lebih memilih memberitakan isu politik elite atau pertarungan antarpartai, Tempo menegaskan pilihan untuk tetap mengangkat isu-isu kemanusiaan, pelanggaran hak, dan ketidakadilan sosial. Pilihan editorial ini bukan sekadar strategi redaksional, tetapi manifestasi dari prinsip moral yang konsisten bahwa jurnalistik sejati harus berani menyoroti kebenaran, meski tidak populer, meski menghadapi risiko politik, dan meski harus menentang arus utama yang lebih nyaman atau aman. Sikap itulah yang menegaskan identitas Tempo sebagai media independen yang menempatkan integritas di atas kepentingan ekonomi atau tekanan kekuasaan.

Terbitnya kembali Tempo pada Oktober 1998 mendapat sambutan luar biasa dari publik. Dalam waktu singkat, edisi perdana habis terjual. Banyak pembaca lama yang menilai kemunculan Tempo sebagai pertanda bahwa kebebasan pers benar-benar akan lahir di Indonesia. Namun bagi para jurnalis Tempo, momen itu bukan sekadar euforia, melainkan perwujudan dari prinsip yang telah mereka perjuangkan sejak awal berdirinya: bahwa jurnalisme harus berpihak pada kebenaran dan masyarakat, bukan pada kekuasaan. Andreas Harsono dalam wawancara menyebut momen itu sebagai kemenangan moral. Ia berkata dengan nada mantap namun reflektif:

“Bagi kami, itu memang sebuah kemenangan, tetapi sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan belum berakhir. Jika dulu kami melawan Soeharto secara langsung, kini tantangannya berubah: melawan bentuk-bentuk pembungkaman yang lebih halus melalui uang, kekuasaan

ekonomi, dan praktik korupsi. Tempo telah kembali, tetapi musuhnya juga telah berevolusi. Sekarang bukan lagi ancaman berupa senjata atau razia, melainkan kepentingan tersembunyi yang mencoba membungkam kebebasan melalui iklan dan tekanan ekonomi.” (Wawancara dengan Andreas Harsono, 2025).

Terbitnya kembali Tempo bukan sekadar peristiwa dalam sejarah media, tetapi juga menjadi cermin perjalanan moral bangsa. Ia menunjukkan bagaimana kebenaran, meski berkali-kali dibungkam, tetap mampu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Peristiwa ini bukan hanya tentang majalah yang kembali terbit, tetapi tentang tekad, keberanian, dan integritas para jurnalis yang menolak tunduk pada tekanan kekuasaan. Dari situ, terlihat jelas bahwa kebebasan pers tidak lahir begitu saja, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang menguji moral dan prinsip kemanusiaan. Kebangkitan Tempo juga menginspirasi lahirnya media-media independen lain yang kemudian memperkuat ekosistem jurnalisme bebas di Indonesia. Namun, di tengah euforia itu, Goenawan mengingatkan bahwa kebebasan tidak boleh disalahgunakan. Dalam salah satu wawancaranya, ia menegaskan:

“Kebebasan tanpa disiplin hanya akan melahirkan kekacauan. Tempo harus tetap menjadi ruang bagi akal sehat, bukan sekadar suara kebebasan. Kebebasan itu harus dibarengi tanggung jawab terhadap fakta, terhadap masyarakat, dan terhadap prinsip-prinsip jurnalisme yang kita pegang teguh. Tanpa kedisiplinan, kata-kata bisa menjadi senjata yang merusak, bukan alat untuk mencerahkan. Maka dari itu, kebebasan pers yang sejati selalu membutuhkan komitmen moral dan intelektual yang kuat.” (Wawancara dengan Goenawan Mohamad, 2025).

Tempo pasca-1998 tidak hanya menjadi simbol kemenangan atas pembredelan, tetapi juga berperan sebagai penjaga etika dan tanggung jawab dalam praktik jurnalisme di era demokrasi. Kehadirannya mengingatkan bahwa kebebasan pers harus selalu disertai integritas, akurasi, dan keberanian moral. Tempo bukan sekadar media yang menayangkan berita; ia menjadi teladan bagaimana jurnalisme dapat berfungsi sebagai pengawal kebenaran, kritikus kekuasaan, dan ruang pendidikan bagi masyarakat untuk memahami isu-isu penting secara jujur dan bertanggung jawab.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Teori Hegemoni Gramsci terhadap Bentuk-bentuk Perlawanan Jurnalis Tempo

Perlawanan yang dilakukan oleh Majalah Tempo terhadap represi negara Orde Baru dapat dipahami melalui perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, kekuasaan tidak semata-mata ditegakkan melalui dominasi fisik atau paksaan koersif, tetapi juga melalui penguasaan ide dan kesadaran masyarakat. Hegemoni dibangun dengan menanamkan seperangkat nilai, ideologi, dan pandangan dunia tertentu sehingga diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran umum (*common sense*). Dalam konteks Orde Baru, hegemoni tersebut terwujud melalui narasi besar tentang “stabilitas nasional” dan “pers pembangunan”. Kedua konsep ini berfungsi sebagai perangkat ideologis yang melegitimasi kekuasaan negara dan menjustifikasi kontrol pemerintah terhadap media massa. Dengan mengedepankan retorika stabilitas dan pembangunan, rezim berhasil menciptakan citra bahwa kritik terhadap pemerintah identik dengan ancaman terhadap ketertiban nasional. Melalui cara inilah Orde Baru menundukkan ruang publik dan membungkam kebebasan pers secara halus, tanpa harus selalu menggunakan kekerasan fisik.

Majalah Tempo, dengan sikap redaksionalnya yang independen dan kritis, menolak tunduk pada konstruksi ideologis tersebut. Tempo berani menempatkan dirinya sebagai kekuatan moral dan intelektual yang berpihak pada kebenaran, bukan pada kepentingan kekuasaan. Melalui berbagai strategi perlawanan baik melalui jalur hukum dan pendirian organisasi independen, Tempo berusaha membongkar cara kerja hegemoni negara yang berusaha mengendalikan dunia pers di bawah kendali politik. Dengan demikian, perjuangan Tempo tidak hanya bersifat jurnalisme pembebasan, tetapi juga merupakan bentuk kesadaran politik yang menolak monopoli kebenaran oleh rezim Orde Baru. Melalui perlawanan yang berlapis, *War of Position* Tempo telah mengartikulasikan gerakan *counter-hegemony*, yakni upaya sistematis untuk menantang dan mendekonstruksi dominasi ideologis

negara serta mengembalikan fungsi pers sebagai pilar moral dan rasionalitas publik dalam masyarakat demokratis. Bentuk-bentuk perlawanan ini dapat diklasifikasikan sesuai dengan kerangka pemikiran Antonio Gramsci, yakni konsep *war of position*:

a. Perlawanan Melalui Jalur Litigasi (Hukum)

Langkah Jurnalis Tempo menggugat Surat Keputusan Menteri Penerangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pasca pembredelan tahun 1994 merupakan bentuk perlawanan awal yang ditempuh dalam koridor legal-formal negara. Pada tataran permukaan, gugatan ini dapat dibaca sebagai respons administratif atas pencabutan izin terbit. Namun, jika dianalisis lebih dalam melalui kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, langkah tersebut merepresentasikan strategi perlawanan yang jauh lebih kompleks dan politis. Dalam perspektif Gramsci, hukum tidak berdiri netral, melainkan berada pada persimpangan antara negara politik (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Hukum berfungsi sebagai instrumen dominasi untuk menjaga stabilitas kekuasaan, tetapi sekaligus menyediakan ruang terbatas bagi munculnya kontestasi ideologis. Perlawanan ini dimanfaatkan Tempo untuk menantang otoritas Orde Baru dari dalam sistem yang justru dirancang untuk menopang kekuasaan itu sendiri.

Gugatan hukum yang diajukan Tempo tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya pragmatis untuk memulihkan izin terbit. Lebih dari itu, langkah ini merupakan bentuk *war of position*, yakni strategi perlawanan yang dilakukan secara gradual dengan bertahan dan berjuang melalui jalur-jalur institusional negara. Alih-alih melakukan konfrontasi terbuka yang berisiko represi langsung, Tempo memilih jalur hukum sebagai tahap awal dalam medan pertarungan simbolik untuk menguji klaim moral dan legal rezim Orde Baru. Secara struktural, posisi Tempo dalam proses litigasi ini sangat lemah. Sistem peradilan pada masa Orde Baru berada di bawah dominasi eksekutif, sehingga independensi hakim dan peluang kemenangan substantif hampir tidak tersedia. Namun, dalam logika *war of*

position, kekalahan prosedural bukanlah tujuan utama. Justru, proses persidangan itu sendiri menjadi arena penting untuk membuka ruang kritik, membongkar ketimpangan relasi kuasa, serta menyingkap wajah otoritarianisme yang selama ini disamarkan oleh retorika “negara hukum”.

Secara kronologis, gugatan Tempo terhadap Menteri Penerangan diproses melalui beberapa kali persidangan. Dalam rangkaian sidang tersebut, pihak penggugat berupaya membuktikan bahwa pembredelan dilakukan secara sepihak, tanpa mekanisme hukum yang transparan, serta melanggar prinsip kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Namun, majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan Tempo dan menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Penerangan merupakan kebijakan administratif yang sah dan berada dalam kewenangan penuh pemerintah. Penolakan ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung tidak memposisikan diri sebagai lembaga pengawas kekuasaan eksekutif, melainkan sebagai perpanjangan dari logika kekuasaan negara itu sendiri.

Kekalahan Tempo dalam gugatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor struktural. Pertama, adanya dominasi eksekutif atas lembaga yudikatif pada masa Orde Baru, yang menyebabkan independensi hakim bersifat semu. Karier, promosi, dan posisi hakim sangat bergantung pada struktur kekuasaan negara, sehingga ruang untuk mengambil putusan yang berseberangan dengan kepentingan rezim hampir tidak ada. Kedua, kerangka hukum pers pada masa itu terutama keberadaan SIUPP secara normatif telah memberikan legitimasi legal bagi negara untuk mencabut izin media tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Dengan demikian, sejak awal gugatan Tempo berhadapan dengan sistem hukum yang secara desain berpihak pada negara. Ketiga, paradigma stabilitas nasional yang menjadi ideologi dominan Orde Baru digunakan sebagai justifikasi utama untuk menyingkirkan prinsip kebebasan pers, sehingga argumen Tempo tentang hak publik atas informasi sulit mendapatkan ruang dalam pertimbangan hukum formal.

Meskipun secara yuridis mengalami kekalahan, proses persidangan PTUN justru memiliki dampak politis yang signifikan. Melalui jalur litigasi, Tempo secara simbolik memaksa negara mempertanggungjawabkan kebijakan pembredelan di hadapan publik. Persidangan menjadi panggung di mana negara diposisikan sebagai pihak yang harus menjelaskan, membenarkan, dan mempertahankan tindakannya. Dalam proses ini, berbagai inkonsistensi argumentasi negara dan ketimpangan relasi kuasa mulai terekspos. Pembredelan yang diklaim sebagai tindakan administratif demi stabilitas nasional tampil sebagai praktik sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip kebebasan pers dan supremasi hukum.

Lebih jauh, gugatan hukum tersebut berfungsi sebagai strategi delegitimasi ideologis terhadap hegemoni Orde Baru. Klaim rezim sebagai pelaksana “negara hukum” mulai dipertanyakan, baik oleh publik domestik maupun komunitas internasional. Dukungan dari kalangan intelektual, aktivis prodemokrasi, serta perhatian media asing menunjukkan bahwa proses litigasi ini berhasil melampaui ruang sidang dan berubah menjadi isu politik yang lebih luas. Dengan kata lain, Tempo berhasil menggeser arena konflik dari persoalan administratif menjadi perdebatan mengenai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan pers.

Dalam konteks inilah, perlawanan litigasi Tempo mencerminkan esensi *war of position* sebagaimana dirumuskan Gramsci. Kemenangan tidak diukur dari putusan pengadilan, melainkan dari sejauh mana hegemoni dominan mengalami pengikisan. Melalui gugatan yang secara hukum hampir mustahil dimenangkan, Tempo justru meraih kemenangan simbolik dan moral: membangun kesadaran publik, meruntuhkan legitimasi wacana negara, serta meletakkan fondasi ideologis bagi perlawanan yang lebih luas di masa berikutnya. Strategi ini menjadi salah satu mata rantai penting dalam akumulasi krisis hegemoni Orde Baru yang pada akhirnya bermuara pada runtuhnya rezim pada tahun 1998.

b. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Apabila perlawanan melalui jalur litigasi dapat dipahami sebagai strategi yang beroperasi di ranah negara politik, maka pendirian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 1994 merepresentasikan bentuk perlawanan yang berakar kuat di ranah masyarakat sipil. Dalam kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui dominasi koersif negara, tetapi juga melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang membentuk cara berpikir masyarakat. Oleh karena itu, perlawanan terhadap hegemoni Orde Baru mensyaratkan pembangunan basis intelektual alternatif yang mampu menantang wacana dominan. Di sinilah konsep intelektual organik menjadi kunci untuk memahami posisi dan peran AJI. AJI hadir sebagai wadah kolektif bagi jurnalis-jurnalis yang menolak patuh pada mekanisme kontrol negara, terutama kewajiban kepemilikan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan intervensi Departemen Penerangan dalam praktik jurnalistik. Para jurnalis Tempo bersama insan pers dari berbagai media lain yang tergabung dalam AJI secara sadar memutuskan relasi kepatuhan terhadap negara. Dengan langkah ini, mereka tidak lagi berperan sebagai intelektual tradisional yang beroperasi dalam struktur dominan dan mereproduksi wacana resmi, melainkan menjadi intelektual organik yang berpihak pada kepentingan publik, kebebasan pers, dan nilai-nilai demokrasi. Kegiatan-kegiatan Aliansi Jurnalis Independen terdiri dari:

1. Penerbitan Buletin “Independen” Gerakan Bawah Tanah

Sebagai intelektual organik, anggota AJI tidak hanya memproduksi berita, tetapi juga membangun pengetahuan kritis dan wacana tandingan yang berfungsi sebagai alat pendidikan politik masyarakat. Aktivitas AJI mencerminkan bentuk *war of position* yang lebih mendalam. Penerbitan Buletin Independen menjadi media utama untuk menembus hegemoni informasi negara yang selama ini dimonopoli oleh media arus utama yang patuh pada rezim. Melalui buletin tersebut, AJI menyajikan narasi alternatif

yang mengungkap praktik pembredelan, kekerasan negara, serta premanisme politik yang dilegitimasi oleh kekuasaan. Dalam perspektif Gramsci, produksi wacana tandingan semacam ini merupakan upaya sistematis untuk membangun akal sehat baru (*new common sense*) di tengah masyarakat. AJI berusaha menggeser cara pandang publik dari penerimaan pasif terhadap versi resmi negara menuju kesadaran kritis atas relasi kuasa yang menindas kebebasan pers dan hak sipil. Proses ini tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui akumulasi wacana, diskusi, dan penyebaran informasi alternatif yang terus-menerus, yang menjadi ciri khas *war of position*.

Dalam praktik penerbitannya, Buletin Independen tidak hadir sebagai produk insidental, melainkan sebagai media gerakan yang diproduksi secara berkelanjutan. Sepanjang kurun waktu 1994–1998, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tercatat menerbitkan buletin tersebut dengan total 28 edisi. Kuantitas penerbitan ini merefleksikan konsistensi AJI dalam menjaga sirkulasi informasi alternatif di tengah ketatnya kontrol negara terhadap arus komunikasi publik. Intensitas produksi wacana tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perlawanan yang dibangun tidak bersifat sporadis, melainkan terorganisasi sebagai bagian dari strategi *war of position* untuk mengikis dominasi informasi rezim.

Kendati demikian, penelitian ini tidak menganalisis seluruh edisi yang terbit. Peneliti melakukan seleksi sumber secara purposif dengan mengambil empat edisi yang dinilai paling representatif dan memiliki kedekatan konteks dengan peristiwa pembredelan, khususnya yang berkaitan langsung dengan dinamika perlawanan terhadap Majalah Tempo. Keempat edisi tersebut ialah: (1) Anti Pembredelan, (2) Pengadilan Pers Alternatif, (3) Politik Premanisme, dan (4) Pemilu 1997 Tidak Sah.

Pemilihan edisi-edisi ini didasarkan pada pertimbangan substansial, yakni karena memuat narasi, framing, dan konstruksi wacana yang secara eksplisit merefleksikan kritik terhadap praktik represi pers, kriminalisasi jurnalis, serta rekayasa politik rezim Orde Baru. Dengan demikian, fokus analisis menjadi lebih kontekstual dalam membaca bagaimana AJI membangun wacana tandingan yang berkelindan langsung dengan isu pembredelan dan perjuangan kebebasan pers yang juga diperjuangkan oleh Tempo.

Hasil dari perlawanan ini tampak pada terbentuknya ruang publik alternatif yang relatif otonom dari kontrol negara. Buletin *Independen* dan jaringan distribusinya berfungsi sebagai simpul komunikasi antarkelompok masyarakat sipil jurnalis, mahasiswa, aktivis LSM, dan intelektual yang sebelumnya terfragmentasi oleh represi politik. Ruang ini memungkinkan pertukaran gagasan kritis dan memperkuat solidaritas lintas sektor dalam menentang pembatasan kebebasan pers. Dengan demikian, AJI tidak hanya menghasilkan informasi, tetapi juga membangun basis sosial bagi resistensi yang lebih luas.

Selain itu, aktivitas AJI turut mendelegitimasi narasi resmi negara mengenai stabilitas dan keamanan nasional. Informasi alternatif yang diproduksi dan disebarkan secara konsisten membuat klaim negara semakin sulit dipertahankan sebagai satu-satunya kebenaran. Dalam konteks Gramscian, kondisi ini menandai terjadinya erosi hegemoni, di mana konsensus yang sebelumnya relatif mapan mulai retak dan digantikan oleh keraguan serta kritik publik. Kesadaran kritis yang tumbuh di kalangan pembaca *Buletin Independen* menjadi modal ideologis penting dalam melemahkan dominasi wacana Orde Baru.

Lebih jauh, perlawanan AJI juga menghasilkan dampak institusional jangka panjang. Keberadaan AJI sebagai organisasi jurnalis independen menjadi alternatif nyata terhadap organisasi

pers resmi yang berada di bawah kontrol negara. Model organisasi ini memperkenalkan standar etika, profesionalisme, dan independensi yang berbeda dari logika pers Orde Baru. Setelah runtuhnya rezim pada 1998, prinsip-prinsip yang diperjuangkan AJI ialah kebebasan pers, otonomi redaksi, dan solidaritas jurnalis menjadi salah satu fondasi penting dalam konfigurasi pers yang lebih demokratis di era Reformasi.

Dengan demikian, hasil perlawanan AJI tidak dapat diukur hanya dari dampak langsungnya pada kebijakan negara di masa Orde Baru, melainkan dari kontribusinya dalam membangun infrastruktur ideologis dan kultural bagi perubahan politik. Melalui produksi wacana tandingan, pembentukan jaringan masyarakat sipil, dan pelembagaan nilai-nilai jurnalisme independen, AJI memainkan peran strategis dalam *war of position* yang secara bertahap memperlemah hegemoni Orde Baru dan membuka jalan bagi transformasi demokratis di Indonesia.

2. Pelatihan dan Pendidikan Jurnalistik Independen

Selain melalui produksi wacana, AJI juga melakukan kerja ideologis yang penting melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan jurnalistik. Program pendidikan ini dirancang tidak semata-mata untuk meningkatkan keterampilan teknis jurnalis, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran politik mengenai posisi strategis pers dalam struktur kekuasaan. Pelatihan tersebut mencakup penguatan etika jurnalistik, teknik peliputan investigatif, keselamatan jurnalis di bawah rezim represif, serta pemahaman kritis mengenai relasi antara media, negara, dan kekuasaan. Dengan demikian, AJI tidak hanya melahirkan jurnalis yang profesional secara teknis, tetapi juga membentuk subjek-subjek kritis yang mampu menjalankan fungsi intelektual organik sebagaimana dirumuskan Antonio Gramsci.

Hasil dari kerja pendidikan ini pertama-tama tampak pada transformasi kesadaran individu jurnalis. Jurnalis yang terlibat dalam program pelatihan AJI mengalami pergeseran cara pandang dari posisi jurnalis sebagai pelaksana kebijakan redaksional yang patuh terhadap negara, menuju jurnalis sebagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab politik dan moral terhadap publik. Kesadaran ini mendorong keberanian untuk mempertanyakan sensor, menolak intervensi kekuasaan, serta mengembangkan praktik jurnalistik yang lebih kritis terhadap negara. Dalam kerangka Gramscian, perubahan kesadaran ini merupakan prasyarat penting bagi terbentuknya blok historis tandingan yang mampu menantang hegemoni dominan.

Selain pada level individual, pendidikan jurnalistik AJI juga menghasilkan dampak kolektif berupa terbentuknya jaringan jurnalis independen yang memiliki basis ideologis yang sama. Melalui pelatihan dan diskusi berkelanjutan, AJI menciptakan ruang sosial di mana nilai-nilai kebebasan pers, independensi redaksi, dan solidaritas profesi direproduksi secara terus-menerus. Jaringan ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kolektif terhadap represi negara, sekaligus sebagai medium pertukaran pengetahuan dan strategi perlawanan. Dalam konteks *war of position*, jaringan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari “kanal-kanal” masyarakat sipil yang memperkuat posisi oposisi terhadap dominasi negara politik.

Hasil penting dari kerja pendidikan AJI adalah lahirnya generasi jurnalis yang membawa nilai-nilai tandingan ke ruang-ruang media yang lebih luas. Sejumlah jurnalis yang terlibat dalam AJI kemudian berkiprah di media arus utama maupun media alternatif pada masa transisi menuju Reformasi. Nilai-nilai yang mereka bawa seperti keberanian investigatif, keberpihakan pada kepentingan publik, serta penolakan terhadap kontrol negara secara

perlahan menggeser budaya jurnalistik yang sebelumnya tunduk pada logika stabilitas nasional. Dengan demikian, pendidikan AJI tidak berhenti pada lingkup internal organisasi, melainkan berkontribusi pada perubahan struktur kultural pers Indonesia secara lebih luas.

Dalam perspektif Gramsci, kerja pendidikan ini merupakan bentuk *war of position* yang sangat strategis karena beroperasi di ranah superstruktur kultural dan intelektual. AJI tidak berhadapan langsung dengan negara melalui konfrontasi terbuka, melainkan memperlemah fondasi ideologis kekuasaan dengan membangun kapasitas intelektual dan etis para jurnalis. Proses ini berlangsung secara perlahan, melalui reproduksi nilai, pengetahuan, dan praktik jurnalistik alternatif yang terus-menerus, sehingga efeknya bersifat akumulatif dan jangka panjang.

Dampak jangka panjang dari perlawanan ini terlihat jelas pasca runtuhnya Orde Baru pada 1998. Ketika struktur represif negara melemah, jurnalis-jurnalis yang telah ditempa melalui pendidikan AJI berada dalam posisi siap untuk mengisi ruang kebebasan yang terbuka. Prinsip-prinsip yang selama Orde Baru dipraktikkan secara terbatas dan marginal seperti kebebasan pers, independensi redaksi, dan solidaritas profesi kemudian menjadi arus utama dalam lanskap pers Indonesia pasca-Reformasi. Dengan demikian, kerja pendidikan AJI dapat dipahami sebagai investasi ideologis yang hasilnya baru sepenuhnya tampak ketika konfigurasi politik memungkinkan perubahan struktural.

3. Kampanye Anti-Amplop

Kampanye anti-amplop yang digagas AJI semakin menegaskan dimensi moral dari perlawanan ini. Gramsci menekankan bahwa hegemoni bertumpu pada kepemimpinan moral, bukan semata dominasi koersif. Dengan menolak praktik amplop dan suap, AJI

berusaha membersihkan praktik jurnalisme dari kompromi ekonomi dan politik yang selama ini melemahkan independensi pers. Upaya ini menunjukkan bahwa perlawanan AJI tidak hanya diarahkan ke luar untuk menantang negara, tetapi juga ke dalam, yakni melakukan kritik dan pembenahan terhadap praktik internal dunia jurnalistik itu sendiri. Kritik internal tersebut antara lain diarahkan pada praktik jurnalisme yang terlalu kompromistis terhadap kekuasaan, budaya sensor diri (*self-censorship*) yang mengakar di kalangan wartawan akibat tekanan politik Orde Baru, serta lemahnya solidaritas profesi yang ditunjukkan melalui ketergantungan pada organisasi wartawan resmi negara seperti PWI. AJI juga mengkritik praktik profesional yang mengabaikan independensi redaksi, seperti kedekatan personal wartawan dengan pejabat, penerimaan fasilitas dan privilese dari negara, serta reduksi peran pers menjadi corong kekuasaan alih-alih pengawas publik.

Hasil nyata dari perlawanan moral dan etis ini adalah lahirnya seperangkat norma tandingan yang kemudian dirumuskan secara lebih sistematis dalam Kode Etik Jurnalistik Independen (KEJI). KEJI menjadi instrumen penting bagi AJI untuk melembagakan nilai-nilai independensi, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Berbeda dengan kode etik yang berlaku dalam organisasi wartawan resmi pada masa Orde Baru yang cenderung selaras dengan kepentingan negara. KEJI menempatkan jurnalis sebagai subjek otonom yang bertanggung jawab secara moral kepada publik, bukan kepada penguasa. Dengan demikian, KEJI berfungsi sebagai alat perlawanan ideologis yang mengoreksi standar profesional jurnalistik yang sebelumnya terkooptasi oleh kekuasaan.

Selain itu, kampanye anti-amplop dan perumusan KEJI menghasilkan perubahan penting pada level kesadaran dan praktik

jurnalis. Nilai penolakan terhadap amplop tidak hanya dipahami sebagai sikap individual, tetapi sebagai komitmen kolektif dan simbol perlawanan terhadap korupsi struktural dalam dunia pers. Praktik ini memperkuat solidaritas profesi berbasis nilai, menggantikan solidaritas semu yang sebelumnya dibangun melalui kedekatan dengan negara. Dalam perspektif Gramsci, pembentukan etika kolektif ini merupakan bagian dari upaya membangun *common sense* baru yang menempatkan integritas moral sebagai fondasi kepemimpinan intelektual jurnalis.

Lebih jauh, lahirnya KEJI dan kampanye anti-amplop turut berkontribusi pada transformasi institusional jurnalisme Indonesia pasca-Orde Baru. Prinsip-prinsip yang diperjuangkan AJI seperti independensi redaksi, penolakan konflik kepentingan, dan akuntabilitas kepada public kemudian memengaruhi perumusan dan penguatan kode etik jurnalistik yang lebih luas di era Reformasi. Dengan kata lain, apa yang awalnya merupakan praktik perlawanan kelompok minoritas di bawah rezim represif, berangsur-angsur menjadi standar normatif dalam lanskap pers yang lebih demokratis.

Dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, keberhasilan AJI membangun dan melembagakan etika jurnalistik independen menunjukkan bahwa *war of position* tidak hanya berlangsung di ranah wacana dan organisasi, tetapi juga dalam pembentukan norma moral dan profesional. Dengan menyerang basis moral dari praktik jurnalisme yang terkooptasi, AJI melemahkan fondasi hegemoni negara dari dalam masyarakat sipil

4. Solidaritas Nasional dan Internasional

Dalam kerangka Teori Hegemoni Antonio Gramsci, solidaritas nasional dan internasional yang terbangun pasca pembredelan Majalah Tempo dapat dipahami sebagai bagian integral dari

strategi *war of position*. Gramsci menekankan bahwa kekuasaan hegemonik tidak hanya bertumpu pada dominasi koersif, tetapi juga pada kepemimpinan moral dan kemampuan negara membangun konsensus di ranah masyarakat sipil. Oleh karena itu, perlawanan terhadap hegemoni tidak selalu diwujudkan melalui konfrontasi langsung, melainkan melalui pembentukan aliansi sosial yang luas untuk mengikis legitimasi kekuasaan secara bertahap. Dalam konteks ini, pembredelan Tempo justru memicu konsolidasi solidaritas yang memperluas medan perlawanan dari konflik antara negara dan media menjadi perjuangan kolektif atas nilai kebebasan pers dan hak-hak sipil.

Solidaritas nasional terhadap Tempo muncul dari berbagai elemen masyarakat sipil, seperti jurnalis, intelektual, mahasiswa, aktivis hak asasi manusia, dan organisasi non-pemerintah. Dukungan ini diwujudkan melalui pernyataan sikap, diskusi publik, serta produksi wacana kritis yang secara konsisten menolak pembredelan sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Dalam perspektif Gramsci, praktik solidaritas ini berfungsi membangun blok historis tandingan yang menempatkan kebebasan pers sebagai nilai bersama dan memperluas basis sosial perlawanan. Akibatnya, konflik antara Tempo dan negara tidak lagi dipersepsikan sebagai persoalan administratif atau internal media, melainkan sebagai isu publik yang menyangkut kualitas demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu hasil penting dari proses ini adalah meningkatnya kesadaran kolektif publik mengenai peran pers sebagai pilar demokrasi serta menguatnya posisi jurnalis sebagai aktor masyarakat sipil yang sah dalam arena politik.

Perlawanan ini semakin diperkuat oleh solidaritas internasional dari organisasi-organisasi pers dan kebebasan berekspresi seperti *International Federation of Journalists (IFJ)*, *Article XIX*, dan

International Freedom of Expression Exchange (IFEX). Dukungan internasional tersebut menghadirkan tekanan moral dan simbolik terhadap rezim Orde Baru di hadapan komunitas global, sekaligus memperluas arena *war of position* dari tingkat nasional ke tingkat internasional. Kehadiran aktor-aktor global ini membuat negara semakin sulit mempertahankan klaim sebagai rezim yang stabil, modern, dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum, karena wacana tandingan mengenai represi terhadap pers diproduksi dan disebarluaskan melalui jaringan internasional kebebasan pers. Hasil dari tekanan ini terlihat pada memburuknya citra Indonesia di mata dunia internasional dalam isu kebebasan pers dan hak asasi manusia, yang secara tidak langsung mempersempit ruang legitimasi politik rezim.

Dalam logika *war of position*, solidaritas nasional dan internasional ini menghasilkan dampak yang tidak bersifat instan, tetapi akumulatif. Tekanan yang terus-menerus mengikis kepemimpinan moral negara dan melemahkan konsensus yang menopang hegemoni Orde Baru. Pembredelan Tempo tidak lagi dapat dibingkai semata sebagai kebijakan administratif demi stabilitas nasional, melainkan dipahami secara luas sebagai praktik represif yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Proses ini berkontribusi pada meningkatnya kesadaran kritis publik, menguatnya jaringan masyarakat sipil dan jurnalis independen, serta terbentuknya modal ideologis dan politik bagi perlawanan lanjutan, termasuk lahirnya media alternatif, penguatan gerakan jurnalisme independen, dan konsolidasi solidaritas antarorganisasi pers.

Dengan demikian, solidaritas nasional dan internasional dalam kasus perlawanan Jurnalis Tempo menghasilkan dampak ideologis dan politik yang signifikan dalam kerangka *war of position*. Meskipun tidak secara langsung membatalkan pembredelan,

strategi ini berhasil memperluas basis sosial perlawanan, membangun kepemimpinan moral tandingan, serta secara bertahap mengikis legitimasi hegemoni Orde Baru. Hasil jangka panjang dari akumulasi tekanan simbolik dan ideologis ini adalah terciptanya kondisi krisis hegemoni yang melemahkan otoritas negara, membuka ruang artikulasi tuntutan demokratis, serta menjadi salah satu faktor pendukung bagi perubahan politik yang lebih luas, termasuk runtuhnya Orde Baru dan terbukanya ruang kebebasan pers pada era reformasi pasca-1998.

5. Advokasi Wartawan yang Ditangkap

Dalam kerangka Teori Hegemoni Antonio Gramsci, advokasi terhadap wartawan yang ditangkap pasca pembredelan Majalah Tempo dapat dipahami sebagai bagian penting dari strategi *war of position*. Gramsci memandang bahwa hegemoni negara tidak hanya ditegakkan melalui aparat represif, tetapi juga melalui normalisasi ketakutan, pembungkaman kritik, dan pembentukan konsensus yang membuat represi tampak sah. Penangkapan, intimidasi, dan kriminalisasi wartawan merupakan instrumen koersif negara untuk mempertahankan kontrol ideologis atas ruang publik. Oleh karena itu, advokasi terhadap wartawan yang ditangkap tidak semata bersifat kemanusiaan atau profesional, melainkan merupakan upaya politik untuk menantang legitimasi moral dan ideologis negara secara bertahap di ranah masyarakat sipil.

Bentuk advokasi yang dilakukan oleh Majalah Tempo, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta jaringan masyarakat sipil lainnya meliputi pendampingan hukum terhadap wartawan yang ditangkap, penyediaan bantuan hukum melalui pengacara independen, serta penggalangan solidaritas publik untuk menekan aparat penegak hukum. Advokasi ini juga diwujudkan melalui kampanye publik yang menolak kriminalisasi kerja jurnalistik,

pernyataan sikap terbuka, serta penyebaran informasi mengenai kasus-kasus penangkapan wartawan sebagai pelanggaran kebebasan pers. Selain itu, advokasi dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti lobi terhadap tokoh publik, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil agar kasus penangkapan wartawan tidak dipandang sebagai peristiwa individual, melainkan sebagai bagian dari pola represif sistemik rezim Orde Baru terhadap pers kritis.

Dalam perspektif *war of position*, advokasi ini berfungsi membangun kesadaran kritis dan solidaritas berlapis di masyarakat sipil. Dengan terus-menerus memproduksi wacana bahwa wartawan yang ditangkap adalah korban represi negara, bukan pelanggar hukum, gerakan ini berupaya menggeser *common sense* publik dari penerimaan pasif terhadap tindakan aparat menuju pemahaman kritis atas relasi kuasa yang menindas kebebasan berekspresi. Advokasi tersebut juga menciptakan ruang aman simbolik bagi wartawan lain untuk tetap bersuara, sekaligus melemahkan efek jera yang ingin dibangun negara melalui penangkapan dan intimidasi.

Hasil dari perlawanan advokatif ini tidak muncul secara instan, tetapi bersifat akumulatif dan struktural. Dalam jangka pendek, advokasi berhasil mencegah isolasi terhadap wartawan yang ditangkap, memperkuat posisi tawar mereka di hadapan aparat, serta menekan negara agar lebih berhati-hati dalam melakukan kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik. Dalam jangka menengah, praktik advokasi ini berkontribusi pada terbentuknya jaringan bantuan hukum dan solidaritas profesi yang lebih kuat di kalangan jurnalis independen, sekaligus memperkuat peran AJI sebagai aktor masyarakat sipil yang konsisten membela kebebasan pers. Advokasi tersebut juga memperluas pemahaman publik bahwa

kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Secara ideologis, advokasi terhadap wartawan yang ditangkap menghasilkan erosi terhadap kepemimpinan moral negara. Rezim Orde Baru semakin sulit mempertahankan narasi bahwa tindakan represif terhadap wartawan adalah bagian dari penegakan hukum dan stabilitas nasional. Sebaliknya, negara semakin dipersepsikan sebagai aktor yang menyalahgunakan kekuasaan untuk membungkam kritik. Dalam kerangka Gramscian, kondisi ini menunjukkan keberhasilan *war of position* dalam memperlemah konsensus hegemonik negara melalui tekanan moral, simbolik, dan ideologis yang berkelanjutan.

Dengan demikian, advokasi wartawan yang ditangkap merupakan bentuk perlawanan strategis dalam kerangka *war of position* yang dilakukan Majalah Tempo dan jaringan jurnalis independen. Melalui pendampingan hukum, kampanye publik, dan konsolidasi solidaritas, advokasi ini tidak hanya melindungi individu wartawan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kesadaran kritis masyarakat, pelemahan legitimasi represif negara, serta pembentukan fondasi normatif bagi pengakuan kebebasan pers yang lebih luas pada masa reformasi pasca runtuhnya Orde Baru.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan jurnalis Tempo terhadap pembredelan Orde Baru (1994–1998) berlangsung di berbagai ranah hukum, sosial, kultural, dan moral yang saling berkaitan dan dapat dianalisis melalui perspektif hegemoni Antonio Gramsci, khususnya strategi *war of position*. Pembredelan dipahami bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan instrumen hegemonik negara untuk mengontrol ruang publik dan membungkam kebebasan pers, sehingga perlawanan Tempo merupakan proses politik-ideologis yang bertahap.

Di ranah litigasi, Tempo menggugat Menteri Penerangan ke PTUN Jakarta atas pencabutan SIUPP. Perkara menempuh tiga tingkat peradilan: PTUN, PTTUN, dan kasasi Mahkamah Agung. Tempo menang di dua tingkat awal karena pencabutan dinilai cacat hukum, tetapi kalah di kasasi. Meski demikian, proses hukum ini membuka kesadaran publik tentang dominasi negara atas lembaga peradilan, sehingga kekalahan yuridis bertransformasi menjadi kemenangan ideologis yang memperkuat legitimasi moral perjuangan kebebasan pers.

Di ranah masyarakat sipil, perlawanan diwujudkan melalui pendirian AJI. Melalui Buletin Independen, AJI memproduksi wacana tandingan, pendidikan politik, dan “akal sehat baru,” sekaligus membangun ruang publik alternatif serta solidaritas lintas sektor. Sepanjang 1994–1998 terbit 28 edisi, namun penelitian memfokuskan empat edisi paling relevan dengan konteks pembredelan: Anti Pembredelan, Pengadilan Pers Alternatif, Politik Premanisme, dan Pemilu 1997 Tidak Sah.

Strategi ideologis diperkuat lewat pendidikan dan pelatihan jurnalistik yang menanamkan kesadaran politik, etika, dan kapasitas investigatif, membentuk

jaringan jurnalis independen sebagai basis *war of position* kultural-intelektual. Dimensi moral ditegaskan melalui kampanye anti-amplop dan Kode Etik Jurnalistik Independen (KEJI) yang memperkuat profesionalisme pers.

Perlawanan juga meluas melalui solidaritas nasional dan internasional melibatkan jurnalis, mahasiswa, LSM, serta organisasi seperti IFJ, *Article XIX*, dan IFEX yang membangun tekanan moral terhadap rezim. Advokasi terhadap wartawan yang ditangkap, melalui pendampingan hukum dan kampanye publik, turut menciptakan ruang aman dan mengikis legitimasi negara.

Secara keseluruhan, strategi *war of position* melalui litigasi, media bawah tanah, pendidikan jurnalistik, kampanye etika, solidaritas, dan advokasi secara akumulatif berhasil melemahkan dominasi ideologis Orde Baru, menumbuhkan kesadaran kritis publik, dan membangun fondasi kebebasan pers bagi demokratisasi pasca-1998.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Bentuk-Bentuk Perlawanan Jurnalis Tempo Terhadap Pembredelan Pada Era Orde Baru (1994–1998)”, terdapat beberapa saran diajukan. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan awal kajian relasi media dan kekuasaan dalam perspektif hegemoni Gramsci, serta dapat dikembangkan dengan membandingkan kasus Tempo dengan media lain yang mengalami represi. Bagi praktisi jurnalistik, pengalaman Tempo menunjukkan bahwa perjuangan kebebasan pers dapat ditempuh melalui strategi hukum, wacana, dan penguatan masyarakat sipil, sehingga penting dijadikan pelajaran untuk menjaga independensi, etika, dan solidaritas profesi. Bagi masyarakat dan pembuat kebijakan, penelitian ini menegaskan perlunya perlindungan terhadap kebebasan pers melalui regulasi yang adil dan bebas intervensi politik. Adapun bagi pengembangan studi sejarah dan demokrasi, perlawanan Tempo merupakan bagian penting dari proses transisi demokrasi Indonesia yang perlu dikembangkan agar menjadi pembelajaran kolektif tentang bahaya otoritarianisme dan pentingnya kebebasan pers dalam kehidupan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Abdul Manan, dkk. 2014. *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Abdurahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ajidarma, Seno Gumira. 2000. *Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara*. Jakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Aspinall, E., & Fealy, G. (Eds.). 2010. *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*. Canberra: ANU Press.
- Bourdieu, Pierre. 1998. *On Television*. New Press.
- Cribb, R., & Brown, C. 1995. *Modern Indonesia: A History Since 1945*. London: Longman.
- Crouch, Harold. 2010. *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Goenawan Mohamad. 2001. *Catatan Pinggir*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Gottschalk, L. 1985. *Understanding History: A Primer of Historical Method*.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. Ed. and trans. By Quintin Hoare & Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publishers.
- Hanazaki, Yasuo. 1998. *Pers Terjebak*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Hill, D. T. 1994. *The Press in New Order Indonesia*. Perth: University of Western Australia Press.
- Kerlinger, F. N. 2006. *Foundations of Behavioral Research*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kuntowijoyo. 2018. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara
- Manan, Abdul dkk. 2014. *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- McNair, Brian. 2003. *An Introduction to Political Communication*. Routledge.
- McQuail, D. 2010. *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications. New York: Alfred A. Knopf.
- Pratama, Rinaldo Adi., & Perdana, Yusuf. 2022. *Sejarah Indonesia Masa Orde Baru hingga Reformasi*. Klaten: Lakeisha.
- Scott, James C. 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press.

- Sen, K., & Hill, D. 2007. *Media, Culture and Politics in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Sjamsuddin, Heliuss. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sopian, Agus dkk. 2009. *Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Steele, J. 2014. *Wars within: The story of Tempo, an independent magazine in Soeharto's Indonesia (2nd ed.)*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Subagyo, J. 2006. *Metode penelitian: Dalam teori dan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumargono. 2021. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Klaten: Lakeisha.
- Thompson, P. 2000. *The Voice of the Past: Oral History (3rd ed.)*. Oxford: Oxford University Press.
- Zed, M. 2004. *Literature Review dan Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Daftar Jurnal

- Prihatanti, Maskun, & Syaiful, M. 2013. Tinjauan historis tentang keterlibatan militer dalam pemerintahan Soeharto pada masa awal Orde Baru. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah (PESAGI)*.
- Purba, R. M., Susanto, H., Perdana, Y., & Ekwandari, Y. S. 2022. Dwifungsi ABRI dalam sosial politik sebagai gerakan akar rumput pada masa Orde Baru. *KRAKATOA: Journal of History, History Education and Cultural Studies*.

Daftar Skripsi

- Abdul Karim, M. A. W. 2023. Dampak Pemberedelan Tempo, Editor, Dan Detik Pada 21 Juni 1994. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nugroho, A. P. 2023. Pembredelan Majalah Tempo Tahun 1994 sebagai Awal Kebangkitan Pers di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Rosyada, Febriasti Nuresa. 2022. Pembredelan Majalah Tempo pada Masa Orde Baru Tahun 1994. *Skripsi*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Daftar Buletin/Majalah

- Aliansi Jurnalis Independen. 1994. *Sebulan Umur Pembredelan*. Buletin Independen AJI, Juli 1994.
- Aliansi Jurnalis Independen. 1995. *Pengadilan Pers Alternatif*. Buletin Independen AJI, 1 Juli 1995.
- Aliansi Jurnalis Independen. 1996. *Politik Premanisme*. Buletin Independen AJI, Mei 1996.
- Aliansi Jurnalis Independen. 1997. *Pemilu 1997 Tidak Sah*. Buletin Independen AJI, 7 Mei 1997.
- Tempo. 1994. *Habibie dan kapal itu*. Majalah Tempo, Edisi 11 Juni 1994
- Tempo. 1998. *Mengapa Soeharto Menantang*. 3 Oktober 1998.
- Tempo. 1998. *Pemeriksaan: CERITA & FAKTA*. 3 Oktober 1998.

Daftar Wawancara

- Andreas Harsono. 2025. Wawancara pribadi. 9 September 2025, Google Meet.
- Goenawan Mohamad. 2025. Wawancara pribadi. 23 September 2025, Jakarta.

Daftar Website

- Aliansi Jurnalis Independen. 2023. *Sejarah Aliansi Jurnalis Independen*. Diakses dari [https://aji.or.id/sejarah AJI](https://aji.or.id/sejarah-AJI)
- Menteri Penerangan Republik Indonesia. 1994. *Surat Keputusan tentang Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)* Majalah Tempo. Diakses dari <https://jdih.bkpm.go.id>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1948. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Tempo Media Group. 2019. *Sejarah Tempo*. Diakses dari <https://www.tempo.id/corporate.php>